

Rizky Nur Ayuningtyas Putri, M.E.

TEORI EKONOMI MAKRO



Rizky Nur Ayuningtyas Putri, M.E.

TEORI EKONOMI MAKRO

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

TEORI EKONOMI MAKRO

Rizky Nur Ayuningtyas Putri, M.E.

TEORI EKONOMI MAKRO

Rizky Nur Ayuningtyas Putri, M.E.

Desain Cover :

Tim Gerbang Media Aksara

Tata Letak :

Tim Gerbang Media Aksara

Editor :

Tim Gerbang Media Aksara

Ukuran :

15.5x23 cm : xiv + 170 hal

ISBN : 978-623-6666-72-2

Cetakan Pertama :

September 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2019 by Gerbang Media Aksara

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau

memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini

tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT GERBANG MEDIA AKSARA

(Anggota IKAPI 142/DIY/2021)

Jl. Wonosari Km 07, Banguntapan, Yogyakarta

Bekerjasama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Raden Mas Said Surakarta

Telp/Faks: (0274) 4353671/081578513092

Website: www.gerbangmediaaksara.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan buku ajar mata kuliah Ekonomi Makro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis beserta tim yang terlibat menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu dalam penyusunan buku ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor dan Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta beserta staf, keluarga, dan pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kebaikannya menjadi amal soleh di sisi Allah SWT.

Penulis berharap semoga buku ini bermanfaat bagi civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Penulis menyadari keterbatasan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga yang tersaji dalam buku ini tentunya perlu perbaikan. Saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak Penulis harapkan demi per-

baikan buku ini. Akhirnya semoga buku ajar ini memberikan manfaat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, Agustus 2022

Penulis,

Rizky Nur Ayuningtyas Putri

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN EKONOMI MAKRO	1
A. Rencana Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	1
B. Konsep Dasar Ekonomi Makro	1
C. Definisi Teori Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro	3
D. Masalah Ekonomi Makro	4
E. Tujuan Mempelajari Ekonomi Makro	4
F. Sejarah Ekonomi Makro Islam	6
G. Karakteristik Ekonomi Makro Islam	9
H. Ikhtisar	11
I. Pertanyaan dan Diskusi	12
BAB II KEBIJAKAN UMUM EKONOMI MAKRO	13
A. Rencana Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	13
B. Konsep Dasar Kebijakan Ekonomi Makro	13
C. Instrumen Kebijakan Moneter Konvensional	15
D. Instrumen Kebijakan Ekonomi Moneter Islam	18

E.	Kebijakan Ekspansif dan Kebijakan Kontraktif	20
F.	Kebijakan Stabilisasi	21
G.	Crowding Out Effect.....	23
H.	Ikhtisar	24
I.	Pertanyaan dan Diskusi	25
BAB III	KONSEP DAN PENGUKURAN	
	PENDAPATAN NASIONAL.....	26
A.	Rencana Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	26
B.	Konsep Perhitungan Pendapatan Nasional ..	26
C.	Metode Perhitungan Pendapatan Nasional ..	28
D.	Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam	30
E.	Ikhtisar	31
F.	Pertanyaan dan Diskusi	32
BAB IV	TEORI KONSUMSI.....	33
A.	Rencana Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	33
B.	Konsep Konsumsi dalam Pendapatan Nasional.....	33
C.	Teori Konsumsi John Maynard Keynes	34
D.	Hipotesis Siklus Hidup Franco Modigliani...	36
E.	Hipotesis Pendapatan Permanen Milton Friedman.....	39
F.	Pilihan Antar Waktu Irving Fisher	40
G.	Teori Konsumsi dalam Perspektif Islam.....	40
H.	Ikhtisar	46
I.	Pertanyaan dan Diskusi	47
BAB V	TEORI INVESTASI	48
A.	Rencana Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	48

B.	Konsep Dasar Teori Investasi	48
C.	Pelaksana Investasi	49
D.	Faktor yang mempengaruhi tingkat investasi	52
E.	Hubungan Investasi dan Pendapatan Nasional	53
F.	Investasi Tetap Bisnis (<i>business fixed investment</i>)	54
G.	Investasi Residensial (<i>residential investment</i>) .	54
H.	Investasi Persediaan (<i>inventory investment</i>) ...	55
I.	Ikhtisar	55
J.	Pertanyaan dan Diskusi	57
BAB VI	PERMINTAAN UANG DAN JUMLAH UANG BEREDAR	58
A.	Rencana Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	58
B.	Fungsi Uang	58
C.	Jenis Uang Beredar dalam Perekonomian	61
D.	Teori Permintaan Uang	63
E.	Bank dan Perekonomian	69
F.	Tingkat Bunga dan Perekonomian	73
G.	Permintaan Uang dalam Ekonomi Islam	74
H.	Permintaan dan Penawaran Uang : Mazhab Ekonomi Islam	76
I.	Pentingnya Uang dalam Ekonomi Islam	80
J.	Fungsi Uang dalam Ekonomi Islam	80
K.	Nilai Waktu Uang : Perspektif Ekonomi Islam	82
L.	Ikhtisar	85
M.	Pertanyaan dan Diskusi	86
BAB VII	PERMINTAAN DAN PENAWARAN AGREGAT	87
A.	Rencana Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	87

B.	Pengertian Permintaan dan Penawaran Agregat	87
C.	Kurva Permintaan Agregat (<i>Aggregate Demand Curve</i>).....	88
D.	Kurva Penawaran Agregat	91
E.	Dampak Kebijakan Fiskal Ekspansif	94
F.	Dampak Kebijakan Moneter Ekspansif.....	95
G.	Pengaruh AD, AS, Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter	95
H.	Ikhtisar	96
I.	Pertanyaan dan Diskusi	97
BAB VIII INFLASI DAN PENGANGGURAN		98
A.	Rencana Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	98
B.	Konsep dasar Inflasi dan Pengangguran.....	98
C.	Teori Inflasi	99
D.	Jenis Inflasi	101
E.	Cara Menghitung Inflasi	103
F.	Dampak Inflasi.....	104
G.	Kebijakan Mengatasi Inflasi.....	105
H.	Kategori Pengangguran.....	106
I.	Strategi mengatasi pengangguran	107
J.	Hubungan Inflasi, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi	108
K.	Ikhtisar	109
L.	Pertanyaan dan Diskusi	110
BAB XI HUTANG PEMERINTAH.....		111
A.	Rencana Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	111
B.	Konsep Dasar Hutang Pemerintah.....	111
C.	Pandangan Tradisional atas Hutang Pemerintah	112

D.	Pandangan Richardian atas Hutang Pemerintah	113
E.	Perspektif Hutang Pemerintah dalam Ekonomi Konvensional	114
F.	Perspektif Hutang Pemerintah dalam Ekonomi Islam	116
G.	Ikhtisar	121
H.	Pertanyaan dan Diskusi	122
BAB X	ANALISIS IS-LM	123
A.	Rencana Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	123
B.	Konsep Dasar Pasar Barang dan Pasar Uang	123
C.	Kurva IS dan Pasar Barang	125
D.	Kurva LM dan Pasar Uang	130
E.	Keseimbangan Umum IS-LM	134
F.	Ikhtisar	140
G.	Pertanyaan dan Diskusi	141
BAB XI	PERTUMBUHAN EKONOMI.....	143
A.	Rencana Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	143
B.	Konsep Dasar Pertumbuhan Ekonomi	143
C.	Teori Pertumbuhan Ekonomi	144
D.	Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi	149
E.	Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi	152
F.	Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi.....	154
G.	Ikhtisar	155
H.	Pertanyaan dan Diskusi	156
	Daftar Pustaka	157
	Glosarium	159

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Masalah dan Sifat Kebijakan yang Harus Dilakukan Pemerintah.....	21
Tabel 6.1	Jenis dan Ukuran Uang Beredar	63
Tabel 11.1	Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi	152

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Aliran Kegiatan Perekonomian 4 Sektor	2
Gambar 2.1	Lingkaran Permasalahan Ekonomi Indonesia pada Masa Krisis Moneter	15
Gambar 2.2.	Mekanisme Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Politik Diskonto.....	16
Gambar 2.3.	Mekanisme Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Operasi Pasar Terbuka	16
Gambar 2.4.	Mekanisme Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Kebijakan Cadangan Minimum	17
Gambar 2.5.	Mekanisme Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Kredit Selektif	17
Gambar 2.6.	Mekanisme Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Himbauan Moral.....	18
Gambar 5.1.	Kurva Investasi Pemerintah.....	50
Gambar 5.2.	Kurva Investasi Swasta.....	51
Gambar 7.1.	Kurva Permintaan Agregat.....	88
Gambar 7.2.	Penurunan Kurva Permintaan Agregat 1	89
Gambar 7.3.	Penurunan Kurva Permintaan Agregat 2	89
Gambar 7.4	Pergeseran Kurva Permintaan Agregat .	90
Gambar 7.5.	Kurva penawaran agregat jangka pendek.....	91
Gambar 7.6	Kurva Pergeseran Penawaran Agregat..	92
Gambar 7.7	Kurva Pergeseran Penawaran Agregat Jangka Pendek (SRAS).....	92
Gambar 7.8	Pergeseran SRAS ke LRAS.....	93
Gambar 7.9	Kurva LRAS	93
Gambar 7.10	Dampak Kebijakan Fiskal Ekspansif pada Permintaan Agregat	94

Gambar 7.11	Kurva Kebijakan Moneter Ekspansif dalam AD-AS	95
Gambar 7.12	Kurva Pergeseran Permintaan Agregat .	95
Gambar 10.1	kurva Fungsi Permintaan.....	127
Gambar 10.2	Kurva Fungsi IS	129
Gambar 10.3	Kurva Permintaan Uang untuk Transaksi dan Berjaga-jaga	131
Gambar 10.4	Kurva Permintaan Uang dengan Motif Spekulasi.....	132
Gambar 10.5	Kurva LM.....	134
Gambar 10.6	Grafik Keseimbangan IS-LM	135
Gambar 10.7	Kurva Keseimbangan IS-LM Model 2 Sektor.....	137
Gambar 10.8	Kurva Penerapan IS-LM dalam Perekonomian Model 3 Sektor	138
Gambar 10.9	Kurva Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Keseimbangan Pasar Barang ..	139
Gambar 10.10	Kurva Dampak Kebijakan Moneter terhadap Keseimbangan Pasar Uang	140
Gambar 11.1	Kurva Pertumbuhan Kuznet	147

BAB I

PENDAHULUAN EKONOMI MAKRO

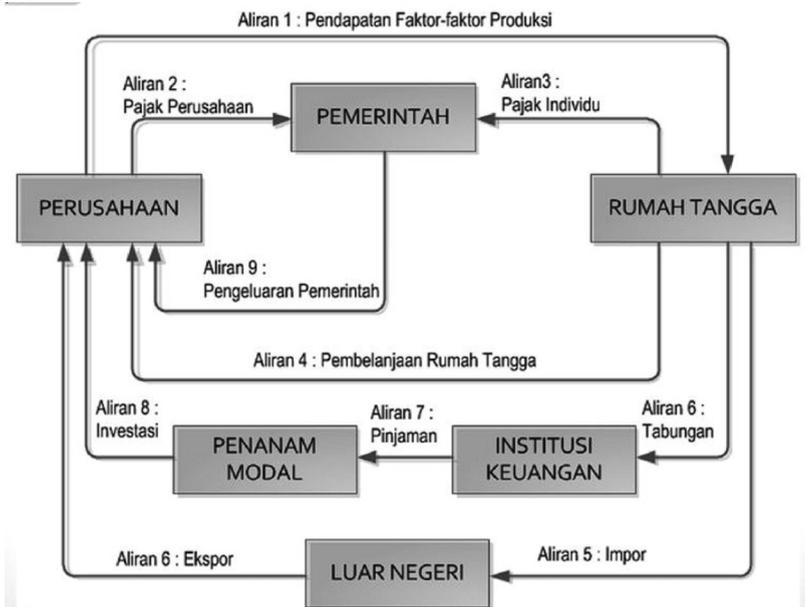
A. Rencana Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu mengenal tujuan mata kuliah dan membangun atmosfer pembelajaran dengan menjelaskan konsep dasar ekonomi makro, permasalahan yang ada dalam konteks ekonomi makro, dan memahami sejarah ekonomi makro dalam konteks ekonomi Islam.

B. Konsep Dasar Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan sebuah studi tentang perekonomian secara menyeluruh. Ekonomi makro memberikan penjelasan terkait perubahan ekonomi yang memberikan pengaruh kepada rumah tangga (*household*) dan perusahaan dan pasar. Hal-hal yang dipelajari dalam ekonomi makro ialah variabel ekonomi secara agregat yang meliputi tingkat kesempatan kerja, tingkat pendapatan nasional, jumlah uang beredar, investasi, pengeluaran konsumsi, tingkat suku bunga, tingkat harga, inflasi, pengangguran, hutang pemerintah, dan kebijakan fiskal dan moneter. Ekonom Gregory Mankiw dalam bukunya *Macroeconomics* (2007) menyatakan bahwa Pendapatan Domestik Bruto (PDB) / *Gross Domestic Product* (GDP) merupakan variabel penting dalam ekonomi makro.

GDP mengukur keseluruhan produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Selain GDP, ada beberapa tolak ukur keberhasilan perekonomian suatu negara, antara lain: pendapatan nasional (*national income*), produk nasional (*national product*), tingkat kesempatan kerja, maupun posisi neraca pembayaran luar negeri atau devisa negara.



Gambar 1.1 Aliran Kegiatan Perekonomian 4 Sektor

Keterangan:

- 1) Aliran 1: Perusahaan (produsen) membeli atau menyewa faktor produksi dari rumah tangga konsumen, konsumen mendapatkan balas jasa berupa sewa, gaji, upah dari produsen
- 2) Aliran 2: Perusahaan membayar pajak perusahaan atas barang yang dijual ke konsumen kepada pemerintah
- 3) Aliran 3: Konsumen membayar pajak individu atas barang yang dibelinya kepada pemerintah

- 4) Aliran 4: Rumah Tangga Konsumen membeli barang di pasar output dari produsen
- 5) Aliran 5: Rumah Tangga Konsumen mengimpor barang dan jasa dari pasar luar negeri
- 6) Aliran 6: Rumah Tangga Konsumen menabung Sebagian pendapatannya di sector Institusi keuangan
- 7) Aliran 7: Penanam modal menerima pinjaman dari Institusi Keuangan untuk investasi di perusahaan
- 8) Aliran 8: Penanam modal menginvestasikan dananya kepada perusahaan
- 9) Aliran 9: Pemerintah melakukan pengeluaran pemerintah berupa subsidi maupun keringanan pajak kepada produsen

C. Definisi Teori Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro

Teori ekonomi (*economic theory*) merupakan ilmu yang mempelajari secara teoritis dan konsep dasar perilaku individu dan masyarakat dalam menentukan alokasi atas sumber daya yang langka dalam upaya memenuhi dan meningkatkan kualitas hidupnya. Teori ekonomi dibedakan menjadi dua:

1. Teori ekonomi mikro

Menurut Mankiw (2007) ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang peran individu-individu pelaku ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan, serta bagaimana mereka berinteraksi di dalam pasar tertentu. Ruang lingkup ekonomi mikro sendiri mempelajari seputar hal-hal yang melingkupi perilaku konsumen dan pasar di sektor individu atau perusahaan. Konsumen dan produsen sendiri merupakan individu pada setiap rumah tangga, organisasi, masyarakat, dan perusahaan.

2. Teori ekonomi makro

Ekonomi makro adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang pembahasannya tentang ekonomi secara keseluruhan, mulai dari perilaku, proses pengambilan keputusan, dan kinerja. ruang lingkup teori ekonomi makro adalah usaha masyarakat dan pemerintah dalam mengelola faktor produksi secara efisien

D. Masalah Ekonomi Makro

Masalah pokok dalam ekonomi makro menurut Boediono (2001) meliputi masalah jangka pendek dan masalah jangka Panjang. Dalam masalah jangka pendek, ekonomi makro dihadapkan pada masalah stabilisasi. Masalah ini berkaitan dengan bagaimana upaya mengantisipasi permasalahan inflasi, pengangguran, maupun masalah ketimpangan neraca pembayaran. Dalam masalah jangka Panjang, ekonomi makro dihadapkan pada permasalahan pertumbuhan. Pertumbuhan adalah peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan perkapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran. Hal penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi ialah adanya keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, penambahan kapasitas produksi, dan tersedianya investasi.

E. Tujuan Mempelajari Ekonomi Makro

Tujuan utama dalam mempelajari ekonomi makro menurut ekonom antara lain sebagai berikut:

- 1) Mencapai output tinggi dibarengi dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang besar dan pertumbuhan pendapatan yang tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan

pendapatan nasional secara otomatis. Sehingga kegiatan perekonomian pun akan meningkat dalam jangka panjang. Tingginya pendapatan nasional menunjukkan adanya peningkatan pula dalam kegiatan produksi suatu negara. Hal tersebut tentunya berpengaruh pada meningkatnya kesejahteraan dan pendapatan per kapita negara tersebut.

- 2) Mencapai dan mempertahankan tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*). Peningkatan produktivitas nasional tidak hanya berpengaruh pada kapasitas produksi, namun juga membuka peluang kesempatan kerja yang lebih tinggi. Dengan tingkat kesempatan kerja yang tinggi maka pengangguran akan menurun dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
- 3) Mempertahankan tingkat kestabilan ekonomi, kestabilan harga dan mencegah fluktuasi inflasi di luar kendali. Dapat dikatakan stabil adalah ketika ekonomi suatu negara bisa mencapai keseimbangan pada neraca pembayaran dan permintaan persediaan barang. Kestabilan ekonomi ini penting karena akan menjadi cerminan kondisi dan kemampuan ekonomi negara di mata pelaku ekonomi dari negara lainnya. Pengendalian inflasi dilakukan dengan menekan harga yang berlaku seminimal mungkin lewat beberapa kebijakan, seperti *cash ratio* politik pasar terbuka, hingga politik diskonto.
- 4) Mencapai tingkat keseimbangan neraca pembayaran internasional. Tujuan selanjutnya dari analisis ekonomi makro adalah membuat neraca pembayaran luar negeri seimbang agar tidak terjadi defisit, serta meningkatkan devisa negara lewat peningkatan kegiatan ekspor.
- 5) Distribusi pendapatan merata. Distribusi pendapatan yang merata bisa dikatakan sebagai impian semua negara, sebab ketika distribusi pendapatan ini merata, maka kemakmuran masyarakat juga akan tercapa

F. Sejarah Ekonomi Makro Islam

1. Asal Mula Ekonomi Makro Islam

Awal mula ekonomi makro Islam tidak terlepas dari peran Rasulullah SAW. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan pada masa Rasulullah antara lain kebijakan dalam hal ekonomi, hukum dan politik. Rasulullah menganggap bahwa perekonomian menjadi penyangga dalam keimanan. Kebijakan yang dibuat Rasulullah juga menjadi pedoman para Khalifah dalam setiap pengambilan keputusan dengan landasan utama Al-Qur'an dan Al-Hadist.

2. Perekonomian Masa Rasulullah SAW

Perekonomian di zaman Rasulullah SAW berdasarkan syariat Islam dan berlandaskan prinsip-prinsip Alquran. Banyak perubahan dan perkembangan pembangunan ekonomi Islam masa di pemerintah Rasulullah. Rasulullah menerapkan jizyah, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-Muslim, khususnya ahli kitab. Ini dimaksudkan sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer. Selain jizyah, Rasulullah juga menerapkan sumber pendapatan negara yang terpenting dengan sistem kharaj, yakni pajak tanah yang dipungut dari kaum non-Muslim. Tanah tersebut diambil alih oleh kaum Muslimin dan pemiliknya diberi hak untuk mengolah tanah dengan status penyewa dan bersedia memberikan sebagian hasil produksinya kepada negara. kalangan Muslim juga kena pajak dari hasil pertanian dan buah-buahan, yakni ushr. Pajak ini telah berlangsung pada masa Arab Jahiliyah dan diadopsi Rasulullah sebagai bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang.

3. Perekonomian Masa Khulafaurrasyidin

3.1. Abu Bakar As-Sidiq (51 SH - 13 H/ 537 - 634 M)

Dalam bidang perekonomian Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq RA pada awal masa pemerintahannya dihadapkan pada kondisi dalam negeri dimana terdapat banyak para pembangkang yang menolak membayar zakat. Al-Isma'ili meriwayatkan dari Umar bin al-Khattab mengenai sikap khalifah Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat. Selama masa kekhalifahannya, Abu Bakar Al-Shiddiq RA menerapkan beberapa kebijakan umum dalam bidang perekonomian, antara lain Menetapkan praktek akad-akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah, menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat, melakukan pengelolaan dan penghitungan zakat secara akurat dan teliti.

Hasil pengumpulan zakat oleh Abu Bakar dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan (ditampung) dalam Baitul Maal untuk kemudian langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum Muslimin hingga tidak ada yang tersisa dalam jangka waktu yang tidak lama. Bahkan, ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara

3.2. Umar bin al-Khattab (40SH - 23H / 584 - 644 M)

Perekonomian dalam masa pemerintahan Umar bin al-Khattab beberapa di antaranya negara mengambil kekayaan umum sesuai dengan syara' dan tidak mengambil hasil dari kharaj ataupun harta fa'i kecuali dengan mekanisme yang sudah sesuai dengan syara', Negara menambahkan subsidi serta menutup hutang. Dan memberikan hak atas kekayaan umum, pengeluaran yang ada harus sesuai dengan haknya, negara hanya menerima harta kekayaan yang berasal dari hasil yang

sesuai dengan syara', negara harus menggunakan kekayaan dengan cara-cara yang sesuai dengan syara'.

Berikut beberapa kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Umar bin Khattab menurut Hayati (2021) :

a. Mendirikan Lembaga Baitul Maal

Umar bin Khattab mendirikan lembaga Baitul Maal yang berpusat di Madinah pada tahun 16 H dengan beberapa cabang lainnya di berbagai ibu kota provinsi. Umar bin Khattab menerapkan beberapa kebijakan dalam lembaga baitul maal tersebut di antaranya dengan mengelompokkan sumber pendapatan negara menjadi empat bagian, yakni: pendapatan yang berasal dari zakat dan 'ushr, pendapatan yang berasal dari khums dan sedekah, pendapatan yang berasal dari kharaj, fai, jizyah, 'ushr dan sewa tanah, an pendapatan lain-lain, digunakan untuk pemeliharaan anak-anak terlantar, membayar para pekerja, dan dana sosial lainnya.

b. Mendirikan Lembaga Hisbah

Hisbah merupakan kantor atau suatu lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral (adab) secara umum. Adapun tujuan dari al-hisbah ini adalah untuk menghapus segala perbuatan yang buruk dan mungkar sekaligus menggantinya dengan kebajikan dan kemaslahatan hingga akhirnya tercipta rasa aman dan tentram serta keadilan di dalam masyarakat.

3.3. Utsman bin Affan (47 SH- 35H /577-656 M)

Khalifah Utsman menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah negara kepada individu-individu untuk tujuan reklamasi. pemberian bantuan dan santunan. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuh-

an pokok masyarakat, ia memberi bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Sekalipun tidak ada kebijakan kontrol harga, tetapi beliau berusaha untuk tetap memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi harga di pasaran, bahkan terhadap harga dari suatu barang yang sulit dijangkau sekalipun, Khalifah Utsman bin Affan selalu mendiskusikan tingkat harga yang sedang berlaku di pasaran dengan seluruh kaum muslimin di setiap selesai melaksanakan shalat berjamaah

3.4. Ali bin Abi Thalib (23H-40 H/600-661 M)

Khalifah Ali bin Abi Thalib menerapkan prinsip pemerataan dalam masalah pendistribusian harta Baitul Maal, ia memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukannya dalam islam. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, diterapkan prinsip pemerataan. Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa seluruh pendapatan Negara yang disimpan dalam Baitul Maal harus didistribusikan kepada kaum muslimin, tanpa ada sedikitpun dana yang tersisa. Zakat, Jizyah, dan Pajak Selama pemerintahannya Ali bin Abi Thalib juga menetapkan pajak terhadap hasil hutan dan sayur-sayuran. ia menetapkan pajak terhadap para pemilik hutan sebesar 4000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Tentang masalah pembayaran pajak tahunan, Ali bin Abi Thalib mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan Khalifah Umar bin Khattab.

G. Karakteristik Ekonomi Makro Islam

Karakteristik ekonomi makro islam adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan dalam ekonomi islam bersifat ketuhanan, didasarkan pada pengaturan yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan dalam ekonomi makro konvensional, hukum ekonominya berasal dari sisi kapitalis (*ra'simaliyah, capitalistic*) dan sosialis (*syuyu'iyah, socialistic*) dengan tata aturan berasal dari konsep dan aturan manusia.
2. Dalam Islam, ekonomi hanya merupakan bagian dari al-Islam secara keseluruhan dan ekonomi merupakan bagian dari al-Islam sehingga tidak dapat dipisahkan antara persoalan ekonomi dengan rangkaian ajaran islam secara menyeluruh.
3. Ekonomi berdimensi akidah islamiah yang di dalamnya akan diminta pertanggungjawaban tentang akidah yang diyakini sehingga seorang muslim akan terikat dengan zakat, shodaqoh walaupun dengan melakukan hal tersebut seorang muslim akan kehilangan Sebagian kepentingan duniawinya untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT.
4. Berkaitan erat dengan akhlak. Islam tidak memisahkan peran akhlak dalam ekonomi. Hal tersebut menjadi dasar mengapa di setiap kegiatan ekonomi islam tidak terlepas dari kendali akhlak dan ajaran Islam.
5. Elastis (*al-murunah*), Al-Qur'an dan Hadist sebagai dasar aturan dalam ekonomi islam tidak memberikan doktrin ekonomi secara tekstual akan tetapi secara global sehingga implementasi kegiatan ekonomi dapat dilakukan sesuai dengan kesepakatan social sepanjang tidak menyalahi syariat Islam.
6. Obyektif (*al-maudhu'iyah*). Islam mengajarkan umatnya berlaku objektif dalam melakukan aktivitas ekonomi.
7. Harta kekayaan pada hakikatnya merupakan milik Allah SWT. Kepemilikan seseorang terhadap hartanya

tidak bersifat mutlak sehingga harus dimanfaatkan sesuai dengan tuntunan dari Allah SWT.

H. Ikhtisar

1. Ekonomi makro merupakan sebuah studi tentang perekonomian secara menyeluruh. Ekonomi makro memberikan penjelasan terkait perubahan ekonomi yang memberikan pengaruh kepada rumah tangga (*household*) dan perusahaan dan pasar.
2. Pendapatan Domestik Bruto (PDB) / *Gross Domestic Product* (GDP) merupakan variabel penting dalam ekonomi makro. GDP mengukur keseluruhan produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu
3. Hal penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi ialah adanya keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, penambahan kapasitas produksi, dan tersedianya investasi.
4. Tujuan utama dalam mempelajari ekonomi makro antara lain mempertahankan tingkat kesempatan kerja penuh, mencapai output tinggi dibarengi dengan tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang besar dan pertumbuhan pendapatan yang tinggi, kestabilan ekonomi dan neraca pembayaran.

Awal mula ekonomi makro Islam tidak terlepas dari peran Rasulullah SAW. Rasulullah menganggap bahwa perekonomian menjadi penyangga dalam keimanan. Kebijakan yang dibuat Rasulullah juga menjadi pedoman para Khalifah dalam setiap pengambilan keputusan dengan landasan utama Al-Qur'an dan Al-Hadist.

I. Pertanyaan dan Diskusi

1. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang jizyah bagi kafir dzimmi?
2. Bagaimana konsep ekonomi menurut pandangan Islam?
3. Apa sajakah permasalahan makro jangka pendek dan jangka panjang?

BAB II

KEBIJAKAN UMUM EKONOMI MAKRO

A. Rencana Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa diharapkan mampu memahami kebijakan dalam ekonomi makro, instrument kebijakan ekonomi makro konvensional dan ekonomi makro Islam, serta implementasi kebijakan ekonomi kontraktif dan ekspansif dalam perekonomian

B. Konsep Dasar Kebijakan Ekonomi Makro

Tujuan pembangunan dalam suatu negara ialah kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat dapat dilakukan dengan seperangkat instrument kebijakan. Seperangkat kebijakan secara umum terbagi atas kebijakan mikro dan kebijakan makro. Kebijakan ekonomi mikro membahas mengenai perilaku konsumen dan produsen, serta penentuan harga pasar dan kuantitas produk yang dijual di dalam pasar. Kegiatan ekonomi mikro umumnya mengacu ke ruang lingkup yang lebih kecil, misalnya, rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Kebijakan ekonomi makro adalah bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu Negara yang pada prinsipnya bertujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif.

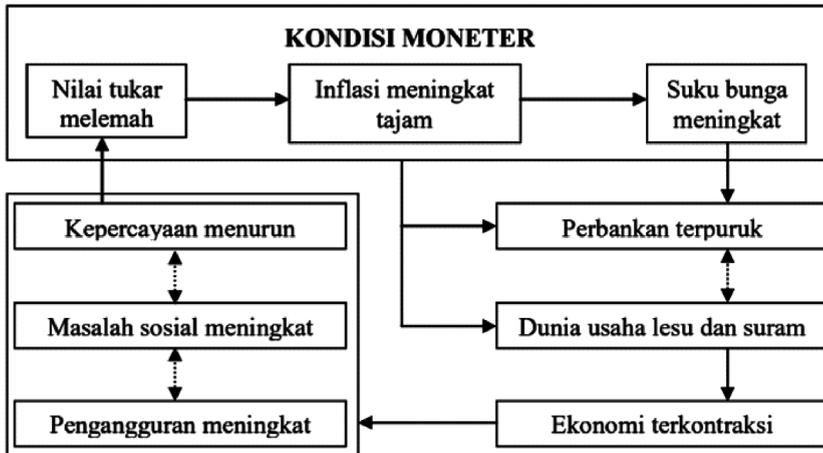
Cakupan tujuan kebijakan ekonomi makro adalah tingkat kesempatan kerja penuh, stabilitas tingkat harga, keseimbangan neraca pembayaran, dan pertumbuhan ekonomi jangka Panjang. Tujuan kebijakan makro tersebut dapat dicapai dengan instrument kebijakan ekonomi makro, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Tujuan ekonomi makro dalam jangka pendek umumnya mencapai stabilitas. Stabilitas ekonomi makro merupakan syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan secara keseluruhan. Dalam realitanya, tidak ada sebuah kebijakan pembangunan yang berjalan secara parsial dapat mencapai proses pembangunan ekonomi yang baik. perlunya berbagai aspek dalam membangun sebuah pertumbuhan ekonomi dan pencapaian pembangunan ekonomi.

Tugas pokok pemerintah dalam bidang ekonomi suatu negara adalah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan barang public, mengurangi pengangguran dan kestabilan inflasi, pelaksanaan pemerataan distribusi pendapatan. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya pasar bebas yang adil bagi masyarakat. Jika pasar tersebut merugikan masyarakat, maka akan terjadi kegagalan pasar. Kegagalan pasar mencerminkan kegagalan pemerintah dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakatnya.

Sejarah mencatat bagaimana krisis keuangan yang melanda Indonesia 1997-1998 merupakan kenangan terburuk dalam dunia perbankan Indonesia. Berdampak pada runtuhnya beberapa lembaga perbankan dan menambah beban tugas pemerintah untuk turun tangan dalam upaya menyelamatkan lembaga-lembaga keuangan dari krisis likuiditas. Ditambah dengan situasi sosial politik yang terus memburuk menambah panjangnya krisis keuangan yang

melanda Indonesia. Sehingga menimbulkan permasalahan ekonomi di Indonesia yang semakin konflik



Gambar 2.1. Lingkaran Permasalahan Ekonomi Indonesia pada Masa Krisis Moneter

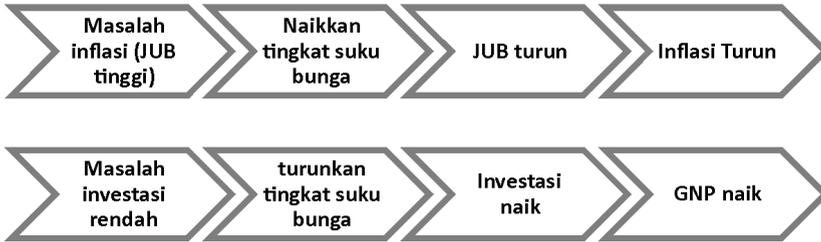
Sumber: Bank Indonesia, Laporan Tahunan 1997-1998

C. Instrumen Kebijakan Moneter Konvensional

Beberapa instrument yang digunakan dalam kebijakan ekonomi moneter konvensional meliputi:

1. Politik diskonto (*discount rate policy*)

Politik diskonto dapat dilakukan untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, cara yang dilakukan ialah dengan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Apabila tujuan jangka pendek ialah stabilitas ekonomi, maka jumlah uang beredar perlu diturunkan apabila terjadi inflasi yang tinggi. Kebijakan ini disebut kebijakan uang ketat (*tight money policy*). Sebaliknya jika pemerintah ingin menambah jumlah uang beredar maka kebijakan akan disebut sebagai kebijakan uang longgar (*easy money policy*).



Gambar 2.2. Mekanisme Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Politik Diskonto

2. Operasi pasar terbuka (*open market operation*)

Salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal. Bank sentral melakukan operasi pasar terbuka untuk mempengaruhi pasokan uang dalam perekonomian. Pembelian (penjualan) surat berharga pemerintah meningkatkan (menurunkan) cadangan bank umum, menyebabkan kenaikan (penurunan) harga surat berharga pemerintah



Gambar 2.3. Mekanisme Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Operasi Pasar Terbuka

3. Kebijakan cadangan minimum (*cash ratio policy*)

Kebijakan Cadangan minimum adalah salah satu kebijakan moneter bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan peredaran uang. Bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. perbedaan antara cadangan wajib minimum dan kebijakan diskonto tersebut terletak pada bentuk-

nya. Cadangan wajib minimum merupakan kebijakan dalam bentuk dana simpanan sedangkan kebijakan diskonto dalam bentuk suku bunga pinjaman.



Gambar 2.4. Mekanisme Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Kebijakan Cadangan Minimum

4. Kebijakan kredit selektif (*selective credit control*)

Kredit Selektif diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu *Character, Capability, Collateral, Capital, dan Condition of Economy*. Dengan kebijakan kredit selektif, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi.



Gambar 2.5. Mekanisme Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Kredit Selektif

5. Himbauan moral (*Moral Persuasion*)

Himbauan Moral adalah instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dimasyarakat melalui pemberian himbauan kepada para pelaku ekonomi seperti bank swasta dan lain sebagainya.

Gubernur Bank Indonesia dapat memberi saran melalui Perbanas (Perhimpunan Bank Nasional) agar perbankan berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya, masukan tersebut akan ditindaklanjuti oleh bank-bank umum dengan memberikan persyaratan yang lebih ketat dalam memberikan kredit

bagi nasabahnya. Hal ini akan menjadikan jumlah uang beredar di masyarakat dibatasi dan bila berlangsung dalam waktu yang lama maka dapat menurunkan jumlah uang beredar di masyarakat. Namun bila bank sentral mengumumkan melalui Gubernur BI bahwa akan menurunkan suku bunga pinjaman maka akan banyak orang yang tertarik untuk meminjam uang dan bergegas menyiapkan persyaratan yang dibutuhkan. Situasi tersebut akan menjadikan jumlah uang beredar di masyarakat bertambah karena banyak orang yang meminjam uang tidak hanya untuk kepentingan usaha melainkan juga untuk kebutuhan konsumtif misal membeli mobil, membuat rumah atau biaya pendidikan.



Gambar 2.6. Mekanisme Kebijakan Moneter Melalui Instrumen Himbauan Moral

D. Instrumen Kebijakan Ekonomi Moneter Islam

Dalam ekonomi Islam, tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan discount rate. Bank sentral Islam memerlukan instrumen bebas riba/bunga yang dapat digunakan untuk mengontrol kebijakan ekonomi moneter Islam yang digunakan untuk mengontrol jumlah uang beredar. Menurut Muhamad (2020), secara umum terdapat beberapa instrument yang dapat diterapkan dalam ekonomi moneter Islam antara lain sebagai berikut:

1. Islamic Sukuk

Penyertaan pemerintah (obligasi pemerintah) di mana apabila terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Sukuk

memiliki kemampuan dalam mengontrol jumlah uang beredar.

2. Reserve Ratio

Merupakan jenis persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang bank sentral. Jika bank sentral ingin mengontrol JUB, maka bank sentral dapat menaikkan reserve ratio sehingga uang di bank umum menjadi berkurang, begitu pula apabila bank sentral menurunkan reserve ratio maka uang di bank umum akan meningkat.

3. Moral Suasion

Bank sentral dapat membujuk bank umum untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai bentuk tanggung jawab. Ketika ekonomi dalam keadaan depresi sehingga apabila kredit meningkat maka jumlah uang beredar dalam masyarakat akan meningkat.

4. Financing Ratio

Bank sentral dapat menentukan rasio pembayaran yang dilakukan bank umum dalam menyalurkan pembiayaannya.

5. Refinance Ratio

Merupakan bentuk instrumen dengan proporsi pinjaman bebas bunga/riba. Pada saat refinance ratio meningkat, pembiayaan juga meningkat. Namun sebaliknya, refinance ratio yang menurun secara langsung memberikan signal kepada lembaga perbankan untuk lebih berhati-hati terhadap penyaluran pembiayaan.

6. Profit Sharing Ratio

Sebuah rasio bagi keuntungan yang ditetapkan sebelum bisnis tersebut mulai dijalankan. Penggunaan instrumen ini oleh bank sentral dilakukan pada saat jumlah uang yang beredar ingin ditingkatkan.

7. Government Investment Certificate

Instrumen ini merupakan pengganti treasury bill yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral. Namun dalam hukum syariah, instrumen tersebut dilarang. Sehingga diganti dengan GIC dengan sistem bebas bunga

E. Kebijakan Ekspansif dan Kebijakan Kontraktif

Pemerintah memerlukan instrument kebijakan dalam mencapai target kebijakan makro ekonomi. Kebijakan moneter meliputi semua Tindakan pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian melalui mekanisme Jumlah Uang Beredar (JUB). Kebijakan fiskal merupakan segala urusan yang berkenaan dengan pajak atau pendapatan negara. Fiskal berasal dari masyarakat dan dianggap oleh pemerintahan sebagai pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran negara. Dalam kebijakan fiskal dan moneter terdapat istilah kebijakan ekspansif dan kontraktif yang berdasarkan perubahan nilai suatu variabel target yang menjadi tujuan kebijakan.

1. Kebijakan Ekspansif

Kebijakan ekonomi makro yang bertujuan memperbesar kegiatan ekonomi dalam perekonomian. Kebijakan ekspansif adalah kebijakan yang meningkatkan permintaan agregat, pendapatan riil dan mengurangi pengangguran. Kebijakan ekspansif pada umumnya dilakukan pada masa perekonomian dengan tingkat pengangguran tinggi dan kapasitas produksi nasional belum maksimal.

2. Kebijakan Kontraktif

Kebijakan ekonomi makro yang bertujuan menurunkan kegiatan ekonomi dalam perekonomian. Kebijakan kontraktif pada umumnya dilakukan pada masa overemployment, yaitu keadaan di mana permintaan agregat

melampaui besarnya kapasitas produksi nasional. Keadaan ini umumnya ditandai dengan inflasi tinggi dan neraca pembayaran deficit secara terus menerus sehingga kedua hal tersebut perlu ditekan untuk kestabilan perekonomian.

Tabel 2.1. Masalah dan Sifat Kebijakan yang Harus Dilakukan Pemerintah

Masalah	Kebojakan Moneter	Kebijakan Fiskal
Pengangguran dan defisit	Kontraktif	Ekspansif
Pengangguran dan surplus	Ekspansif	Ekspansif
Inflasi dan defisit	Kontraktif	Kontraktif
Inflasi dan surplus	Ekspansif	Kontraktif

Sumber: Prasetyo (2009)

F. Kebijakan Stabilisasi

Bagi banyak ekonom, masalah kebijakan pemerintah yang aktif adalah jelas dan sederhana. Resesi adalah periode pengangguran tinggi, pendapatan rendah, dan tekanan ekonomi meningkat. Model permintaan agregat dan penawaran agregat menunjukkan bagaimana guncangan terhadap perekonomian dapat menyebabkan resesi. Model tersebut juga menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan fiskal dapat mencegah resesi dengan merespons guncangan ini. Para ekonom ini menganggap suatu pemborosan bila tidak menggunakan instrumen kebijakan ini untuk menstabilkan perekonomian. Ekonom lain bersikap kritis terhadap upaya pemerintah untuk menstabilkan perekonomian. Mereka berpendapat pemerintah seharusnya melakukan pendekatan *lepas-tangan* pada kebijakan makroekonomi.

Ekonom membedakan antara dua tipe kelambanan yang relevan untuk melakukan kebijakan stabilisasi: kelam-

banan dalam (*inside lag*) dan kelambanan luar (*outside lag*). Kelambanan dalam adalah waktu antara guncangan terhadap perekonomian dan tindakan kebijakan dalam menanggapi. Kelambanan ini muncul karena para pembuat kebijakan butuh waktu untuk menyadari bahwa sebuah guncangan telah terjadi dan lalu mengeluarkan kebijakan untuk menanganinya.

Kelambanan luar adalah waktu antara tindakan kebijakan dan pengaruhnya pada perekonomian. Kelambanan ini muncul karena kebijakan tidak segera mempengaruhi pengeluaran, pendapatan dan kesempatan kerja. Kebijakan moneter memiliki kelambanan ke dalam yang lebih pendek dibandingkan kebijakan fiskal. Hal tersebut dikarenakan Bank Sentral dapat memutuskan dan menerapkan perubahan kebijakan secara singkat. Hal tersebut berbeda dengan kebijakan moneter yang harus melalui berbagai tahapan dalam melakukan perubahan kebijakan. Kebijakan moneter bekerja dengan mengubah jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga, yang pada akhirnya mempengaruhi investasi. Akan tetapi rencana bisnis dan investasi seringkali sudah ditetapkan perusahaan jauh sebelum adanya perubahan kebijakan moneter sehingga kebijakan moneter dianggap tidak mempengaruhi aktivitas ekonomi sampai dengan 6 bulan setelah kebijakan tersebut dibuat.

Beberapa kebijakan, disebut stabilisator otomatis (*automatic stabilizers*) dirancang untuk mengurangi kelambanan yang terkait dengan kebijakan stabilisasi. Stabilisator otomatis adalah kebijakan yang mendorong atau menekan perekonomian ketika diperlukan tanpa perubahan kebijakan yang disengaja. Misalnya, sistem pajak pendapatan secara otomatis menurunkan pajak ketika perekonomian menuju resesi, tanpa perubahan hukum pajak, karena individu dan perusahaan membayar pajak lebih kecil ketika pendapatan turun.

Demikian juga, sistem asuransi pengangguran dan kesejahteraan secara otomatis meningkatkan pembayaran transfer ketika perekonomian menuju resesi, karena lebih banyak orang yang meminta tunjangan. Stabilisator otomatis ini bisa dipandang sebagai sebagai jenis kebijakan fiskal tanpa kelambanan dalam.

G. Crowding Out Effect

Efek “*crowding out*” adalah suatu kondisi ketika pemerintah sangat agresif meminjam dari publik (menerbitkan surat utang) dengan suku bunga tinggi, sehingga sektor bisnis menjadi enggan berinvestasi. Rendahnya investasi ini pada akhirnya menyebabkan perekonomian melambat dan daya beli masyarakat melemah.

Bagaimana efek “*crowding out*” ini terjadi di Indonesia? Secara sederhana, dana perbankan telah tersedot ke surat utang pemerintah yang berbunga tinggi, sehingga perbankan menjadi kekurangan dana untuk menyalurkan kredit. Dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per 23 Oktober 2020 total surat berharga negara negara (SBN) yang dimiliki bank sudah mencapai Rp 1.348 triliun. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, per Oktober 2019 total dana bank di surat berharga negara (SBN) rupiah hanya Rp 670 triliun. Artinya selama setahun telah terjadi kenaikan 100 persen dari dana perbankan di surat utang pemerintah. Penyebab besarnya dana perbankan tersedot ke dalam surat utang karena masyarakat pemilik dana besar di Perbankan lebih memilih untuk membeli surat utang pemerintah disebabkan bunganya yang tinggi dan seluruh nilainya ditanggung oleh negara bila terjadi krisis keuangan. Berbeda bila mereka menyimpan dana di tabungan atau deposito yang hanya ditanggung hingga Rp 2 miliar oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Teori *crowding out effect* sendiri telah menjadi bahan diskusi para ekonom selama berabad lamanya. Hal tersebut karena *crowding out effect* sudah terjadi sejak dulu, meski dalam bentuk yang berbeda dibanding saat ini. Pada zaman dulu, *crowding out effect* terjadi karena masyarakat meyakini bahwa sirkulasi modal usaha sangat terbatas. Sebab, negara-negara di zaman dulu masih memiliki volume perdagangan internasional yang rendah. Sehingga, arus modal dan sumber pendanaan usaha pun dianggap “terkurung” dalam batas-batas administrasi masing-masing negara. Pemerintah kemudian akan meningkatkan tarif pajaknya, sehingga uang beredar di masyarakat akan lari ke kantong pemerintah. Ujung-ujungnya, uang menjadi “langka”. Sumber modal demi mendanai kegiatan dunia usaha pun kian berkurang.

H. Ikhtisar

1. Untuk mencapai kesejahteraan rakyat dapat dilakukan dengan seperangkat instrument kebijakan. Seperangkat kebijakan secara umum terbagi atas kebijakan mikro dan kebijakan makro.
2. Instrument kebijakan ekonomi makro konvensional meliputi politik diskonto, himbuan moral, cash ratio policy.
3. Dalam ekonomi Islam, tidak ada sistem bunga sehingga bank sentral tidak dapat menerapkan kebijakan discount rate.
8. Instrumen kebijakan ekonomi islam meliputi *Islamic Sukuk*, *Reserve Ratio*, *profit sharing ratio*, dll.
4. Kebijakan ekspansif adalah kebijakan yang meningkatkan permintaan agregat, pendapatan riil dan mengurangi pengangguran. Kebijakan ekspansif pada umumnya dilakukan pada masa perekonomian dengan tingkat pengangguran tinggi dan kapasitas produksi nasional belum

maksimal.

5. Kebijakan kontraktif adalah Kebijakan ekonomi makro yang bertujuan menurunkan kegiatan ekonomi dalam perekonomian.
6. Stabilisator otomatis (*automatic stabilizers*) dirancang untuk mengurangi kelambanan yang terkait dengan kebijakan stabilisasi. Stabilisator otomatis adalah kebijakan yang mendorong atau menekan perekonomian ketika diperlukan tanpa perubahan kebijakan yang disengaja.
7. Efek "*crowdingout*" adalah suatu kondisi ketika pemerintah sangat agresif meminjam dari publik (menerbitkan surat utang) dengan suku bunga tinggi, sehingga sektor bisnis menjadi enggan berinvestasi. Rendahnya investasi ini pada akhirnya menyebabkan perekonomian melambat dan daya beli masyarakat melemah.

I. Pertanyaan dan Diskusi

1. Jelaskan dengan Bahasa anda sendiri, apakah yang dimaksud dengan *crowding out*? Bagaimana dampaknya terhadap perekonomian?
2. Jelaskan instrumen dalam ekonomi moneter konvensional dan moneter Islam yang memiliki kesamaan satu dengan yang lain?
3. Apakah yang dimaksud dengan kelambanan ke luar dan kelambanan di dalam? Kebijakan apa yang dapat merespon masing-masing kelambanan dengan cepat?

BAB III

KONSEP DAN PENGUKURAN PENDAPATAN NASIONAL

A. Rencana Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa diharapkan mampu memahami tata cara perhitungan pendapatan nasional termasuk di dalamnya metode perhitungan pendapatan nasional dan mengetahui perspektif Islam terkait pendapatan nasional.

B. Konsep Perhitungan Pendapatan Nasional

1. Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*)

PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

2. Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*)

Seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga negara yang bersangkutan, baik warga negara yang ada di dalam negerimaupun warga negara yang ada di luar negeri pada suatu periode tertentu. Barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri tidak termasuk dalam GNP.

3. Produk Nasional Netto (*Nett National Product*)

Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu, biasanya dalam satu tahun setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) dan barang pengganti modal.

$$\text{NNP} = \text{GNP} - (\text{depresiasi} + \text{barang pengganti modal})$$

4. Pendapatan Nasional Netto (*Nett National Product*)

Pendapatan Nasional Neto (Net National Income) adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi dikurangi pajak tidak langsung.

$$\text{NNI} = \text{NNP} - \text{Pajak tidak langsung}$$

5. Pendapatan Perseorangan (*Personal Income*)

Jumlah seluruh penerimaan yang diterima perseorangan sebagai balas jasa dalam proses produksi.

$$\text{PI} = (\text{NNI} + \text{Transfer payment}) - (\text{Iuran jaminan social} + \text{iuran asuransi} + \text{laba ditahan} + \text{pajak perseorangan})$$

6. Pendapatan Siap Dikonsumsi (*Disposable Income*)

Disposable income adalah pendapatan pribadi yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari setelah dikurangi pajak langsung, seperti PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), PPh (Pajak Penghasilan), dan PBB (Pajak Bumi Bangunan). Besar kecilnya *disposable income* adalah faktor penting penentu daya beli, kemampuan menabung, bahkan kesejahteraan hidup. Hal ini karena semakin besar pendapatan bebas pajak seseorang, semakin banyak pula kebutuhan dan keinginan yang dapat mereka penuhi.

$$\text{DI} = \text{PI} - \text{Pajak langsung}$$

7. Pendapatan Di Bawa Pulang (*Take Home Pay*)

THP adalah pembayaran utuh yang diterima karyawan suatu perusahaan dengan penghitungan penambahan

pendapatan rutin dan pendapatan insidental dikurangi dengan komponen potongan gaji. Gaji pokok berbeda dengan take home pay. Gaji pokok merupakan salah satu komponen dalam penghasilan yang didapatkan oleh karyawan. Besarannya ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat atau jenis pekerjaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, besaran gaji pokok paling sedikit 75% dari jumlah gaji pokok dan tunjangan tetap.

THP = DI - Kewajiban pembayaran hutang

C. Metode Perhitungan Pendapatan Nasional

1. Metode Produksi (*Production Approach*)

Dalam metode produksi, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan hasil produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor selama periode tertentu. Pendekatan ini menekankan pada kegiatan yang menciptakan nilai tambah (*value added*). Maka dari itu, perhitungan hanya mencakup perhitungan nilai tambah pada sektor produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = P_1Q_1 + P_2Q_2 + \dots + P_nQ_n \quad (3.1)$$

Di mana:

Y = Pendapatan Nasional

P₁ = Harga barang ke-1

P_n = Harga barang ke-n

Q₁ = jenis barang ke-1

Q_n = jenis barang ke-n

2. Metode Pendapatan (Income Approach)

Berdasarkan pendekatan pendapatan, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima masyarakat (pemilik faktor produksi) sebagai balas jasa yang mereka terima dalam proses produksi. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = w + i + r + p + (s-t) + Nfp \quad (3.2.)$$

Di mana:

Y = Pendapatan Nasional

w = Pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya (*wage*)

i = Pendapatan dari bunga (*interest*)

r = Pendapatan bersih dari sewa (*rent*)

p = Jumlah keuntungan yang diterima pengusaha (*profit*)

(s-t) = subsidi - pajak tidak langsung

Nfp = Pembayaran faktor produksi bersih ke luar negeri

3. Metode Pengeluaran (Expenditure Approach)

Pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan permintaan akhir dari para pelaku ekonomi (konsumen, produsen, dan pemerintah) dalam suatu negara. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = C + I + G + (X-M) \quad (3.3)$$

Di mana:

Y = Pendapatan Nasional

C = Pengeluaran konsumsi rumah tangga (*Consumption*).

I = Investasi domestik bruto (*Investment/I*)

G = Pengeluaran konsumsi pemerintah (*Government Expenditure/G*).

$(X-M) =$ Ekspor neto atau nilai ekspor ($Export/X$) dikurangi impor ($Import/I$)

D. Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi makro konvensional dan ekonomi makro Islam, terdapat perbedaan aliran siklus pendapatan. Sektor rumah tangga memperoleh pendapatan dari sektor perusahaan dari bagi hasil (*ijarah*) atau upah. Pengeluaran sektor rumah tangga berupa konsumsi yang mana makan mempengaruhi pendapatan nasional dan pengeluaran lain seperti zakat, infaq, shodaqoh yang merupakan pembeda dari ekonomi konvensional. Investasi dari perusahaan dapat diperoleh dengan akad mudharabah maupun musyarakah. Berikut merupakan macam-macam pendapatan negara berdasarkan perspektif Islam:

1. Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang didapatkan dari musuh Islam dengan cara berperang. Bentuk harta Ghanimah meliputi harta bergerak (senjata, kendaraan, bahan makanan, emas, dll), harta tidak bergerak (bangunan, tanah, wilayah rampasan perang), dan tawanan perang. Pembagian ghanimah yang pertama ialah porsi 1/5 dari keseluruhan harta ghanimah. Menurut QS. Al-Anfal ayat 41 dan 69 adalah untuk Allah, Rasul, Kerabat Rasul, Anak yatim, golongan orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil). Porsi lainnya, yakni sebesar 4/5 bagian adalah pembagian ghanimah kedua. Porsi yang lebih besar ini diperuntukkan kepada para pasukan yang ikut berperang.

2. Ushr

'Usyr jamaknya 'usyur dalam bahasa Arab berarti sepersepuluh. Dalam tradisi masyarakat Arab, 'usyur me-

rupakan pungutan sepersepuluh dari harta yang diperdagangkan ketika seseorang melintasi perbatasan suatu negara. Jadi 'usyr mirip dengan bea cukai sekarang.

3. Jizyah

Jizyah yaitu pajak yang dikenakan terhadap non muslim yang hidup di dalam nungan Negara/pemerintah Islam

4. Kharaj

Kharaj adalah cukai hasil tanah yang dikenakan ke atas orang bukan Islam. Dalam undang-undang syariah, Kharaj adalah cukai untuk tanah pertanian

5. Kastam

Cukai yg dipungut oleh kerajaan atas barang-barang yg diimport atau diekspor

6. Wakaf

Wakaf merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu pihak untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda atau aset miliknya.

E. Ikhtisar

1. Perhitungan pendapatan nasional meliputi Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Product*), Produk Nasional Bruto (*Gross National Product*), Produk Nasional Netto (*Nett National Product*), Pendapatan Nasional Netto (*Nett National Product*), Pendapatan Perseorangan (*Personal Income*), Pendapatan Siap Dikonsumsi (*Disposable Income*), Pendapatan Di Bawa Pulang (*Take Home Pay*)

2. Metode Perhitungan Pendapatan Nasional meliputi metode pendapatan, metode pengeluaran, dan metode produksi.

3. Dalam ekonomi makro konvensional dan ekonomi makro Islam, terdapat perbedaan aliran siklus pendapatan.

Sector rumah tangga memperoleh pendapatan dari sector perusahaan dari bagi hasil (*ijarah*) atau upah. Pengeluaran sector rumah tangga berupa konsumsi yang mana makan mempengaruhi pendapatan nasional dan pengeluaran lain seperti zakat, infaq, shodaqoh yang merupakan pembeda dari ekonomi konvensional.

F. Pertanyaan dan Diskusi

1. Pada periode awal tahun 2020 diperoleh data sebagai berikut :
Sewa sebesar Rp. 400 juta, upah yang diterima per individu sebesar Rp. 300 ribu, profit pengusaha mencapai Rp. 450 juta, ekspor luar negeri sebesar Rp. 650 juta, bunga pemilik modal sebesar Rp. 350 juta, dan impor luar negeri sebesar Rp. 230 juta.
 - a) Berdasarkan data di atas, metode apa yang dapat digunakan untuk menghitung pendapatan nasional?
 - b) Berapa besarnya pendapatan nasional?
2. Dalam penerapan perhitungan pendapatan nasional, metode manakah yang paling sering digunakan di Indonesia? Sebutkan alasannya.
3. Naik turunnya pendapatan nasional suatu negara dipengaruhi oleh jumlah pengangguran. Jelaskan konsep tersebut dan bagaimana transmisi ekonominya?

BAB IV

TEORI KONSUMSI

A. Rencana Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan teori konsumsi serta mengetahui perbedaan teori konsumsi konvensional dan teori konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam.

B. Konsep Konsumsi dalam Pendapatan Nasional

Konsumsi merupakan bagian yang mengambil peran besar dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Teori Ekonomi Makro menyatakan bahwa perilaku masyarakat membelanjakan Sebagian pendapatannya untuk membeli sesuatu disebut pengeluaran konsumsi (*consumption expenditure*). Fungsi konsumsi secara matematis dapat dinotasikan sebagai berikut:

$$C = f(Y_d) \tag{4.1}$$

Di mana:

C = Besarnya tingkat konsumsi

Y_d = besarnya pendapatan siap pakai (*disposable income*)

Di setiap tingkat pendapatan akan selalu ada alokasi konsumsi di dalamnya, sehingga ada konsep terkait pendapatan dan konsumsi yang dikenal dengan istilah *Average Propensity to Consume* (APC) yaitu besarnya konsumsi yang terjadi dibandingkan dengan tingkat pendapatan di mana $APC=C/Y$. Konsep lain dalam konsumsi dan pendapatan ialah *Marginal Propensity to Consume* (MPC) yaitu perbandingan antara pertambahan konsumsi dibandingkan dengan pertambahan pendapatan yang terjadi di mana besarnya nilai $MPC=\Delta C/\Delta Y$.

Menurut Mankiw (2007), keputusan konsumsi sangat penting untuk analisis jangka pendek karena perannya dalam penentuan permintaan agregat (*aggregate demand*) dan memiliki peran penting dalam keputusan konsumsi jangka panjang dalam menentukan pertumbuhan ekonomi.

C. Teori Konsumsi John Maynard Keynes

Teori konsumsi Keynes diungkapkan pada tahun 1936 dalam bukunya yang berjudul *the General Theory of Employment, Interest and Money*. Teori konsumsi Keynes menjelaskan adanya hubungan antara pendapatan yang diterima saat ini (pendapatan *disposable*) dengan konsumsi yang dilakukan saat ini juga. Dengan kata lain pendapatan yang dimiliki dalam suatu waktu tertentu akan mempengaruhi konsumsi yang dilakukan oleh manusia dalam waktu itu juga. Apabila pendapatan meningkat maka konsumsi yang dilakukan juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya. Terdapat dua hal yang menjadi dasar teori konsumsi Keynes antara lain:

1. Hubungan Antara Pendapatan *Disposable* dan Konsumsi
Konsumsi yang dilakukan saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan *disposable* saat ini. Jika pendapatan *disposable* meningkat, maka konsumsi juga akan meningkat. Selan-

lutnya menurut Keynes ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung pada pendapatan. Artinya tingkat konsumsi itu harus dipenuhi, walaupun tingkat pendapatan sama dengan nol. Itulah yang disebut dengan konsumsi otonomus. Fungsi persamaan dalam teori konsumsi Keynes :

$$C = C_0 + bY_d \quad (4.2)$$

Di mana:

C = Konsumsi

C_0 = Konsumsi otonomus

b = Marginal Propensity to Consume (MPC)

Y_d = Pendapatan Disposable $0 \leq b \leq 1$

Yang perlu diperhatikan dalam fungsi konsumsi Keynes adalah:

- a. Merupakan variabel riil/nyata, yaitu bahwa fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran konsumsi yang keduanya dinyatakan dengan menggunakan tingkat harga konstan, bukan hubungan antara pendapatan nominal dengan pengeluaran konsumsi nominal.
 - b. Merupakan pendapatan yang terjadi, bukan pendapatan yang diperoleh sebelumnya, dan bukan pendapatan yang diperkirakan terjadi di masa datang.
 - c. Merupakan pendapatan absolut, bukan pendapatan relatif atau pendapatan permanen, sebagaimana dikemukakan oleh ahli ekonomi lainnya.
2. Kecenderungan Mengonsumsi Marjinal (*Marginal Propensity to Consume*)
- Kecenderungan mengonsumsi marjinal (*Marginal Propensity to Consume*, disingkat MPC) adalah konsep yang

memberikan gambaran tentang berapa konsumsi akan bertambah bila pendapatan disposabel bertambah satu unit. Fungsi persamaan MPC (2) :

$$MPC = \frac{\alpha C}{\alpha Y_d} \quad (4.3)$$

$$APC = \frac{C}{Y_d} \quad (4.4)$$

Di mana:

αC = selisih antara konsumsi C_0 dan C_1

αY = selisih antara pendapatan Y_0 dan Y_1

Jumlah tambahan konsumsi tidak akan lebih besar daripada tambahan pendapatan disposable, Sehingga angka MPC tidak akan lebih besar dari satu. Angka MPC juga tidak mungkin negatif, dimana jika pendapatan disposable terus meningkat, konsumsi terus menurun sampai nol (tidak ada konsumsi). Sebab manusia tidak mungkin hidup di bawah batas konsumsi minimal. Karena itu $0 < MPC < 1$. Dalam persamaan 1, koefisien parameter b adalah MPC. Besarnya MPC menunjukkan kemiringan (slope) kurva konsumsi.

D. Hipotesis Siklus Hidup Franco Modigliani

Hipotesis siklus hidup atau *The Life-Cycle Hipotesis* adalah sebuah teori ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran dan kebiasaan menabung masyarakat selama seumur hidup. Konsep ini dikembangkan oleh Franco Modigliani dan muridnya Richard Brumberg. LCH menganggap bahwa individu konsumsi dasar pada persentase pendapatan yang konstan diantisipasi hidup mereka. Sebuah contoh yang mendukung hipotesis bahwa orang menabung untuk masa pensiun sementara mereka yang mendapatkan penghasilan tetap (dari pada menghabiskan semuanya ketika diperoleh).

Pendekatan *life cycle* hipotesis mengharuskan setiap orang memiliki perencanaan lebih detail untuk kehidupan mereka, kehidupan yang berawal dari 0 tahun sampai dengan 63 tahun yang sesuai dengan umur standar Nabi Muhammad bisa digunakan secara optimal. Maka dari itu perlu perencanaan kehidupan pertama saat umur 0-15 tahun oleh orang tuanya, setelah itu pada umur produktif 15-45 tahun merupakan perencanaan individu yang bersangkutan. Pada usia sekolah semua kebutuhan akan dipenuhi oleh orang tua masing-masing sampai usia 15 tahun atau sampai pada usia selesai sekolah. Kemudian pada usia produktif digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, dan harus memiliki perencanaan kapan ia target untuk berhenti bekerja dan kapan target ia mati, agar keuangan disesuaikan dengan target kehidupan agar ia tidak menjadi beban bagi anaknya dimasa yang akan datang.

Sebagai contoh sebuah perencanaan, jika menginginkan kehidupan 63 tahun maka ia harus merencanakan secara rinci kehidupan mereka, seperti kapan ia harus mulai bekerja, menikah, perencanaan penghasilan, memiliki anak, sampai pada usia batas productive maksimum. Merencanakan segalanya adalah kunci keberhasilan dalam menjalani kehidupan, agar bisa memanfaatkan umur secara maksimum.

Siklus Kehidupan Hipotesis menyimpulkan bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata lebih besar pada kedua orang muda dan penuaan, karena mereka meminjam terhadap pendapatan masa depan (dalam kasus individu muda) atau menggunakan tabungan (seperti dengan penuaan atau individu pensiunan). Orang paruh baya, di sisi lain, memiliki kecenderungan lebih besar untuk menyimpan dan kecenderungan lebih rendah untuk mengkonsumsi, ditingkatkan dengan penghasilan biasanya lebih tinggi. Hal itu sangat dibutuhkan perencanaan yang sangat mapan demi mencapai hidup yang baik.

Asumsi yang digunakan bahwa ia ingin mencapai jalur konsumsi semulus mungkin sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, ia membagi total $W + RY$ ini secara merata di antara tahun-tahun T dan konsumsi setiap tahun

$$C = (W + RY) / T \quad (4.5)$$

Fungsi konsumsi orang ini dapat ditulis sebagai berikut

$$C = (1 / T) W + (R / T) Y \quad (4.6)$$

Misalnya, jika konsumen mengharapkan untuk hidup selama 50 tahun lebih dan bekerja untuk 30 tahun, maka $T = 50$ dan $R = 30$, sehingga fungsi konsumsinya adalah:

$$C = 0,02W + 0,6 \quad (4.7)$$

Persamaan ini mengatakan bahwa konsumsi tergantung pada pendapatan dan kekayaan. Penghasilan tambahan \$ 1 per tahun meningkatkan konsumsi sebesar \$ 0,60 per tahun, dan kekayaan tambahan \$1 meningkatkan konsumsi sebesar \$ 0,02 per tahun.

Jika setiap individu dalam ekonomi merencanakan konsumsi seperti ini, maka fungsi konsumsi agregat hampir sama dengan individu. Khususnya, konsumsi agregat tergantung pada kekayaan dan pendapatan. Artinya, fungsi konsumsi ekonomi adalah:

$$C = a W + B Y \quad (4.8)$$

di mana parameter a adalah kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi di luar kekayaan, dan parameter B adalah kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi di luar pendapatan.

E. Hipotesis Pendapatan Permanen Milton Friedman

Milton Friedman (1957) menjelaskan perilaku konsumsi dengan menggunakan hipotesis pendapatan permanen. Dalam hipotesisnya, pendapatan masyarakat dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pendapatan permanen adalah pendapatan yang diharapkan orang untuk terus bertahan di masa depan. Pendapatan sementara (pendapatan transitoris) adalah bagian pendapatan yang tidak diharapkan terus bertahan. Nilai pendapatan ini kadang positif dan kadang negatif. Ukuran pendapatan sendiri merupakan penjumlahan dan pendapatan permanen dan pendapatan sementara atau secara matematis ditulis:

$$Y = Y_p + Y_t \quad (4.9)$$

Di mana:

- Y = pendapatan yang terukur,
- Y_p = pendapatan permanen,
- Y_t = pendapatan sementara

Friedman beralasan bahwa konsumsi seharusnya tergantung pada pendapatan permanen karena konsumen menggunakan tabungan dan pinjaman untuk melancarkan konsumsi dalam menanggapi perubahan pendapatan sementara. Jadi fungsi konsumsi menurut Friedman adalah sebagai berikut:

$$C = \alpha Y_p \quad (4.10)$$

Di mana:

- Y_p = pendapatan permanen,
- α = konstanta yang mengukur bagian pendapatan permanen yang dikonsumsi
- C = konsumsi

F. Pilihan Antar Waktu Irving Fisher

Model pilihan antar waktu diperkenalkan oleh Irving Fisher. Fisher menganalisa tentang seberapa rasional para konsumen dalam membuat pilihan antar waktu (melakukan pilihan dalam periode waktu yang berbeda. Apabila semakin banyak yang dia konsumsi saat ini, maka akan semakin sedikit yang bisa dia konsumsi di masa yang akan datang. Model ini melihat halangan-halangan yang dihadapi oleh konsumen dan bagaimana mereka memilih antara konsumsi dan tabungan. Dalam teorinya, Fisher menjabarkannya beberapa hal mengenai konsumsi seseorang. Adapun penjabarannya tersebut: pertama, konsumen harus memilih kombinasi dibawah garis anggaran. Kedua, konsumen akan memilih kombinasi konsumsi yang diinginkan disepanjang kurva indifferen. Ketiga, konsumen akan berusaha mencapai tingkat kurva indifferen yang setinggi-tingginya, yaitu mencapai kondisi optimum. Keempat, konsumen akan menaikkan tingkat konsumsinya jika pendapatannya juga meningkat, Kelima, perubahan suku bunga riil membuat perubahan kombinasi konsumsi. Yang terakhir, meminjam dan menabung akan mempengaruhi konsumsi saat ini maupun yang akan datang.

G. Teori Konsumsi dalam Perspektif Islam

1. Fungsi Konsumsi dalam Islam

Konsumsi memiliki peran besar dalam setiap perekonomian, karena selalu ada kegiatan konsumsi dalam kehidupan manusia. Dalam sistem perekonomian, konsumsi memainkan peranan penting. Adanya konsumsi akan mendorong terjadinya produksi (pembuatan produk) dan distribusi (penyaluran produk). Dengan demikian akan menggerakkan roda-roda perekonomian. Fungsi konsumsi menurut Imam

al-Ghazali yang merupakan seorang ulama dan filsuf besar yang hidup pada tahun 1058M menyatakan fungsi konsumsi antara lain ialah fungsi Kesejahteraan, Maximizer dan Utilitas. Menurut Imam al-Ghazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu:

- 1) Agama (al-dîn)
- 2) Hidup atau jiwa (nafs)
- 3) Keluarga atau keturunan (nasl)
- 4) Harta atau kekayaan (maal)
- 5) Intelekt atau akal (aql).

Imam al-Ghazali menitik beratkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, “kebaikan dunia ini dan akhirat (maslahat al-din wa al-dunya) merupakan tujuan utamanya. Aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang meliputi kebutuhan (*daruriat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajaat*), dan kemewahan (*tahsinaat*).

2. Norma dan Etika Konsumsi dalam Islam

2.1. Seimbang dalam konsumsi

Islam mewajibkan kepada pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartannya untuk kepentingan diri, keluarga, dan fi sabilillah. Islam mengharamkan sikap kikir. Di sisi lain, islam juga mengharamkan sikap boros dan menghamburkan harta.⁸ Inilah bentuk keseimbangan yang diperintahkan dalam Al-Quran yang mencerminkan sikap keadilan dalam konsumsi. Seperti yang diisyaratkan dalam Q.S Al-Isra' [17]: 29:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَّحْسُورًا

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal.”

2.2. Membelanjakan harta pada bentuk yang diharamkan dan dengan cara yang baik

Islam mendorong dan memberi kebebasan kepada individu agar membelanjakan hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebebasan itu diberikan dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas yang suci serta tidak mendatangkan bahaya terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. Islam menutup semua jalan bagi manusia untuk membelanjakan harta yang mengakibatkan kerusakan akhlak di tengah masyarakat, seperti judi yang hanya memperturutkan hawa nafsu, seperti ditegaskan dalam QS Al-Maidah (5):88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

2.3. Larangan Bersikap *Israf* (Royal), dan *Tabzir* (Sia-sia)

Adapun nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam konsep konsumsi adalah pelarangan terhadap sikap hidup mewah. Gaya hidup mewah adalah merusak individu dan masyarakat, karena menyibukan manusia dengan hawa nafsu, melalaikannya dari hal-hal yang mulia dan akhlak yang luhur. Disamping itu, membunuh semangat jihad. Ali Abd ar-Rasul juga menilai dalam masalah ini bahwa gaya hidup mewah (*israf*) merupakan faktor yang memicu ter-

jadinya kemerosotan moral.

Dalam QS. Al-A'araf [7]: 31. Allah telah memperingatkan akan sikap ini:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Sikap hidup mewah bisanya diiringi oleh sikap hidup berlebihan (melampaui batas atau israf). Israf atau royal menurut Afzalur Rahman ada tiga pengertian yaitu, menghambur-hamburkan kekayaan pada hal-hal yang diharamkan seperti mabuk-mabukan, pengeluaran yang berlebih-lebihan pada ha;-hal yang di halalkan tanpa peduli apakah itu sesuai dengan kemampuan atau tidak, dan pengeluaran dengan alasan kedermawanan hanaya sekedar pamer.

3. Prinsip Konsumsi dalam Islam

Menurut Abdul Mannan, dalam melakukan konsumsi terdapat lima prinsip dasar, yaitu:

3.1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini mengandung arti ganda mengenai mencari rizki yang halal dan tidak dilarang hukum. Artinya, sesuatu yang dikonsumsi itu didapatkan secara halal dan tidak bertentangan dengan hukum. Keadilan yang dimaksud adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal (tidak haram) dan baik (tidak membahayakan tubuh). Kelonggaran diberikan bagi orang yang terpaksa, dan bagi orang yang suatu ketika tidak mempunyai makanan untuk dimakan. Ia boleh memakan makanan yang

terlarang itu sekedar yang dianggap perlu untuk kebutuhannya ketika itu saja

3.2. Prinsip Kebersihan

Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia, misalnya: makanan harus baik dan cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera. Sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang diberkahi Allah. Tentu saja benda yang dikonsumsi memiliki manfaat bukan kemubaziran atau bahkan merusak. "Makanan diberkahi jika kita mencuci tangan sebelum dan setelah memakannya" (HR Tarmidzi). Prinsip kebersihan ini bermakna makanan yang dimakan harus baik, tidak kotor dan menjijikkan sehingga merusak selera.

3.3. Prinsip Kesederhanaan

Sikap berlebih-lebihan (*israf*) sangat dibenci oleh Allah dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual maupun sosial

3.4. Prinsip Murah Hati

Sifat konsumsi manusia juga harus dilandasi dengan kemurahan hati. Maksudnya, jika memang masih banyak orang yang kekurangan makanan dan minuman maka hendaklah kita sisihkan makanan yang ada pada kita, kemudian kita berikan kepada mereka yang sangat membutuhkannya.

3.5. Prinsip Moralitas

Konsumsi seorang muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan. Allah memberikan makanan dan minuman untuk keberlangsungan hidup umat manusia agar dapat meningkatkan nilai-nilai moral dan spiritual.

4. Kaidah Konsumsi dalam Islam

4.1. Kaidah Syariah

Yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi

4.2. Kaidah Akidah

Yaitu mengetahui hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan/ beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya. Jika seorang muslim menikmati rizki yang dikaruniakan Allah kepadanya, maka demikian itu bertitik tolak dari akidahnya bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada hamba-hamba-Nya, maka Dia senang bila tanda nikmat-Nya terlihat pada hamba-hamba-Nya.

4.3. Kaidah Ilmiah

Yaitu seorang ketika akan mengkonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, apakah ia halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.

4.4. Kaidah Amaliah

Yaitu merupakan aplikasi dari kedua kaidah yang sebelumnya, maksudnya memperhatikan bentuk barang kon-

sumsi. Sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi islami tersebut, seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang halal atau syubhat.

4.5. Kaidah Kuantitas

Yaitu tidak cukup bila barang yang dikonsumsi halal, tapi dalam sisi kuantitas (jumlah) nya harus juga dalam batas-batas syariah, yang dalam penentuan kuantitas ini memperhatikan beberapa faktor ekonomis antara lain kesesuaian antara pemasukan dan pengeluaran, kesederhanaan, kesesuaian kebutuhan.

H. Ikhtisar

1. Konsumsi merupakan bagian yang mengambil peran besar dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Teori Ekonomi Makro menyatakan bahwa perilaku masyarakat membelanjakan Sebagian pendapatannya untuk membeli sesuatu disebut pengeluaran konsumsi (*consumption expenditure*).
2. Di setiap tingkat pendapatan akan selalu ada alokasi konsumsi di dalamnya, sehingga ada konsep terkait pendapatan dan konsumsi yang dikenal dengan istilah *Average Propensity to Consume* (APC) yaitu besarnya konsumsi yang terjadi dibandingkan dengan tingkat pendapatan di mana $APC=C/Y$.
3. Teori konsumsi Keynes menjelaskan adanya hubungan antara pendapatan yang diterima saat ini (pendapatan disposable) dengan konsumsi yang dilakukan saat ini juga
4. Model pilihan antar waktu diperkenalkan oleh Irving Fisher. Fisher menganalisa tentang seberapa rasional para konsumen dalam membuat pilihan antar waktu (mela-

kukan pilihan dalam periode waktu yang berbeda. Apabila semakin banyak yang dia konsumsi saat ini, maka akan semakin sedikit yang bisa dia konsumsi di masa yang akan datang.

5. Milton Friedman (1957) menjelaskan perilaku konsumsi dengan menggunakan hipotesis pendapatan permanen. Dalam hipotesisnya, pendapatan masyarakat dapat dibedakan menjadi dua yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Pendapatan permanen adalah pendapatan yang diharapkan orang untuk terus bertahan di masa depan
6. Hipotesis siklus hidup atau *The Life-Cycle Hipotesis* oleh Modigliani adalah sebuah teori ekonomi yang berkaitan dengan pengeluaran dan kebiasaan menabung masyarakat selama seumur hidup.
7. Kaidah Konsumsi dalam Islam meliputi Kaidah Syariah, Kaidah Akidah, Kaidah Ilmiah, Kaidah Amaliah, Kaidah Kuantitas

I. Pertanyaan dan Diskusi

1. Jelaskan maksud dari al- Quran QS al-Maidah ayat 5 terkait dengan konsumsi!
2. Hitunglah nilai MPC dan APC pada tabel di bawah ini:

Yd	C	MPC	APC
10	8		-----
30	20	-----	-----
50	30	-----	-----

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis siklus hidup Modigliani dan bagaimana implementasinya dalam perekonomian saat ini?

BAB V

TEORI INVESTASI

A. Rencana Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep investasi termasuk di dalamnya pelaku investasi, faktor yang mempengaruhi investasi dan hubungan investasi dan pendapatan.

B. Konsep Dasar Teori Investasi

Investasi adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian. Investasi juga biasa disebut dengan penanaman modal. Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal (aset berharga) untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pihak atau orang yang melakukan investasi disebut dengan investor. Investasi merupakan salah satu indikator dalam pendapatan nasional. Guncangan dalam investasi menunjukkan besarnya perubahan pendapatan nasional yang disebabkan oleh investasi.

Investasi merupakan pembelian modal atau barang-barang yang tidak dikonsumsi akan tetapi digunakan untuk menghasilkan barang produksi di masa datang. Investasi sangat berkaitan dengan pendapatan dan tingkat bunga sesuai

dengan persamaan $I=f(Y,i)$. Suatu penambahan pada tingkat pendapatan akan mendorong laju investasi yang lebih besar, sedangkan tingkat bunga yang tinggi justru akan menurunkan minat investor dalam berinvestasi. Terdapat beberapa bentuk investasi menurut Prasetyo (2012) antara lain:

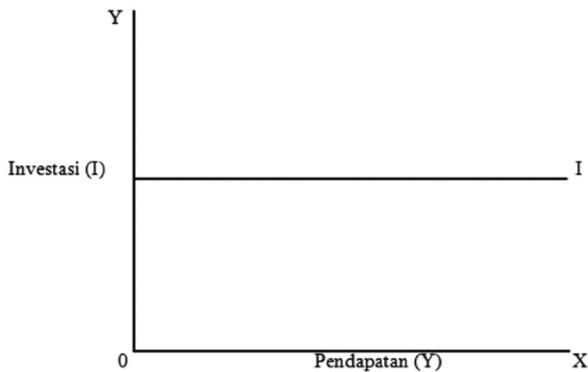
1. Investasi tanah, dengan penambahan populasi penduduk maka kebutuhan akan tanah untuk dibangun rumah akan tinggi sehingga investasi tanah menjadi menguntungkan di masa depan
2. Investasi Pendidikan merupakan bentuk investasi pengetahuan. Dengan peningkatan Pendidikan diharapkan dapat memiliki masa depan yang lebih baik dan mendapatkan pekerjaan baik.
3. Investasi perumahan berupa pengeluaran yang digunakan untuk berinvestasi dalam bentuk perumahan.
4. Investasi saham berupa obligasi, reksadana, saham dengan harapan memperoleh pengembalian yang akan datang lebih tinggi dari nilai investasi awal dan memiliki resiko yang besar.

C. Pelaksana Investasi

1. Investasi Pemerintah (*Public Investment*)

Investasi pemerintah umumnya bersifat non-profit atau tidak mencari keuntungan, tetapi tujuan utamanya ialah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, bendungan dan lain-lain. Investasi-investasi itu sering disebut *Social Overhead Capital (SOC)*. Keuntungan bagi investasi-investasi ini baru terasa bilamana ada pertambahan permintaan dalam masyarakat. Bertambahnya permintaan efektif, juga menaikkan pendapatan. Investasi pemerintah ini sering juga disebut sebagai investasi yang otonom, yaitu investasi yang

timbul bukan karenanya adanya tambahan pendapatan. Investasi ini tidak menarik bagi swasta, karena investasi ini memerlukan biaya yang sangat besar, dan investasi ini tidak memberikan keuntungan secara langsung, melainkan secara berangsur-angsur dalam beberapa tahun.

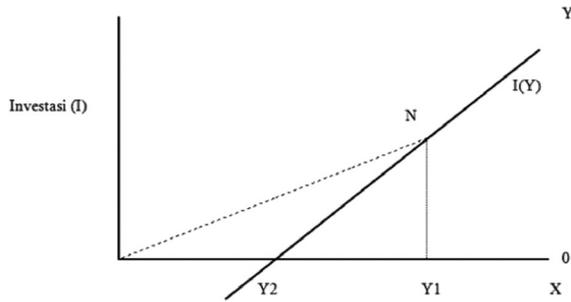


Gambar 5.1. Kurva Investasi Pemerintah

Berdasarkan Gambar 6.1., besar kecilnya investasi tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan tetapi dapat berubah karena adanya perubahan-perubahan faktor-faktor di luar pendapatan. Meskipun investasi ini tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan tetapi akibat dari tingkat pendapatan dalam masyarakat.

2. Investasi Swasta (*Private Investment*)

Investasi Swasta adalah jenis investasi yang dilakukan swasta dan ditunjukkan untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan. Apabila pendapatan bertambah konsumsi bertambah dan bertambah pula permintaan efektifnya. Investasi swasta ini juga disebut *induced investment* yang merupakan suatu investasi yang ditimbulkan oleh sebab bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan. Adapun bentuk kurva investasi swasta terlihat Gambar berikut ini:



Gambar 5.2. Kurva Investasi Swasta

Berdasarkan Gambar di atas investasi diletakkan pada sumbu tegak, sedang sumbu datar untuk menyatakan pendapatan. Fungsi investasi adalah $I(Y)$, dimana fungsi ini menyatakan tingginya tingkat investasi terimbas pada berbagai tingkat pendapatan. Fungsi investasi ini naik dari kiri ke bawah ke kanan atas, dan mulai dari suatu tingkat pendapatan tertentu. Fungsi investasi $I(Y)$, memotong sumbu Y dari bawah, hal ini dimaksudkan untuk menyatakan bahwa terdapat investasi negatif. Pada suatu tingkat pendapatan yang rendah. Rendahnya tingkat pendapatan nasional (kurang atau sama dengan OY_2) justru akan membawa masalah di masa depan.

3. Investasi Domestik dan Luar Negeri (*Domestic investment dan foreign investment*)

Jenis investasi yang dilakukan oleh publik dan swasta adalah investasi luar negeri (*foreign investment*). Foreign Investment terjadi dari selisih antara ekspor di atas impor. Investasi swasta dalam hal ini adalah disebabkan oleh perkembangan ekonomi di luar negeri. Jadi sifat investasi swasta adalah suatu investasi karena adanya pertambahan pendapatan. Investasi dalam jenis ini sangat memungkinkan dikembangkan dalam era globalisasi ekonomi di mana batas-batas wilayah ekonomi suatu

negara menjadi tidak jelas. Nilai investasi akan semakin besar bila tiap-tiap negara dapat memberikan stimulus agar investasi asing masuk.

4. Investasi Bruto dan Investasi Netto (*Gross Investment and Net Investment*)

Gross investment (investasi bruto) adalah total seluruh investasi yang diadakan atau yang dilaksanakan pada suatu ketika. Dengan demikian, investasi bruto dapat bernilai positif maupun nol (yakni ada tidaknya investasi sama sekali), tetapi tidak akan bernilai negatif. *Net investment* (investasi neto) adalah selisih antara investasi bruto dengan penyusutan. Apabila misalnya investasi bruto tahun ini adalah Rp. 25 juta, sedangkan penyusutan yang terjadi selama tahun yang lalu adalah sebesar Rp. 10 juta, itu berarti investasi neto tahun ini adalah sebesar Rp. 15 juta

D. Faktor yang mempengaruhi tingkat investasi

1. Tingkat Pengembalian yang Diharapkan (*Expected Rate of Return*)

a. Kondisi Internal

Kondisi internal adalah faktor-faktor yang berada di bawah kontrol Perusahaan, seperti tingkat efisiensi, kualitas SDM dan teknologi. Sedangkan faktor non-teknis, seperti kepemilikan hak dan atau kekuatan monopoli, kedekatan dengan pusat kekuasaan, dan penguasaan jalur informasi.

b. Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi utama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestic maupun internasional

2. Biaya Investasi

Hal yang paling menentukan adalah tingkat bunga pinjaman. Makin tinggi tingkat bunganya maka biaya investasi makin mahal. Akibatnya minat akan investasi makin menurun. Namun tidak jarang, walaupun tingkat bunga pinjaman rendah, minat akan investasi tetap rendah. Hal ini disebabkan biaya total investasi masih tinggi dan faktor yang mempengaruhi adalah masalah kelembagaan

3. *Marginal Efficiency of Capital (MEC)*, Tingkat Bunga, dan *Marginal Efficiency of Investment (MEI)*

Hubungan antara tingkat bunga dan investasi bersifat negatif, hal ini mengandung arti bahwa semakin tinggi tingkat bunga semakin rendah tingkat investasi. *Marginal Efficiency of Capital (MEC)*, MEC adalah besarnya keuntungan yang akan diperoleh dengan menanamkan modal, sedangkan *Marginal Efficiency of Investment (MEI)* adalah tingkat pengembalian investasi yang diharapkan dari setiap tambahan barang modal. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin menurun tingkat investasi.

E. Hubungan Investasi dan Pendapatan Nasional

Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun. Pendapatan nasional atau PDB sangat erat kaitannya dengan investasi. Investasi berupa penanaman modal yang meningkat akan berdampak positif pada proses produksi dalam bisnis yang semakin giat, kemudian juga akan berimbas pada meningkatnya konsumsi rumah tangga. Investasi ini memiliki korelasi positif terhadap pembangunan infrastruktur negara. PDB yang naik akan mendukung upaya

pembangunan dari pemerintah, sementara pemerintah pun akan lebih giat membangun infrastruktur guna menyokong dan menarik investor.

Investasi juga akan menumbuhkan iklim bisnis. Semakin banyak investasi atau penanaman modal yang dilakukan, maka akan semakin banyak pula bisnis-bisnis baru yang bermunculan. Seperti UMKM, alat kesehatan, dan perumahan yang menjadi beberapa sektor bisnis yang tumbuh. Banyaknya bisnis yang bermunculan akan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, yang mana secara jelas akan mendukung pertumbuhan daya beli konsumen serta konsumsi rumah tangga.

F. Investasi Tetap Bisnis (*business fixed investment*)

Investasi tetap bisnis mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi. Tingkat bunga lebih tinggi meningkatkan biaya modal dan mengurangi investasi tetap bisnis. Perbaikan teknologi dan kebijakan pajak, seperti pajak pendapatan perusahaan dan kredit pajak investasi, menggeser fungsi investasi-tetap bisnis. Selama booming, kesempatan kerja lebih tinggi akan meningkatkan investasi tetap bisnis.

G. Investasi Residensial (*residential investment*)

Investasi residensial mencakup rumah baru untuk tempat tinggal dan disewakan. Investasi residensial mencakup pembelian rumah baru baik oleh orang yang akan meninggalkannya dan tuan tanah yang akan menyewakannya pada orang lain. Harga relatif rumah disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan atas stok rumah yang ada. Harga relatif lalu menentukan investasi residensial, aliran perumahan baru yang perusahaan konstruksi bangun.

Ketika permintaan rumah bergeser, harga ekuilibrium rumah berubah, dan perubahan ini lalu mempengaruhi investasi residensial. Kenaikan permintaan rumah, mungkin karena turunnya tingkat bunga, meningkatkan harga rumah dan investasi residensial. Kenaikan tingkat bunga meningkatkan biaya peminjaman bagi pembeli rumah dan mengurangi investasi perumahan residensial. Kenaikan populasi dan kebijakan pajak menggeser fungsi investasi-perumahan residensial. Dalam booming, pendapatan lebih tinggi meningkatkan permintaan akan rumah dan meningkatkan investasi residensial.

H. Investasi Persediaan (*inventory investment*)

Investasi persediaan mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan persediaan, barang dalam proses produksi, dan barang jadi. Ketika sales tinggi, perusahaan memproduksi kurang sehingga ia menjual dan mengambil barang dari persediaan. Ini disebut pemerataan produksi (*production smoothing*). Menyimpan persediaan memungkinkan perusahaan beroperasi lebih efisien. Jadi, kita dapat memandang persediaan sebagai faktor produksi (*inventories as a factor of production*). Perusahaan tak ingin kekurangan barang ketika penjualan tiba-tiba melonjak. Ini disebut pencegahan kehabisan barang (*stock-out avoidance*). Jika barang baru selesai sebagian, komponen masih dihitung dalam persediaan, dan disebut, barang dalam proses (*work in process*).

I. Ikhtisar

1. Investasi adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian. Investasi juga biasa disebut dengan penanaman modal.

2. Investasi adalah aktivitas penanaman uang atau modal (aset berharga) untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pihak atau orang yang melakukan investasi disebut dengan investor.
3. Investasi merupakan salah satu indikator dalam pendapatan nasional. Guncangan dalam investasi menunjukkan besarnya perubahan pendapatan nasional yang disebabkan oleh investasi
4. Faktor yang mempengaruhi tingkat investasi adalah Tingkat Pengembalian yang Diharapkan (*Expected Rate of Return*), *biaya investasi*, *Marginal Efficiency of Capital (MEC)*, Tingkat Bunga, dan *Marginal Efficiency of Investment (MEI)*
5. Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi turun maka PDB akan ikut turun
6. Investasi tetap bisnis mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi Tingkat bunga lebih tinggi meningkatkan biaya modal dan mengurangi investasi tetap bisnis.
7. Investasi residensial mencakup rumah baru untuk tempat tinggal dan disewakan. Investasi residensial mencakup pembelian rumah baru baik oleh orang yang akan meninggalkannya dan tuan tanah yang akan menyewakannya pada orang lain
8. Investasi persediaan mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan persediaan, barang dalam proses produksi, dan barang jadi. Ketika sales tinggi, perusahaan memproduksi kurang sehingga ia menjual dan mengambil barang dari persediaan.

J. Pertanyaan dan Diskusi

1. Mengapa investasi naik selama booming ekonomi dan turun selama resesi ekonomi?
2. Jelaskan mengapa kenaikan dalam tingkat bunga menurunkan jumlah investasi residensial?
3. Jelaskan alasan mengapa perusahaan menyimpan persediaan?

BAB VI

PERMINTAAN UANG DAN JUMLAH UANG BEREDAR

A. Rencana Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa diharapkan mampu memahami aspek terkait uang termasuk di dalamnya fungsi uang, jumlah uang beredar, teori permintaan uang, Permintaan dan Penawaran Uang dalam Mazhab Ekonomi Islam.

B. Fungsi Uang

1. Fungsi Asli Uang

a. Alat Tukar (*Medium of Exchange*)

Media pertukaran merupakan hal yang mendasar dalam perekonomian modern. Uang digunakan sebagai media pertukaran karena dalam kehidupan perekonomian modern, peranan barang jasa yang dapat digunakan sebagai media tukar sangat kecil karena sulitnya mendapatkan ketepatan pemilik barang tertentu untuk dapat bertemu dengan pemilik barang lain yang kebutuhannya sama atau sesuai. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter tersebut dapat diatasi dengan adanya pertukaran uang.

b. Satuan Hitung (*Unit of Account*)

uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa (alat penunjuk harga). Uang juga berperan untuk memperlancar pertukaran sebagai satuan hitung. Contoh uang berfungsi sebagai satuan hitung ialah apabila ada seorang pedagang menjual bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dll. Dari berbagai jenis barang tersebut berapa nilai dagangannya? Barang tersebut akan dapat dengan mudah dihitung apabila diukur dengan uang. Bila pedagang ingin memperoleh keuntungan 10% dari masing-masing dari dagangan tersebut juga akan dipermudah dengan menggunakan uang sebagai satuan hitung dengan menaikkan harga sebesar 10% dari harga pokok barang.

c. Penyimpan Nilai (*store of value*)

Penyimpan nilai suatu asset berarti menjaga asset nilai tersebut. Seseorang yang menjaga nilai suatu asset berarti orang tersebut dapat menggunakannya untuk melakukan pembelian di masa depan. Orang yang bekerja bertahun-tahun akan dapat memiliki kekayaan. Kekayaan ini merupakan asset yang diperoleh dengan menggunakan atau menyisihkan gajinya berupa uang. Ketika seorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa mendatang.

2. Fungsi Turunan Uang

a. Alat Pembayaran

Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang.

b. Penimbun Kekayaan

sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan pada masa datang. Uang adalah bagian kekayaan seseorang atau perusahaan dalam menunjukkan seberapa besar finansial yang dimiliki. Ini berarti menyimpan uang sama artinya dengan menyimpan kekayaan.

c. Penunjang Kegiatan Perekonomian

Uang merupakan benda yang sangat berpengaruh dalam masyarakat dan dianggap sangat mendukung aktivitas ekonomi dan sosial. Hal tersebut dikarenakan setiap orang akan termotivasi untuk memperoleh uang sehingga mereka ingin bekerja ataupun melakukan kegiatan ekonomi. Motivasi ini didapatkan juga karena uang merupakan sebuah kebutuhan dalam kehidupan. Apabila nilai uang stabil orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat.

d. Alat Pemindah Kekayaan

Uang sebagai pemindah kekayaan maksudnya ialah seseorang yang memiliki suatu kekayaan dapat dipindahkan ke dalam bentuk kekayaan lain dengan

perantara uang. Seseorang yang mempunyai kekayaan dengan bentuk lain selain dari banyak uang, ia dapat memindahkan kekayaannya. Contohnya adalah ketika seseorang yang tinggal di kota namun sebenarnya memiliki tanah di desa. Tanah tersebut bisa dijual yang kemudian uangnya dapat digunakan untuk membeli tanah di kota

e. **Alat Pembayaran Utang**

Uang berfungsi untuk melakukan dan menentukan pembayaran kewajiban atau digunakan untuk standar pembayaran hutang, hal tersebut karena uang dapat digunakan untuk mengukur/dijadikan standar pembayaran hutang pada masa yang akan datang. Uang yang digunakan oleh manusia sebagai alat pembayaran akan berubah fungsi jika uang itu dipinjam oleh seorang maka diwajibkan bagi orang yang meminjam uang untuk mengembalikan karena secara tidak langsung uang sudah berubah fungsi sebagai alat pembayar utang.

C. Jenis Uang Beredar dalam Perekonomian

Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli. Menurut UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia memiliki hak tunggal untuk mengeluarkan uang kartal. Hak tunggal mengeluarkan uang kartal disebut hak oktroi. Sebagian besar kegiatan transaksi dalam perekonomian di suatu negara, khususnya di Indonesia menggunakan jenis uang kartal ini sebagai alat tukar yang sah.

Selain jenis uang kartas, terdapat jenis uang beredar lain dalam perekonomian antara lain uang giral dan uang kuasi.

Uang giral merupakan alat pembayaran berupa surat berharga yang dapat sewaktu-waktu digunakan untuk transaksi jual beli. Giral merupakan mata uang yang sah secara ekonomi namun tidak secara hukum, jadi masyarakat boleh menolak pembayaran yang menggunakan uang giral. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, maupun *telegraphic transfer*.

Uang kuasi (*quasy money*) adalah jenis uang yang bersifat relatif kurang likuid dan penggunaannya sangat terikat oleh waktu. Jenis uang kuasi antara lain

- 1) Surat-surat berharga seperti sertifikat rumah atau jenis sertifikat yang bernilai harga lainnya,
- 2) Saham: Surat bukti kepemilikan atau modal suatu perseroan yang dapat diperjualbelikan,
- 3) Obligasi: dokumen bermaterai yang menyatakan pelunasan hutang sesuai dengan waktu yang ditentukan,
- 4) Tabungan,
- 5) Deposito atau Deposito Berjangka,
- 6) Rekening Giro,
- 7) Valuta Asing.

Menurut Mankiw (2007), jenis ukuran jumlah uang beredar dalam perekonomian dapat dikelompokkan menjadi jenis uang kartal, M1. Dan M2. Akan tetapi, ukuran paling umum yang digunakan untuk mempelajari jenis uang beredar ialah jenis uang M1 dan M2. Bank Indonesia sebagai bank sentral juga menggunakan jenis uang ini sebagai ukuran jumlah uang beredar yang ada dalam perekonomian.

Tabel 6.1
Jenis dan Ukuran Uang Beredar

<u>Simbol</u>	<u>Cakupan Asset</u> <i>(Federal Reserve)</i>	<u>Cakupan Asset</u> <i>(Bank Indonesia)</i>
C atau M_0	Mata uang (currency) atau uang kartal = uang kertas & uang logam	Mata uang (currency) atau uang kartal = uang kertas & uang logam
M_1	Uang kartal + cek, traveler's check	M_0 + demand deposit (tabungan dan deposito yang likuid)
\underline{M}_2	M_1 + reksadana pasar uang ritel, deposito tabungan, deposito berjangka kecil	M_1 + time deposit (tabungan, deposito yang tidak mudah dicairkan / tidak likuid)
M_3	M_2 + deposito berjangka besar, kesepakatan pembelian, neraca reksadana pasar uang institusi	M_2 + deposito jangka Panjang (dana-dana institusional yang ada di pasar)

Sumber: Prasetyo, 2009

D. Teori Permintaan Uang

1. Teori kuantitas sederhana David Ricardo

Teori Kuantitas sederhana oleh Richardo diawali dengan hubungan lurus antara jumlah uang dengan harga suatu barang. Ricardo menyimpulkan bahwa hubungan antara jumlah uang dengan nilai uang memiliki hubungan yang terbalik. Apabila pendapat dari Ricardo dihubungkan dengan harga, hal tersebut dapat dinyatakan bahwa ketika jumlah dari uang naik dua kali lipat, maka harga juga akan naik dua kali lipat dan sebaliknya, dengan persamaan sebagai berikut:

$$M = k.p \quad (6.1)$$

$$P = 1/k.M \quad (6.2)$$

Di mana:

M = Jumlah uang beredar

P = Tingkat harga

K = Merupakan factor proporsional yang konstan

Teori ini menyatakan bahwa jumlah uang dan tingkat harga memiliki hubungan yang proposional, yaitu dengan rumus sebagai berikut: $P = f(M)$ Apabila M yang merupakan jumlah uang beredar mengalami kenaikan, maka harga juga akan mengalami kenaikan yang sama. Dari hal tersebut untuk menjaga kesetabilan dari harga diperlukan kebijakan untuk menjaga stabilisasi dari jumlah uang yang beredar. Teori kuantitas ini merupakan teori yang sederhana, karena pada teori ini tidak memperhatikan atau memperhitungkan faktor apa saja yang mempengaruhi cepatnya peredaran uang atau *velocity* (disingkat sebagai V). Teori ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat (Ambarani, 2015).

2. Transaction equation Irving Fisher

Melalui bukunya *The Purchasing power of money* terbit pada tahun 1911, Irving Fisher memperkenalkan pendekatan secara velositas. Pendekatan ini menjelaskan bahwa jumlah uang yang dibelanjakan sama dengan jumlah uang yang diterima. Dalam teori ini, fungsi uang hanyalah sebagai alat tukar. Fisher mengemukakan bahwa permintaan uang merupakan kepentingan yang sangat likuid untuk memenuhi motif transaksi. Dengan sederhana persamaan transaksi permintaan uang Fisher adalah:

$$MV = PT \quad (6.3)$$

Di mana:

P = nilai dari barang yang dijual dikalikan dengan harga rata-rata dari barang

M = volume uang yang ada dalam masyarakat

V = perputaran uang

T = Volume transaksi

Menurut Fisher dan kaum klasik diasumsikan selalu dalam keadaan full employment. Velocity ditentukan oleh faktor-faktor kelembagaan, mencakup faktor-faktor, misalnya tingkat permintaan uang akan sama dengan pendapatan nasional. Maka secara matematis dapat ditulis:

$$Md = kPY \quad (6.4)$$

Di mana :

k = proporsi/bagian dari GNP yang diwujudkan dalam bentuk uang kas, jadi besarnya sama dengan I/VV ,

Y = tingkat pendapatan nasional riil

P = harga umum.

3. *Cambridge Equation of Exchange (Cambridge) Marshall*

Teori ini dikemukakan oleh A. Marshall dari Universitas Cambridge, dia memandang persamaan Fisher dengan sudut pandang yang berbeda. Marshall tidak menekankan pada perputaran uang (velocity) dalam suatu periode, melainkan pada bagian dari pendapatan (GNP) yang diwujudkan dalam bentuk uang kas (Nopirin, 2000). Secara matematis, teori ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$M = kPy \quad (6.5)$$

Di mana :

k = proporsi dari GNP yang diwujudkan dalam bentuk uang kas, jadi besarnya sama dengan $1/v$.

Y = untuk menunjukkan GNP riil.

Jadi, T umumnya lebih besar daripada Y , sebab dalam pengertian T termasuk juga total transaksi barang akhir dan atau setengah jadi dihasilkan beberapa tahun yang lampau. Sedang dalam GNP hanyalah mencakup barang dan jasa akhir yang dihasilkan pada tahun tertentu saja, di dalamnya juga tidak termasuk barang setengah jadi. Esensi dari persamaan Irving Fisher tidaklah berbeda dengan persamaan Marshall ditinjau dari segi matematis, sehingga masih juga merupakan suatu identitas. Namun demikian, orientasinya berbeda. Persamaan Marshall dapat dikatakan merupakan persamaan yang menunjukkan adanya permintaan akan uang, dimana masyarakat menghendaki sebagian tertentu dari pendapatannya dalam bentuk uang kas (ditunjukkan dengan k). Dengan demikian, persamaan Marshall tidak lagi merupakan persamaan pertukaran atau identitas (seperti pada persamaan Irving Fisher), tetapi telah merupakan persamaan teori kuantitas uang (dalam arti telah terkandung di dalamnya pengertian permintaan akan uang, yang kemudian sering disebut dengan persamaan *cash-balance*).

4. John Maynard Keynes

Teori uang yang dikemukakan oleh Keynes merupakan teori yang dapat dikatakan bersumber dari teori yang dikemukakan oleh Cambridge, tetapi pada teori Keynes mengemukakan sesuatu perbedaan dengan teori moneter tradisi klasik. Perbedaan ini pada penekanan fungsi uang yang lain, yaitu sebagai penyimpan nilai (*strong of value*)

dan bukan hanya sebagai alat tukar (*means of exchange*). Kemudian teori ini dikenal sebagai teori liquidity preference, dalam teori ini J.M. Keynes membedakan 3 motif alasan orang memegang uang. Berdasarkan "*psychological law of consumers behavior*", tiga alasan orang untuk memegang uang dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

a. Motif transaksi

Individu atau perusahaan memerlukan uang kas untuk transaksi karena mereka berpikir bahwa pengeluaran ini sering terjadi lebih dahulu dari uang masuk (dari pendapatannya). Pengeluaran ini seringkali tidak bisa diperkirakan terlebih dahulu, sehingga sangat diperlukan adanya uang kas di tangan. Meskipun seandainya pengeluaran dan penerimaan bisa diperkirakan namun uang kas di tangan tetap diperlukan. Sebab, penerimaan yang diharapkan mungkin tidak diterima atau pengeluaran untuk transaksi yang sangat penting perlu dilakukan sebelum penerimaan datang. Keynes menyatakan bahwa permintaan uang kas untuk tujuan transaksi ini tergantung dari pendapatan. Makin tinggi tingkat pendapatan makin besar keinginan uang kas untuk transaksi. Seseorang atau masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi, biasanya melakukan transaksi yang lebih banyak dibandingkan dengan seseorang atau masyarakat yang pendapatannya rendah.

b. Motif berjaga-jaga

Setiap orang menghadapi ketidakpastian mengenai apa yang akan terjadi di masa datang. Ketidakpastian ini menyebabkan orang memegang uang tunai lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk transaksi. Menurut Keynes, antisipasi terhadap pengeluaran yang direncanakan dan yang tidak direncanakan menye-

babkan seseorang akan memegang uang tunai lebih besar dari yang dibutuhkan untuk tujuan transaksi, yaitu untuk tujuan berjaga-jaga. Menurutnya jumlah uang yang dipegang untuk tujuan berjaga-jaga ini tergantung dari besarnya pendapatan, semakin tinggi pendapatan semakin tinggi pula uang yang dipegang untuk tujuan berjaga-jaga. Oleh karena permintaan uang dengan tujuan transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh faktor yang sama, maka biasanya kedua variabel ini sering dijadikan satu menjadi permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga.

c. Motif spekulasi

Keynes juga menyadari bahwa masyarakat menghendaki jumlah uang kas yang melebihi untuk keperluan transaksi, karena keinginan untuk menyimpan kekayaannya dalam bentuk yang paling lancar (uang kas). Uang kas yang disimpan ini memenuhi fungsi uang sebagai alat penimbun kekayaan (*store of value*). Istilah yang lebih modern disebut dengan permintaan uang untuk penimbun kekayaan.

Permintaan uang untuk tujuan spekulasi ini, menurut Keynes ditentukan oleh tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga makin rendah keinginan masyarakat akan uang kas untuk motif spekulasi. Alasannya, pertama apabila tingkat bunga naik, berarti ongkos memegang uang kas makin besar, sehingga keinginan masyarakat akan uang kas semakin kecil. Kedua, hipotesa Keynes bahwa masyarakat menganggap akan adanya tingkat bunga normal berdasar pengalaman, terutama pengalaman tingkat bunga yang baru-baru terjadi.

E. Bank dan Perekonomian

Bank merupakan Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara kreditur dan debitur yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan meyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, definisi kata kreditur adalah individu atau organisasi yang memiliki hak piutang terhadap kliennya dan memiliki kesempatan untuk menagih hak tersebut di pengadilan. Piutang itu dapat disebabkan oleh perjanjian maupun amanat undang-undang, dengan kata lain kreditur ialah pihak yang meminjamkan uangnya sedangkan debitur ialah pihak yang menerima kredit atau pinjaman. Debitur memiliki kewajiban membayar lunas utangnya. Selain itu, debitur mempunyai kewajiban berupa memberikan jaminan kepada kreditur.

1. Jenis-jenis bank

a. Bank Sentral

Sebuah instansi maupun sebuah lembaga keuangan yang bertanggung jawab suatu kebijakan moneter serta menciptakan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil pada suatu negara. Di Indonesia yang berperan sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

b. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Secara umum,

ada dua tugas bank, yakni menghimpun dana dari masyarakat atau disebut dengan *lending*, dan menyalurkan dana ke masyarakat atau disebut juga dengan *lending*. Selain itu, bank juga melakukan aktivitas pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat seperti jasa pengiriman uang, jasa pembayaran (*bill payment*), jasa penampungan pembayaran tagihan (*collection*), jasa penitipan abrang berharga (*safe deposit box*), dan semacamnya. Jasa-jasa tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan transaksi keuangan. Di sisi lain, seluruh aktivitas bank itu memberikan pendapatan bagi kelangsungan usaha bank tersebut.

2. Tujuan dan Tugas Bank Sentral

a. Bank Sentral

Tujuan bank sentral adalah mencapai dan memelihara nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah meliputi kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa dan kestabilan terhadap mata uang negara lain. Tugas bank sentral adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan melaksanakan sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia.

b. Bank Umum

Bank ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, sehingga perannya dalam kehidupan masyarakat adalah penting. Fungsi dan tugas bank umum di antaranya adalah:

- 1) Mengatur peredaran uang dengan kewenangan penciptaan uang giral,
- 2) Menyediakan jasa penyimpanan dana dan barang berharga masyarakat,

- 3) Menjadi fasilitas untuk kelancaran pembayaran
- 4) Membantu dalam transaksi internasional,
- 5) Jasa-jasa lainnya

3. Kedudukan dan Fungsi Bank

a. Bank Sentral

Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia memiliki kedudukan sebagai Lembaga negara independent dan dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia memiliki hubungan kerja dan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah, dan pihak lain.

1) Bank Indonesia dan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Bank Indonesia (BI) setiap awal Tahun Anggaran menyampaikan informasi tertulis kepada Presiden dan DPR mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter mendatang.

2) Bank Indonesia dengan Pemerintah

Hubungan bank Indonesia dan Pemerintah merupakan bentuk hubungan independensi dalam interdependensi. Maksud dari hal tersebut ialah meskipun Bank Indonesia merupakan Lembaga negara yang independen, tetap memerlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan pemerintah sebab tugas-tugas Bank Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan. Bentuk koordinasi antara BI dan Pemerintah antara lain pada sidang cabinet yang membahas ekonomi. BI dapat memberikan pendapat dan masukan

kepada pemerintah terkait Rancangan APBN dan kebijakan lain yang relevan. Di sisi lain, BI juga dapat menghadiri Rapat Dewan Gubernur dengan hak bicara tetapi tanpa hak suara. Bank Indonesia (BI) bertindak menatausahakan rekening Pemerintah di Bank Indonesia. Atas permintaan Pemerintah, BI dapat menerima pinjaman luar negeri atas nama pemerintah.

b. Bank Umum

Dalam operasionalnya, bank umum memiliki beberapa kegiatan usaha. Terdapat beberapa kegiatan umum yang juga dijalankan oleh bank lain, serta kegiatan khusus dimana dilakukan hanya oleh bank umum saja. Berikut kegiatan bank umum adalah:

1) Menghimpun dana dari nasabah

Fungsi utama yang dijalankan sebagai kegiatan bank umum adalah menghimpun dana nasabah. Bank umum menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yaitu giro, tabungan, sertifikat deposito, deposito berjangka, serta bentuk-bentuk lainnya.

2) Tempat penyimpanan dana dan barang berharga

Salah satu tugas bank umum adalah sebagai tempat menyimpan dana serta barang berharga milik nasabah. Bank umum adalah penyedia layanan tempat aman untuk menjaga aset-aset berharga masyarakat berbentuk dana dan barang lainnya seperti surat penting.

3) Memberikan layanan kredit

Kegiatan bank umum berikutnya yang juga merupakan produk bank umum adalah layanan kredit. Bank umum memberikan kredit untuk nasabah, dengan syarat dan ketentuannya tersendiri.

4) Memindahkan dana nasabah

Dalam mengelola dana yang dimiliki, bank umum melakukan kegiatan pemindahan dana. Hal ini dilakukan baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan dari bank itu sendiri.

F. Tingkat Bunga dan Perekonomian

Tingkat bunga adalah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa depan. Apabila seseorang memegang uang lalu hanya disimpan saja tanpa dimanfaatkan maka ia tidak akan memperoleh bunga. Apabila seseorang menabungkan uang di bank maka ia akan memperoleh bunga yang biasa disebut tingkat bunga nominal (*nominal interest rate*). Akan tetapi bila ia lebih memilih memegang uang maka ia tidak memperoleh bunga akan tetapi mendapatkan biaya memegang uang, yang biasa disebut sebagai *opportunity cost*. Biaya yang timbul akibat hilangnya kesempatan dari pemenuhan suatu kebutuhan lain atau biasa disebut biaya peluang. *Opportunity cost* timbul karena seseorang lebih memilih memegang uangnya dibandingkan menabungkannya di bank.

Salah satu variabel penting dalam ekonomi makro ialah tingkat bunga. Anggap seseorang menabungkan uangnya di bank. Bank memberikan tingkat suku bunga kepada nasabah sebesar 6% p.a. Kemudian, 1 tahun berikutnya anda menarik uang tersebut di bank. Apakah 6% tingkat bunga yang anda peroleh lebih banyak dari uang anda semula? Hal tersebut bisa iya atau tidak. Seseorang pasti memiliki 6% uang lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu. Akan tetapi apabila ada peningkatan harga karena inflasi sebesar 5%, maka daya beli orang tersebut nyatanya hanya 1% saja, apabila inflasi sebesar 9%, maka daya beli orang tersebut akan turun sebanyak 3%. Tingkat bunga yang dibayar bank kepada nasabah disebut

tingkat bunga nominal (*nominal interest rate*), sedangkan kenaikan daya beli seseorang disebut tingkat bunga riil (*real interest rate*). Tingkat suku bunga riil adalah konsep yang mengukur tingkat suku bunga dengan mengukur tingkat pengembalian yang telah dikurangi inflasi yang menunjukkan kenaikan daya beli masyarakat yang didalamnya sudah memperhitungkan inflasi yang dapat dinotasikan dalam persamaan sebagai berikut:

$$r = i - \pi \quad . \quad (6.6)$$

$$i = r + \pi \quad .. \quad (6.7)$$

di mana :

i = interest, tingkat bunga nominal

r = real, tingkat bunga riil

π = inflasi

Persamaan di atas disebut sebagai Persamaan Fisher yang dimaknai dengan penambahan tingkat bunga riil dengan tingkat inflasi untuk menentukan tingkat suku bunga nominalnya. Persamaan tersebut menunjukkan tingkat bunga dapat berubah karena dua alasan yakni karena tingkat bunga riil berubah atau karena tingkat inflasi yang berubah.

G. Permintaan Uang dalam Ekonomi Islam

Uang mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Pada awalnya uang berbentuk barang komoditas untuk mendukung sistem barter pada masa itu. Uang kemudian berevolusi menjadi bentuk mata uang logam dan kertas. Keseluruhan bentuk uang tersebut diakui sebagai alat pembayaran sehingga memudahkan dalam kegiatan perekonomian.

1. Nilai Uang dalam Ekonomi Islam

Menurut pandangan ekonomi Islam, menumpuk uang bukanlah hal yang memberikan keuntungan. Angka yang tertera pada mata uang, baik logam maupun kertas, tidak akan memberikan nilai apabila hanya sekedar disimpan dan ditumpuk saja. Uang dikatakan sebagai bentuk simpanan yang bernilai apabila uang tersebut dimanfaatkan menjadi bagian dari proses produksi. Dalam pandangan Islam, uang tidak untuk dikumpulkan dan disimpan saja akan tetapi diproduksi. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional dalam memandang istilah uang dan kapital. Dalam pandangan ekonomi konvensional, istilah uang dan kapital seringkali digunakan secara sama (*interchangeable*). Sebab dalam ekonomi konvensional uang identik dengan kapital. Sedangkan ekonomi Islam membedakan secara tegas antara uang dan kapital. Konsekuensi dari pembedaan ini, secara lebih jauh kemudian dapat dibedakan uang sebagai barang publik (*publik goods*) dan kapital sebagai barang private (*private goods*). Selain itu, uang merupakan sesuatu yang bersifat *flow concept* sedangkan kapital bersifat *stock concept*. Sehingga dalam ekonomi Islam, uang harus mengalir dan beredar dimasyarakat atau tidak boleh diendapkan dan ditimbun.

Konsekuensi lainnya dari adanya pemisahan antara konsep uang dan kapital adalah, uang tidak dapat menjadi sumber pendapatan sebelum dibelanjakan untuk keperluan yang produktif (*investasi*). Sehingga untuk mendapatkan hasil, seseorang yang memiliki uang harus “menukarnya” dengan kapital (berupa barang-barang modal) sehingga menjadi barang private yang produktif untuk menghasilkan pendapatan. Hal ini juga berkaitan dengan larangan *riba* dalam Islam, dimana seorang

muslim dilarang untuk mendapatkan keuntungan dari uang yang dipinjamkannya kepada pihak lain.

2. Ukuran Nilai Uang dalam Ekonomi Islam

Uang merupakan bentuk alat pembayaran yang sah. Nilai uang selalu berubah dan bersifat tidak tetap. Komoditi yang dimanifestasikan dengan uang tidak selalu tetap dan stabil, maka dari itu nilai uang suatu negara mengalami fluktuasi tergantung dari factor internal maupun eksternal negara tersebut. Dengan nilai uang yang berfluktuasi, maka daya beli masyarakatnya juga mengalami peningkatan dan penurunan.

Ketidakstabilan nilai uang akan menimbulkan banyak spekulasi-spekulasi akan nilai uang tersebut. Ketidakstabilan nilai uang juga menimbulkan guncangan yang mendorong adanya inflasi maupun deflasi yang kadangkala melebihi batas kewajaran yang sudah ditetapkan Pemerintah. Ketidakstabilan nilai uang akan memunculkan usaha-usaha yang mengarah pada hal yang diharamkan dalam ekonomi Islam. Usaha membungakan uang dan usaha mengumpulkan uang untuk investasi yang tidak ada kejelasan dasar hukumnya dan bertujuan untuk mendapatkan bunga dari kumpulan uang tersebut merupakan contoh kegiatan perekonomian yang tidak diperbolehkan dalam sudut pandang Ekonomi Islam.

H. Permintaan dan Penawaran Uang : Mazhab Ekonomi Islam

Bank Sentral memiliki kebijakan dalam mengatur dan mengeluarkan mata uang serta memperluas pos pengeluaran nasional agar dapat meningkatkan persediaan uang. Dengan adanya peningkatan penawaran uang, maka harga-harga yang ada di pasaran akan mengalami lonjakan.

Menurut Karim, Adiwarmanto A. dkk (2001), terdapat beberapa Mazhab dalam permintaan uang menurut sudut pandang Ekonomi Islam, antara lain:

1. **Mazhab Iqtishoduna**

Menurut Mazhab *Iqtishoduna*, permintaan uang ditujukan untuk motif transaksi, berjaga-jaga. Permintaan uang dengan motif transaksi merupakan bentuk fungsi tingkat pendapatan, di mana semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kebutuhan uang untuk transaksi akan semakin meningkat. Berikut persamaan matematis dari Mazhab *Iqtishoduna*:

$$Md = Md_{trans} + Md_{prec} \quad (6.8)$$

Di mana :

Md : *Demand of Money*, permintaan uang

Md_{trans} : *Demand of Money - Transaction Motive*, motif transaksi

Md_{prec} : *Demand of Money - precautionary motive*, motif berjaga-jaga

2. **Mahzab Mainstream**

Menurut Mahzab Mainstream, landasan pokok dari permintaan uang dalam ekonomi islam adalah pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk dialokasikan secara maksimal dan seefisien mungkin sehingga adanya penimbunan uang merupakan hal yang sangat dilarang. Pengenaan pajak terhadap asset produktif yang menganggur merupakan strategi yang digunakan dalam Mahzab Mainstream. Hal tersebut dimaksudkan untuk alokasi setiap sumber dana yang ada pada kegiatan usaha produktif. Adanya pengenaan pajak akan memberikan dampak pada permintaan uang dalam hal ini motif berjaga-jaga. Semakin tinggi pajak yang dikenakan ter-

hadap asset produktif yang tidak diberdayagunakan, maka permintaan akan asset produktif tersebut akan berkurang. Berikut persamaan matematis dari Mazhab *Mainstream*:

$$Md = Md_{trans} + Md_{prec} \quad (6.9)$$

$$Md_{trans} = f(Y) \quad (6.10)$$

$$Md_{trans+prec+inv} = f(Y, \pi) \quad (6.11)$$

Di mana :

Md : *Demand of Money*, permintaan uang

Md_{trans} : *Demand of Money - Transaction Motive*, motif transaksi

Md_{prec} : *Demand of Money - precautionary motive*, motif berjaga-jaga

π : Tingkat pajak atas asset yang mengganggu

semakin kecil Md_{prec} , resiko yang harus dikeluarkan untuk membayar pajak terhadap uang kas tersebut menjadi naik. Dalam kondisi tersebut, orang akan berusaha memperkecil pajak yang dibayarkan kepada pemerintah dengan mengurangi kekayaan. tinggi rendahnya resiko menyimpan uang kas (Ω) dipengaruhi oleh besarnya tingkat pajak atas asset yang mengganggu (π) dikurangi dengan resiko investasi (\yen), sehingga persamaan matematisnya sebagai berikut :

$$\Omega = \pi - \yen . \quad (6.12)$$

Di mana :

Ω : Uang kas

π : Tingkat pajak atas asset yang mengganggu

\yen : resiko investasi

Variabel pendapatan (Y) berbanding positif dengan banyaknya permintaan uang (Md) dan berbanding terbalik dengan nilai pajak yang dikenakan atas asset yang menganggur (π). Persamaan matematisnya sebagai berikut:

$$Md = f(Y, \pi) \quad (6.13)$$

Di mana :

Md : *Demand of Money*, permintaan uang

Y : Pendapatan

π : Tingkat pajak atas asset yang menganggur

Semakin tinggi nilai π , maka velocity of money akan meningkat. Peningkatan tersebut akan mengurangi Md_{prec} dan meningkatkan Md_{trans} yang akan meningkatkan pendapatan nasional (Y)

3. **Mahzab Alternatif**

Permintaan uang pada mahzab alternatif berkaitan dengan konsep endogenous uang dalam Islam (Choudhury, 1997). Teori tersebut secara sederhana diartikan sebagai keberadaan uang yang merupakan representasi dari volume transaksi yang ada dalam sector riil.

Ekonomi Islam beranggapan perubahan nilai tambah ekonomi tidak hanya didasarkan pada perubahan waktu. Nilai tambah uang terjadi jika ada pemanfaatan ekonomis selama uang tersebut digunakan. Secara makroekonomi, nilai tambah uang dan jumlahnya hanya representasi dari perubahan dan pertambahan di sector riil. Konsep tersebut kemudian menjadi landasan sistem moneter Islam yang berlandaskan pada sector mikroekonomi.

I. Pentingnya Uang dalam Ekonomi Islam

Kegiatan ekonomi sangat erat kaitannya dengan uang dan modal. Dalam ekonomi konvensional, uang dan modal adalah dua hal yang sama, uang dianggap sebagai modal. Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat (*money is public goods*) dan modal adalah milik pribadi (*capital is private goods*). Uang yang ditimbun tanpa dimanfaatkan akan mengurangi jumlah uang yang beredar (JUB) yang kemudian akan mengurangi peredaran uang dan pada akhirnya akan menurunkan aktivitas perekonomian.

Modal dikatakan sebagai milik pribadi dalam ekonomi Islam sehingga modal merupakan obyek zakat. Zakat bersifat perseorangan. Di dalam Islam, barangsiapa orang yang tidak mendayagunakan modalnya, maka tetap ada kewajiban untuk membayar zakat atas modal yang dimiliki. Semakin besar modal maka akan semakin besar zakat. Maka dari itu dalam ekonomi Islam ada anjuran menggunakan sistem bagi hasil dalam berbisnis. Sistem lain yang dapat digunakan ialah sistem qard, yaitu memberikan bantuan modal kepada orang lain tanpa mengambil imbalan atas modal yang dipinjamkan. Qard tidak memberikan manfaat secara langsung bagi pemilik modal, akan secara tidak langsung memberikan manfaat bagi perekonomian. Dengan adanya qard, maka perputaran uang (*velocity of money*) akan meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan nasional, begitu pun pendapatan peminjam modal juga akan mengalami peningkatan.

J. Fungsi Uang dalam Ekonomi Islam

Menurut ekonomi Islam, uang merupakan sebuah alat tukar, bukan merupakan komoditas. Selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai pengukur harga pada barang dan jasa. Oleh karena itu dalam ekonomi Islam uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk meng-

ukur harga setiap barang dan jasa. Peran uang tersebut dapat mempermudah proses transaksi, sebagai alat ukur harga barang dan jasa, serta menghapuskan ketidakadilan dalam penerapan sistem barter. Sistem barter dalam ekonomi Islam dianggap sebagai riba *fadhhal*. Barter merupakan sistem pertukaran yang umumnya menunjukkan ketidakadilan dalam sistem mekanisme pasar, sehingga uang dapat dijadikan solusi dalam sistem penukaran tepat guna yang praktis.

Ajaran Islam sangat mendukung fungsi uang sebagai media penukaran (medium of exchange) seperti yang telah disampaikan dalam beberapa Hadis tantara lain:

Abu Said r.a., berkata "Pada suatu Ketika, Bilal datang kepada Rasulullah SAW membawakan kurma Barni. Lalu Rasulullah bertanya kepad Bilal, "Kurma dari mana ini?" jawab Bilal, "Kurma kita rendah mutunya, karena itu kutukar dua gantang dengan satu gantang kurma ini untuk pangan Nabi SAW."

Kemudian Rasulullah bersabda,"Inilah yang dinamakan riba, jangan sekali-kali engkau lakukan lagi. Apabila engkau ingin membeli kurma (yang bagus), jual lebih dulu kurmamumu (yang kurang bagus) itu, kemudian dengan uang penjualan itu belilah kurma yang lebih bagus."

Hadist lain diriwayatkan oleh Ata Ibn Yasar, Abu Said, dan Abu Hurairah,"Rasulullah tidak menyetujui transaksi-transaksi dengan sistem barte, untuk itu dianjurkan sebaiknya menggunakan uang. Nampaknya Rasulullah melarang bentuk pertukaran seperti itu karena ada unsur riba di dalamnya."

Dalam konsep ekonomi moneter saat ini, penimbunan uang akan memperlambat velocity of money / perputaran uang. Hal tersebut dapat memperkecil transaksi sehingga perekonomian menjadi lesu. Peleburan uang juga disamakan dengan mengurangi jumlah penawaran uang yang dapat digunakan untuk transaksi. Dalam ekonomi Islam, fungsi uang adalah sebagai media pertukaran dan standar harga barang. Apabila ada yang menggunakan uang tidak sesuai dengan

fungsinya, berarti dia dikatakan telah kufur nikmat dalam penggunaan uang. Apabila uang hanya disimpan saja maka manfaat dari uang tersebut akan hilang dan tujuan dari adanya uang tersebut tidak terwujud. Uang juga berfungsi sebagai satuan nilai (*unit of account*), di mana uang berfungsi sebagai standar alat ukur barang dan jasa.

K. Nilai Waktu Uang : Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi konvensional terdapat pemikiran tentang nilai waktu uang (*time value of money*). Pemikiran tersebut didasarkan pada anggapan uang disamakan dengan barang yang hidup (sel hidup) yang dapat berkembang berdasar waktu tertentu. Persamaan dasar pada sel hidup yang menjadi dasar dari kosep pemikiran nilai waktu uang sebagai berikut:

$$P_b = P_0(1+g)^t \quad (6.14)$$

Di mana :

P_b : Pertumbuhan sel

P_0 : Sel awal

g : *Growth*, pertumbuhan

t : Waktu

Formula tersebut diturunkan ke dalam konsep ekonomi, dengan asumsi uang sebagai sesuatu sel yang berkembang dari waktu ke waktu sehingga muncul persamaan sebagai berikut:

$$FV = PV(1+i)^n \quad (6.15)$$

Di mana:

FV : Nilai uang di masa depan (*future value*)

PV : Nilai uang di masa sekarang (*present value*)

i : tingkat suku bunga (interest)

n : jumlah waktu

Uang bukan sesuatu yang tumbuh dan berkembang dengan sendirinya. Dalam konsep ekonomi konvensional, adanya nilai uang di masa depan timbul karena adanya penambahan atau pengurangan kuantitas uang pada waktu tertentu sehingga penambahan maupun penurunan uang seseorang merupakan hal yang wajar terjadi apabila ada usaha atas perkembangan uang tersebut.

Dalam konsep ekonomi Islam, *time value of money* tidak terjadi. Dasar dari pernyataan tersebut ialah ada pada surat Al-Ashr: 1-3 yang mana waktu waktu semua orang adalah sama akan tetapi nilai waktu dari uang tersebut berbeda tiap orangnya. Perbedaan tersebut disebabkan karena nilai waktu tiap orang yang memanfaatkan berbeda satu dengan yang lain. Keuntungan dalam Islam tidak sekedar keuntungan duniawi tetapi dunia akhirat sehingga pemanfaatan waktu harus efektif dan efisien. Ajaran Islam tersebut dapat diimplikasikan dalam bisnis yang dihadapkan pada fase untung-rugi yang tidak dapat dipastikan di masa depan karena bisnis pada dasarnya bukan merupakan aktivitas ekonomi yang mendatangkan keuntungan tanpa ada resiko. Sebagai ganti dari situasi ketidakpastian tersebut maka timbul konsep *discount rate*.

Dalam ekonomi Islam, penggunaan *discount rate* dalam menentukan harga mu'ajjal (bayar Tangguh dapat dibenarkan (Muhamad, 2020). Hal tersebut dapat dibenarkan karena: (1) jual beli dan sewa menyewa adalah sector riil yang menimbulkan nilai tambah ekonomi, (2) tertahannya hak si penjual yang telah menyerahkan barang dan jasanya sehingga ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lain. Hal tersebut akan menimbulkan Analisa sebagai berikut: (1) harga yang dibayar Tangguh dapat lebih besar daripada harga yang dibayarkan sekarang. (2) not due to inflation nor interest foregone, (3) adanya penahanan hak si pemilik barang.

Analisis ini didasarkan pada hal yang pernah dilakukan oleh Zaid Ibn Ali Zainal Abidin Ibn Husein Ibn Abi Tholib.

Penggunaan *discount rate* dalam menentukan nisbah bagi hasil juga dapat digunakan. Nisbah akan dikalikan dengan pendapatan actual, bukan dengan pendapatan yang diharapkan. Transaksi bagi hasil akan berbeda dengan transaksi jual beli ataupun sewa menyewa. Sebab dalam transaksi bagi hasil, hubungan kedua belah pihak tidak terjadi antara penjual dan pembeli atau penyewa dengan yang menyewakan. Dalam transaksi bagi hasil, hubungan yang terjadi adalah hubungan pemodal dan yang mengolah modal tersebut. Hak bagi mereka berdua akan timbul Ketika usaha memproduksi modal tersebut telah menghasilkan keuntungan. Hak mereka ialah berbagi hasil atas keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan awal.

Berdasarkan uraian tersebut uang sebenarnya tidak memiliki nilai waktu, akan tetapi waktu yang memiliki nilai ekonomi asalkan waktu dimanfaatkan dengan baik. Dengan adanya nilai waktu tersebut, maka kemudian dapat diukur dengan istilah atau Batasan-batasan ekonomi yang berhubungan dengan tertahannya hak pemilik barang jasa dalam transaksi ekonomi. Untuk mempermudah pemahaman, dapat diilustrasikan apabila suatu barang dijual secara tunai dengan untung Rp 10.000,-, maka penjual dapat membeli barang lain dan menjual barang yang dibeli itu. Dengan demikian, keuntungan penjual tersebut dimungkinkan dapat berlipat. Namun apabila barang dijual dengan Tangguh bayar, maka hak penjual tertahan dan tidak dapat membeli barang lain. Sebagai kompensasi atas tertahannya hak penjual dari pembeli, maka Islam memberikan harga Tangguh lebih tinggi dari harga tunai.

L. Ikhtisar

1. Bank merupakan Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara kreditur dan debitur yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan meyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat.
2. Bank merupakan Lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara kreditur dan debitur yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan meyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat.
3. Tingkat bunga adalah harga yang menghubungkan masa kini dengan masa depan. Apabila seseorang memegang uang lalu hanya disimpan saja tanpa dimanfaatkan maka ia tidak akan memperoleh bunga. Apabila seseorang menabungkan uang di bank maka ia akan memperoleh bunga yang biasa disebut tingkat bunga nominal (*nominal interest rate*).
4. Menurut pandangan ekonomi islam, menumpuk uang bukanlah hal yang memberikan keuntungan. Angka yang tertera pada mata uang, baik logam maupun kertas, tidak akan memberikan nilai apabila hanya sekedar disimpan dan ditumpuk saja
5. Menurut ekonomi Islam, uang merupakan sebuah alat tukar, bukan merupakan komoditas. Selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai pengukur harga pada barang dan jasa. Oleh karena itu dalam ekonomi Islam uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur harga setiap barang dan jasa
6. Dalam konsep ekonomi Islam, *time value of money* tidak terjadi. Dasar dari pernyataan tersebut ialah ada pada surat Al-Ashr: 1-3 yang mana waktu waktu semua orang adalah sama akan tetapi nilai waktu dari uang tersebut berbeda tiap orangnya. Perbedaan tersebut disebabkan

karena nilai waktu tiap orang yang memanfaatkan berbeda satu dengan yang lain

M. Pertanyaan dan Diskusi

1. Mengapa krisis perbankan menyebabkan penurunan jumlah uang beredar?
2. Jelaskan bagaimana bank sentral menciptakan uang!
3. Bagaimana konsep time value of money dalam ekonomi Islam?

BAB VII

PERMINTAAN DAN PENAWARAN AGREGAT

A. Rencana Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu memahami tentang permintaan dan penawaran agregat dalam ekonomi makro, dampak kebijakan fiskal dan moneter pada penawaran dan permintaan agregat, dan kurva permintaan dan penawaran agregat.

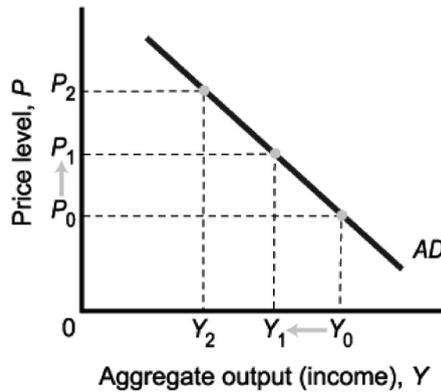
B. Pengertian Permintaan dan Penawaran Agregat

Permintaan Agregat adalah kumpulan permintaan jumlah kuantitas barang dan jasa yang ingin dibeli dari seluruh rumah tangga, perusahaan dan pemerintah dalam sebuah negara. Penawaran Agregat adalah kuantitas barang dan jasa yang diproduksi dan dijual pada setiap tingkat inflasi di sebuah negara. Model penawaran agregat (*Aggregate Supply/AS*) dan permintaan agregat (*Aggregate Demand/AD*) sering kali digunakan untuk membantu menganalisis fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. Model AS-AD ini merupakan turunan dari model IS-LM, di mana pada model IS-LM menggunakan asumsi bahwa tingkat harga bersifat konstan.

Kurva permintaan agregat pada dasarnya melambangkan jumlah dari seluruh barang dan jasa yang diminta dalam suatu perekonomian pada tiap tingkat harga. Artinya, jika hal lain tetap sama, penurunan tingkat harga keseluruhan dalam

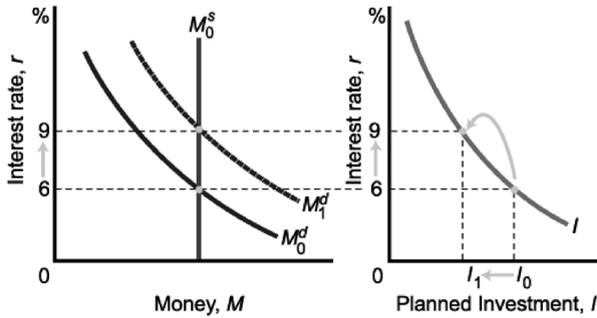
perekonomian cenderung meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Sedangkan kurva penawaran agregat menyatakan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi serta dijual pada setiap tingkat harga oleh berbagai produsen. Artinya, dalam periode satu atau dua tahun, naiknya tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian cenderung menaikkan jumlah penawaran barang dan jasa dan penurunan tingkat harga cenderung mengurangi jumlah penawaran barang dan jasa (Mankiw, 2007:293-304).

C. Kurva Permintaan Agregat (*Aggregate Demand Curve*)

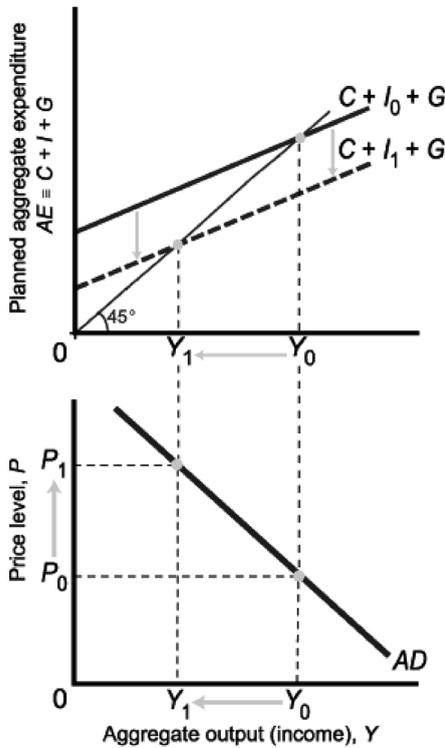


Gambar 7.1. Kurva Permintaan Agregat

Kurva *aggregate demand* (kurva permintaan agregat) menunjukkan hubungan negatif antara ekuilibrium pendapatan nasional dengan tingkat harga. Kenaikan harga akan menyebabkan penurunan output, dan sebaliknya.



Gambar 7.2. Penurunan Kurva Permintaan Agregat (1)

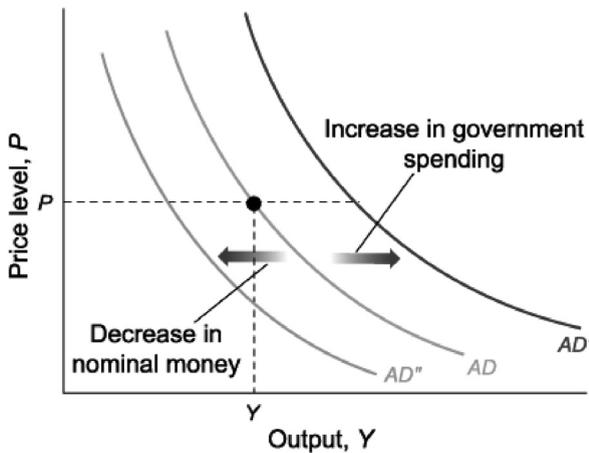


Gambar 7.3. Penurunan Kurva Permintaan Agregat (2)

Setiap kombinasi pendapatan ekuilibrium dan tingkat harganya yang sesuai menjadi satu titik tertentu pada kurva AD sehingga dapat diringkas menjadi sebagai berikut:

$$\uparrow P \rightarrow M^d \uparrow \rightarrow r \uparrow \rightarrow I \downarrow \rightarrow AE \downarrow \rightarrow Y \downarrow$$

Karena kurva AD merupakan hubungan antara ekuilibrium pendapatan nasional dengan tingkat harga, maka perubahan tingkat harga yang menyebabkan pergeseran kurva AE menyebabkan gerakan sepanjang kurva AD. Dengan demikian, kenaikan jumlah konsumsi yang diinginkan, investasi yang diinginkan, pengeluaran pemerintah yang diinginkan, atau pengeluaran ekspor yang diinginkan, akan menggeser kurva AD ke kanan (ke atas). Sebaliknya, penurunan dari setiap pengeluaran ini menggeser kurva AD ke kiri (ke bawah). Bila pengeluaran berubah (meningkat), maka kurva AE akan bergeser ke atas, sehingga kurva AD akan bergeser ke kanan.



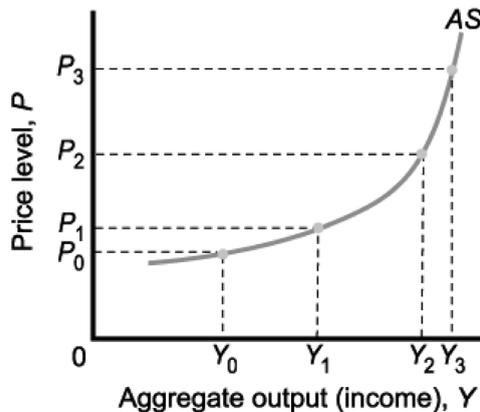
Gambar 7.4 Pergeseran Kurva Permintaan Agregat

Peningkatan pengeluaran pemerintah atau penurunan tarif pajak akan menggeser kurva AD ke kanan. Penurunan JUB akan menggeser kurva AD ke kiri bawah

D. Kurva Penawaran Agregat

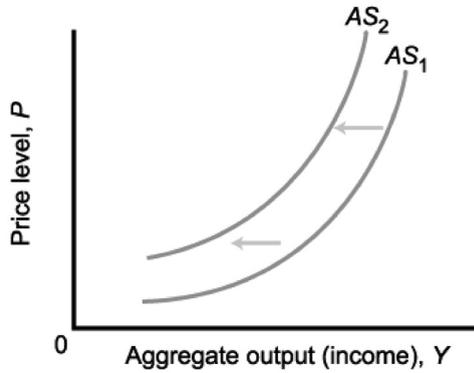
Aggregate supply menunjukkan hubungan antara tingkat output dengan tingkat harga. Dari sisi penawaran (produksi), hubungan ini diturunkan dari perilaku upah dan harga. Kurva penawaran agregat dibedakan antara kurva penawaran agregat jangka pendek dengan kurva penawaran agregat jangka panjang.

Kurva penawaran agregat jangka pendek (*SRAS = short-run aggregate supply*) merupakan hubungan antara tingkat harga dengan kuantitas yang ingin diproduksi dan ingin dijual produsen, dengan asumsi bahwa harga-harga semua faktor produksi konstan/tetap. Kurva penawaran agregat jangka panjang (*LRAS = long-run aggregate supply*) menghubungkan antara tingkat harga dengan penjualan yang diinginkan setelah semua penyesuaian dilakukan terhadap harga.



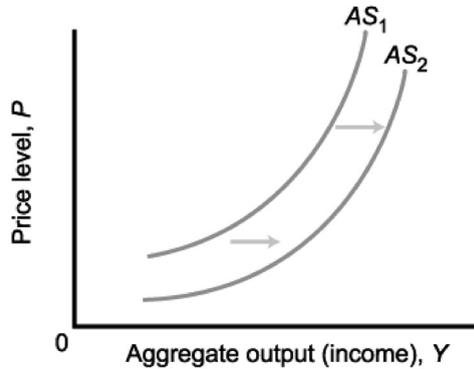
Gambar 7.5. Kurva penawaran agregat jangka pendek

Kurva penawaran agregat jangka pendek berkaitan dengan kapa-sitas produksi nasional. Kapasitas produksi nasional berkaitan dengan fungsi produksi. Kurva SRAS mempunyai slope yang positif; menunjukkan bahwa dengan biaya produksi konstan, output total yang diinginkan dan tingkat harga akan mempunyai hubungan yang positif.



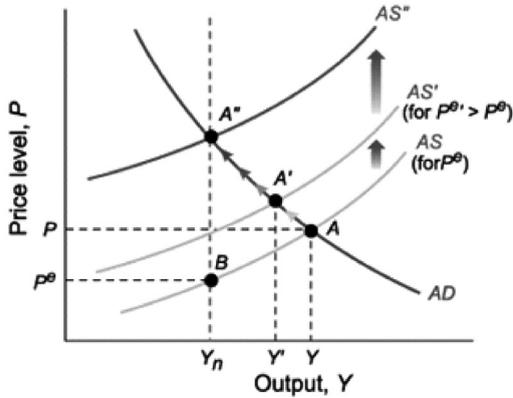
Gambar 7.6 Kurva Pergeseran Penawaran Agregat

Gambar 8.6 menunjukkan kenaikan harga faktor produksi atau penurunan produktivitas akan menggeser kurva SRAS ke kiri.



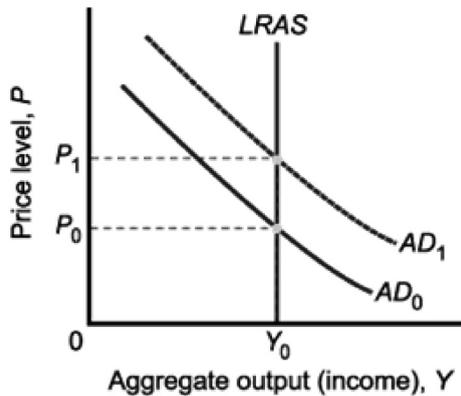
Gambar 7.7 Kurva Pergeseran Penawaran Agregat JAngka Pendek (SRAS)

Kenaikan produktivitas atau penurunan harga faktor produksi akan menggeser kurva SRAS ke kanan.



Gambar 7.8 Pergeseran SRAS ke LRAS

Ada 2 hal yang menyebabkan kurva AS akan naik terus sehingga menciptakan kurva AS jangka menengah/Panjang antara lain output meningkat di atas rata-rata alamiah dan tenaga kerja mengharapkan adanya kenaikan upah/gaji di masa depan. Apabila kenaikan output dan upah telah berhenti: (output = rata-rata alamiah, dan upah mencapai puncak), kurva SRAS akan berubah menjadi LRAS.



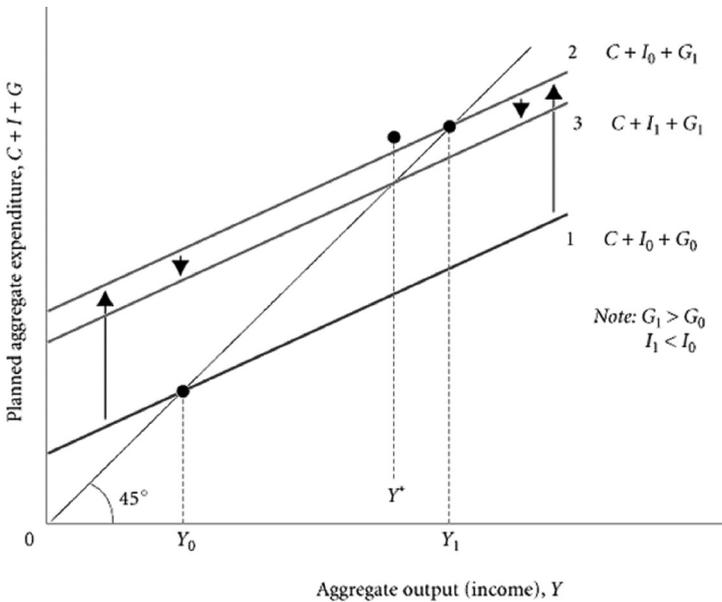
Gambar 7.9 Kurva LRAS

Jika kurva AS vertikal dalam jangka panjang, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal tidak memiliki efek

pada output agregat. Dalam jangka panjang, multiplier effect dari perubahan belanja pemerintah atau pajak tidak berpengaruh terhadap output.

E. Dampak Kebijakan Fiskal Ekspansif

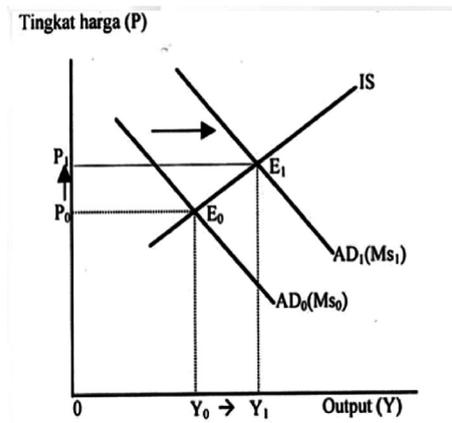
Pemerintah menstimulus permintaan agregat dengan meningkatkan pengeluarannya atau menurunkan pajak. Peningkatan pengeluaran memiliki efek langsung pada peningkatan permintaan agregat. Sebaliknya, tarif pajak yang lebih rendah berdampak tidak langsung pada permintaan agregat, yaitu melalui peningkatan disposable income rumah tangga dan peningkatan keuntungan bisnis.



Gambar 7.10 Dampak Kebijakan Fiskal Ekspansif pada Permintaan Agregat

Naiknya pengeluaran pemerintah dari G_0 ke G_1 akan menggeser kurva AE dari 1 ke 2. Naiknya G akan menyebabkan turunnya I (*crowding-out effect*)

F. Dampak Kebijakan Moneter Ekspansif

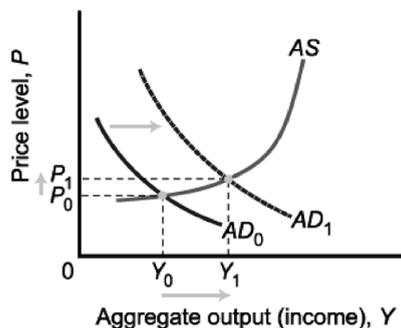


Gambar 7.11. Kurva Kebijakan Moneter Ekspansif dalam AD-AS

Kenaikan JUB menyebabkan kurva permintaan agregat (AD) bergeser ke kanan dari $AD_0 (Ms_0)$ ke $AD_1 (Ms_1)$ yang mengakibatkan tingkat harga (P) naik dari P_0 ke P_1 dan pendapatan naik dari Y_0 ke Y_1 .

G. Pengaruh AD, AS, Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter

Kebijakan ekspansif bekerja dengan baik ketika ekonomi berada pada bagian datar kurva AS; perubahan kecil dalam P menyebabkan peningkatan output lebih besar.



Gambar 7.12. Kurva Pergeseran Permintaan Agregat

AD dapat bergeser ke kanan karena beberapa sebab, termasuk kenaikan JUB, penurunan tarif pajak atau kenaikan belanja pemerintah. Ketika perekonomian sudah mendekati kapasitas penuh, peningkatan AD akan mengakibatkan kenaikan tingkat harga dengan sedikit peningkatan output.

H. Ikhtisar

1. Permintaan Agregat adalah kumpulan permintaan jumlah kuantitas barang dan jasa yang ingin dibeli dari seluruh rumah tangga, perusahaan dan pemerintah dalam sebuah negara.
2. Penawaran Agregat adalah kuantitas barang dan jasa yang diproduksi dan dijual pada setiap tingkat inflasi di sebuah negara. Model penawaran agregat (*Aggregate Supply/AS*) dan permintaan agregat (*Aggregate Demand/AD*) sering kali digunakan untuk membantu menganalisis fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. Model AS-AD ini merupakan turunan dari model IS-LM, di mana pada model IS-LM menggunakan asumsi bahwa tingkat harga bersifat konstan.
3. Kurva *aggregate demand* (kurva permintaan agregat) menunjukkan hubungan negatif antara ekuilibrium pendapatan nasional dengan tingkat harga. Kenaikan harga akan menyebabkan penurunan output, dan sebaliknya.
4. Setiap kombinasi pendapatan ekuilibrium dan tingkat harganya yang sesuai menjadi satu titik tertentu pada kurva AD sehingga dapat ditingkatkan menjadi sebagai berikut:

$$\uparrow P \rightarrow M^d \uparrow \rightarrow r \uparrow \rightarrow I \downarrow \rightarrow AE \downarrow \rightarrow Y \downarrow$$

5. Karena kurva AD merupakan hubungan antara ekuilibrium pendapatan nasional dengan tingkat harga, maka

perubahan tingkat harga yang menyebabkan pergeseran kurva AE menyebabkan gerakan sepanjang kurva AD. Dengan demikian, kenaikan jumlah konsumsi yang diinginkan, investasi yang diinginkan, pengeluaran pemerintah yang diinginkan, atau pengeluaran ekspor yang diinginkan, akan menggeser kurva AD ke kanan (ke atas).

6. Ada 2 hal yang menyebabkan kurva AS akan naik terus sehingga menciptakan kurva Aggregate supply jangka menengah/Panjang antara lain output meningkat di atas rata-rata alamiah dan tenaga kerja mengharapkan adanya kenaikan upah/gaji di masa depan.

I. Pertanyaan dan Diskusi

1. Jelaskan disertai dengan kurva bagaimana mekanisme pergeseran kurva permintaan agregat (AD)!
2. Mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah?
3. Jelaskan dampak kenaikan jumlah uang beredar dalam jangka pendek dan jangka Panjang!

BAB VIII

INFLASI DAN PENGANGGURAN

A. Rencana Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu memahami relevansi antara inflasi dan pengangguran, konsep inflasi, teori-teori inflasi, jenis inflasi dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi serta dampak inflasi terhadap pengangguran dan perekonomian.

B. Konsep dasar Inflasi dan Pengangguran

Salah satu ukuran keberhasilan pengelolaan ekonomi suatu negara adalah tingkat pengangguran. Pengangguran (unemployment), tidak berkaitan dengan mereka yang tidak bekerja, tetapi dengan mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran alamiah bergantung pada berbagai ciri pasar tenaga kerja, seperti peraturan upah minimum, kekuasaan pasar serikat pekerja, peranan upah efisiensi dan seberapa efektifnya proses pencarian kerja. Sebaliknya tingkat inflasi terutama sekali bergantung pada jumlah uang yang beredar yang dikendalikan oleh bank sentral, oleh sebab itu, pada jangka panjang, inflasi dan pengangguran secara garis besar bukanlah dua masalah yang saling berkaitan.

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu

tertentu. Inflasi dipengaruhi banyak faktor, seperti peningkatan konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, hingga ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi yang terkendali akan meningkatkan kegiatan perekonomian warga di suatu negara. Salah satu contohnya, inflasi akan mendorong berkembangnya ekonomi karena permintaan barang dan jasa meningkat sehingga membuat kenaikan harga barang dan jasa.

Pengangguran (unemployment) adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (labour force) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2001). Angkatan kerja adalah jumlah penduduk yang bekerja dan yang tidak bekerja berumur lebih dari 15 tahun.

C. Teori Inflasi

1. Teori kuantitas

Teori kuantitas menekankan peranan inflasi pada jumlah uang beredar (JUB) dan ekspektasi masyarakat terkait harga. Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan volume uang yang beredar, tanpa ada kenaikan jumlah uang yang beredar. Kejadian seperti ini misalnya, kegagalan panen, hanya akan menaikkan harga – harga untuk sementara waktu saja. Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya, apapun sebab-musababnya awal dari kenaikan harga – harga tersebut. Sedangkan ekspektasi masyarakat terhadap harga disebabkan karena Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang yang beredar dan oleh psikologi (harapan) masyarakat mengenai harga-harga di masa mendatang. Kemungkinan dari kondisi tersebut ialah 1) apabila masyarakat tidak mengharapkan kenaikan harga di masa datang, 2) di mana masyarakat mulai sadar akan kenaikan harga yang disebabkan inflasi, 3) kondisi pada tahap

hiperinflasi di mana masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang.

2. Teori Keynes

Menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Proses inflasi, menurut pandangan ini, tidak lain adalah proses perebutan bagian rejeki diantara kelompok – kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar daripada yang bisa disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat akan barang – barang selalu melebihi jumlah barang – barang yang tersedia (*inflationary gap*). *Inflationary gap* timbul karena adanya golongan – golongan masyarakat tersebut berhasil menerjemahkan aspirasi mereka menjadi permintaan yang efektif akan barang – barang. Dengan kata lain, mereka berhasil memperoleh dana untuk mengubah aspirasinya menjadi rencana pembelian barang – barang yang didukung dengan dana. Golongan masyarakat seperti ini mungkin adalah pemerintah sendiri, yang berusaha memperoleh bagian yang lebih besar dari output masyarakat dengan jalan menjalankan defisit dalam anggaran belanjanya yang dibiayai dengan mencetak uang baru. Golongan tersebut mungkin juga pengusaha – pengusaha swasta yang menginginkan untuk investasi – investasi baru dan memperoleh dana pembiayaannya dari kredit dari bank. Golongan tersebut biasa pula serikat buruh yang berusaha memperoleh kenaikan gaji bagi anggota – anggotanya melebihi kenaikan produktifitas buruh.

3. Teori struktural

Teori ini memberikan tekanan pada kekakuan dari struktur perekonomian negara – negara sedang berkembang.

karena inflasi dikaitkan dengan faktor – faktor struktural dari perekonomian (yang menurut definisi, faktor – faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang) maka teori ini bisa disebut teori inflasi jangka panjang. Terdapat tiga hal yang perlu ditekankan pada teori structural ini antara lain:

- 1) Teori ini menerangkan proses inflasi jangka panjang di negara – negara yang sedang berkembang,
- 2) Ada asumsi bahwa jumlah uang beredar bertambah dan secara pasif mengikuti dan menampung kenaikan harga – harga tersebut. Dengan kata lain, proses inflasi tersebut bisa berlangsung terus hanya apabila jumlah uang beredar juga bertambah terus. Tanpa kenaikan jumlah uang proses tersebut akan berhenti dengan sendirinya,
- 3) Faktor – faktor struktural yang dikatakan sebagai sebab musabab yang paling dasar dari proses inflasi tersebut bukan 100 % struktural. Sering dijumpai bahwa keterangan – keterangan tersebut disebabkan oleh kebijakan harga atau moneter pemerintah sendiri.

D. Jenis Inflasi

1. Berdasarkan sifat

a. Inflasi rendah (*creeping inflation*)

Inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang/jasa secara umum, biasanya di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan

b. Inflasi menengah (*galloping inflation*)

inflasi menengah besarnya 10%-30% per tahun dan ditandai dengan adanya kenaikan harga yang cukup tinggi dan kadang-kadang berjalan dalam jangka

pendek dan memiliki sifat akselerasi. Artinya harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi daripada harga-harga minggu/bulan lalu dan seterusnya

c. Inflasi tinggi (*high inflation*)

yaitu inflasi yang besarnya antara 30 – 100% pertahun. Dalam kondisi ini harga-harga secara umum naik secara signifikan

d. Inflasi sangat tinggi (*hyper inflation*)

yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (di atas 100%). Pada kondisi ini masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya merosot sangat tajam, sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang

2. Berdasarkan sebab

a. *Demand pull inflation*

Demand pull inflation atau juga disebut inflasi tarikan permintaan ialah jenis inflasi yang muncul dikarenakan adanya permintaan barang maupun jasa yang tinggi. Meski permintaan barang atau jasa tersebut sangat tinggi produsen harus mampu dan bisa memenuhi semua permintaan tersebut, Demand Pull Inflation pada umumnya menggambarkan fenomena yang meluas. Apabila permintaan konsumen telah melebihi penawaran yang tersedia dari banyak jenis barang konsumsi, maka inflasi jenis ini yang akan terjadi dan akan memaksa peningkatan biaya hidup secara keseluruhan.

b. *Cost push inflation*

Cost push inflation atau yang biasa disebut inflasi dorongan biaya adalah kondisi kenaikan biaya produksi yang berimbas meningkatnya harga barang

sehingga mengakibatkan munculnya inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh cost push inflation secara otomatis akan mendesak pendapatan dan daya beli masyarakat. Kondisi seperti ini akan berakibat pada pengurangan lapangan kerja dan angka kemiskinan semakin meningkat. inflasi ini muncul atau timbul karena ada kenaikan pada biaya produksi. Biaya produksi yang meningkat menyebabkan harga penawaran barang ikut naik

3. Berdasarkan asal

a. *Domestic inflation*

Inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini terjadi sepenuhnya disebabkan oleh pengelolaan perekonomian baik di sektor riil ataupun di sektor moneter di dalam negeri oleh para pelaku ekonomi dan masyarakat

b. *Foreign/imported inflation*

Imported inflation adalah salah satu jenis inflasi yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar sehingga berdampak pada naiknya harga impor dari luar negeri. Ketika harga impor meningkat, harga semua barang dan jasa meningkat.

E. Cara Menghitung Inflasi

1. Perhitungan inflasi berdasarkan perubahan harga

$$\text{Inflasi} = (P_1 - P_0) / P_0$$

Di mana:

P_1 : harga barang atau jasa di akhir periode

P_0 : harga barang dan jasa di awal periode

2. Perhitungan inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen

$$\text{Inflasi} = (IHK_n - IHK_{n-1}) / IHK_{n-1}$$

Di mana:

IHK_n : Indeks Harga Konsumen periode sekarang

IHK_{n-1} : Indeks Harga Konsumen periode sebelumnya

F. Dampak Inflasi

1. Dampak Positif Inflasi

- a. Masyarakat akan semakin selektif dalam menentukan konsumsi
- b. Inflasi yang berkepanjangan dapat menumbuhkan industri kecil dalam negeri menjadi semakin dipercaya dan tangguh.
- c. Tingkat pengangguran cenderung akan menurun karena masyarakat akan tergerak untuk melakukan kegiatan produksi dengan cara mendirikan atau membuka usaha.

2. Dampak Negatif Inflasi

- a. Kenaikan harga secara terus-menerus akan mengakibatkan panic buying pada masyarakat. Masyarakat yang memiliki uang lebih akan membeli barang dengan kuantitas banyak sedangkan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan membeli barang dengan harga yang tinggi tidak dapat membeli barang tersebut.
- b. Bank mengalami kekacauan karena masyarakat berlomba menarik dana di bank untuk dibelanjakan sehingga cadangan dana di bank akan berkurang dan dapat mengakibatkan kebangkrutan karena minimnya investasi dan dana yang masuk ke bank.

- c. Produsen memiliki kesempatan untuk memainkan harga barang di pasar
- d. adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin sehingga akan meningkatkan kecemburuan social yang berakibat pada ketidakstabilan kondisi masyarakat dan tingkat kriminalitas tinggi.

G. Kebijakan Mengatasi Inflasi

1. Kebijakan moneter

Kebijakan moneter dalam mencegah inflasi ialah dengan mengatur jumlah uang beredar. Pengaturan JUB oleh bank sentral dapat dilakukantara lain dengan kebijakan berikut:

- a. Penetapan Rasio Cadangan Wajib Minimum (*Reserve Requirement*)

Cadangan wajib minimum adalah peraturan yang digunakan oleh sebagian besar bank sentral di dunia, dimana bank sentral menetapkan jumlah minimum cadangan wajib yang harus dipegang oleh bank umum. Untuk menekan laju inflasi cadangan minimum ini dinaikkan sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil

- b. Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*)

operasi pasar terbuka adalah kegiatan bank sentral untuk membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Ini adalah salah satu instrumen kebijakan moneter selain suku bunga kebijakan dan rasio cadangan wajib. Kebijakan operasi pasar terbuka yang dilakukan secara masif dinamakan dengan pelonggaran kuantitatif (*quantitative easing*). Untuk meningkatkan jumlah uang beredar, Bank Sentral menjual surat-surat berharga. Sedangkan untuk menurunkan jumlah uang beredar, Bank Sentral membeli surat-surat berharga

1. Kebijakan fiskal

Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan agregat (*aggregate demand*). Kebijakan fiskal menyangkut pengaturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dan dengan demikian akan mempengaruhi harga. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.

2. Kebijakan output

Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijaksanaan penurunan bea masuk sehingga impor cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang dalam negeri cenderung menurunkan harga.

3. Kebijakan penentuan harga

Kebijakan ini dilakukan dengan penentuan harga yang didasarkan pada indeks harga tertentu untuk upah. Apabila indeks harga meningkay maka upah juga akan meningkat.

H. Kategori Pengangguran

1. Berdasarkan alasan menganggur

a. Pengangguran struktural

Pengangguran yang menganggur karena sedang dalam proses peralihan dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lainnya dengan beberapa alasan antara lain pindah perusahaan, pindah lokasi/kota.

b. Pengangguran friksional

belum bisa mendapatkan pekerjaan karena ketidakcocokkan keahlian yang dimiliki dengan jenis ke-

butuhan tenaga kerja yang dicari. Sarjana peternakan, tapi lowongan yang tersedia bukan untuk sarjana peternakan.

c. Pengangguran musiman

Merupakan jenis pengangguran yang disebabkan karena kondisi perekonomian yang sedang mengalami resesi maupun pengangguran yang diakibatkan pergantian musim karena ada waktu jeda pekerjaan saat terjadi pergantian musim ke musim lainnya. Biasanya pengangguran musiman ini terjadi pada sektor pertanian

2. Berdasarkan intensivitas menganggur

a. Pengangguran penuh

Merupakan jenis pengangguran di mana seseorang tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali/tidak melakukan aktivitas yang menghasilkan

b. Setengah penganggur

Merupakan jenis pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam/minggu

c. Pengangguran terselubung

Merupakan jenis pengangguran dengan pekerja yang bekerja dan mendapat upah tapi pekerjaannya tidak produktif

I. Strategi mengatasi pengangguran

Terdapat beberapa strategi dalam mengatasi pengangguran antara lain:

1. Perlunya pengembangan investasi dan Kerjasama dengan pihak swasta sehingga tercipta kondisi lingkungan yang kondusif untuk berusaha

2. Perlunya peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan melakukan akselerasi perbaikan sector Pendidikan serta peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja
3. Peningkatan peran pemerintah untuk memotivasi masyarakat untuk menciptakan lapangan usaha
4. Pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk

J. Hubungan Inflasi, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap jumlah pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi.

Adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah pengangguran ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Indonesia memberikan peluang kerja baru ataupun memberikan kesempatan kerja dan berorientasi pada padat karya, sehingga pertumbuhan ekonomi mengurangi jumlah pengangguran.

K. Ikhtisar

1. Pengangguran (unemployment), tidak berkaitan dengan mereka yang tidak bekerja, tetapi dengan mereka yang belum mendapatkan pekerjaan.
2. Tingkat pengangguran alamiah bergantung pada berbagai ciri pasar tenaga kerja, seperti peraturan upah minimum, kekuasaan pasar serikat pekerja, peranan upah efisiensi dan seberapa efektifnya proses pencarian kerja.

3. Cara Menghitung Inflasi

Perhitungan inflasi berdasarkan perubahan harga

$$\text{Inflasi} = (P_1 - P_0) / P_0$$

Di mana:

P_1 : harga barang atau jasa di akhir periode

P_0 : harga barang dan jasa di awal periode

Perhitungan inflasi berdasarkan Indeks Harga Konsumen

$$\text{Inflasi} = (IHK_n - IHK_{n-1}) / IHK_{n-1}$$

Di mana:

IHK_n : Indeks Harga Konsumen periode sekarang

IHK_{n-1} : Indeks Harga Konsumen periode sebelumnya

4. Kebijakan fiskal dan moneter dapat dilakukan untuk mengatasi inflasi dan pengangguran
5. Terdapat beberapa strategi dalam mengatasi pengangguran antara lain pengembangan investasi dan Kerjasama dengan pihak swasta, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan melakukan akselerasi perbaikan sector Pendidikan serta peningkatan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, Peningkatan peran pemerintah untuk memotivasi masyarakat untuk menciptakan lapangan usaha, pengendalian tingkat pertumbuhan penduduk

6. Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap jumlah pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif.

L. Pertanyaan dan Diskusi

1. Jelaskan peran kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam mengatasi permasalahan inflasi!
2. Bagaimana hubungan inflasi dan pengangguran dalam jangka pendek dan jangka Panjang?
3. Berdasarkan data BPS, indeks harga konsumen bulan Januari 2021 sebesar 120,65. Sementara itu, indeks harga konsumen bulan Februari 2021 sebesar 145,50. Berapa laju inflasi bulan Februari 2021?

BAB XI

HUTANG PEMERINTAH

A. Rencana Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu memahami mekanisme hutang pemerintah, berbagai pandangan terkait hutang pemerintah, Perspektif Hutang Pemerintah dalam Ekonomi Konvensional dan ekonomi islam

B. Konsep Dasar Hutang Pemerintah

Hutang merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang digunakan sebagai salah satu bentuk pembiayaan ketika APBN mengalami defisit dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (*debt refinancing*). Pemerintah Indonesia menempuh kebijakan fiskal ekspansif untuk menstimulasi perekonomian domestik di tengah ketidakpastian perekonomian global. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah meningkatnya penggunaan instrumen utang untuk menutup defisit anggaran. Hal ini dapat terlihat dari pergerakan rasio utang pemerintah pusat terhadap PDB yang terus bergerak naik dari 20% di tahun 2011 menjadi 29.81% di tahun 2018. Tren kenaikan utang ini menjadi perhatian bagi pemerintah dalam menjaga pengelolaan utang yang berkelanjutan. Oleh karena itu,

studi ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan strategi utang agar ke depan pengelolaan utang dapat lebih prudent dan risikonya terkendali.

Terdapat beberapa tujuan dari hutang pemerintah antara lain:

- 1) Memenuhi kebutuhan pembiayaan, termasuk pembiayaan kembali utang jatuh tempo, dengan biaya yang optimal dan risiko yang terkendali,
- 2) Mendukung pengembangan pasar SBN domestik untuk mendukung terciptanya pasar SBN yang dalam, aktif, dan likuid yang berdampak pada peningkatan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang,
- 3) Meningkatkan akuntabilitas public sebagai bagian dari pengelolaan utang pemerintah yang transparan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Suatu negara yang melakukan pinjaman luar negeri tentu memiliki beban hutang, baik beban secara langsung ataupun secara tidak langsung. Beban langsung dari pinjaman luar negeri berupa hilangnya kesejahteraan ekonomi. Sedangkan beban tidak langsung berpengaruh pada konsumsi dan produksi via pajak. Terdapat beberapa alasan yang mendukung terjadinya utang luar negeri, yaitu alasan moral dan kemanusiaan, alasan ekonomi, dan alasan politik. Berdasarkan ketiga alasan tersebut maka timbul banyak persepsi tentang utang pemerintah

C. Pandangan Tradisional atas Hutang Pemerintah

Ekonom tradisional beranggapan terdapat trade-off antara hutang pemerintah dengan pengurangan pajak. Ketika pemerintah mengurangi pajak dengan melaksanakan kebijakan deficit anggaran, maka konsumen akan merespon dengan

melakukan pengeluaran yang lebih banyak dan diikuti dengan peningkatan investasi. Dalam Jangka pendek, pengeluaran konsumen yang tinggi akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, dan akan meningkatkan output dan kesempatan kerja. Tingkat suku bunga juga akan naik ketika investor bersaing, tingkat bunga yang tinggi akan menahan investasi dan mendorong aliran masuk modal dari luar negeri. Dalam jangka panjang, mengecilnya tabungan nasional yang disebabkan oleh pemotongan pajak akan berarti persediaan modal yang lebih kecil dan utang luar negeri yang lebih besar hal tersebut berdampak pada generasi sekarang akan menerima manfaat dari konsumsi yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih tinggi, meskipun inflasi cenderung lebih tinggi. Generasi mendatang yang akan menanggung lebih banyak beban dari defisit anggaran, mereka akan dilahirkan di negara yang memiliki persediaan modal yang lebih kecil dan utang luar negeri yang lebih besar.

D. Pandangan Richardian atas Hutang Pemerintah

Konsumen melihat ke masa depan sehingga pemotongan pajak dengan sendirinya tidak akan mendorong pengeluaran konsumen yang tinggi untuk masa sekarang. Konsumen mendasarkan pengeluaran tidak hanya pada pendapatan sekarang, tapi juga pada pendapatan masa depan yang mereka harapkan. Pemerintah mendanai pemotongan pajak dengan utang pemerintah, dan di masa depan, pemerintah harus meningkatkan pajak untuk membayar utang dan bunga yang terakumulasi. Pinjaman pemerintah saat ini akan mengakibatkan pajak yang lebih tinggi di masa depan. Pemotongan pajak yang didanai oleh utang pemerintah tidak akan mengurangi beban pajak, pemotongan pajak tersebut hanya menjadwalkan ulang pajak. Konsumen yang melihat ke depan memahami hal tersebut, sehingga pemotongan pajak tidak

mendorong konsumen melakukan pengeluaran lebih banyak. Utang pemerintah ekuivalen dengan pajak masa depan, dan pajak masa depan akan ekuivalen dengan pajak saat ini. Jadi pemerintah mendanai dengan utang adalah ekuivalen dengan pajak, pandangan ini yang disebut ekuivalen ricardian.

E. Perspektif Hutang Pemerintah dalam Ekonomi Konvensional

1. Dampak fiskal terhadap kebijakan moneter

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan untuk mengendalikan keseimbangan makro ekonomi. Kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi sisi permintaan agregat suatu perekonomian dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan ini dapat pula mempengaruhi sisi penawaran yang sifatnya lebih berjangka panjang, melalui peningkatan kapasitas perekonomian. Dalam pengelolaan stabilitas makro ekonomi, kebijakan fiskal akan berinteraksi dengan kebijakan moneter.

Salah satu cara pemerintah untuk mendanai defisit anggaran adalah dengan mencetak uang yang menyebabkan inflasi lebih tinggi. Pembuat kebijakan fiskal mengandalkan pajak inflasi untuk membayar sebagian dari pengeluaran mereka. Tingkat utang yang tinggi mendorong pemerintah menciptakan inflasi, dan sebagian besar utang pemerintah dispesifikasikan dalam bentuk nominal, maka nilai utang riil turun ketika tingkat harga naik. Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi moneter melalui seigniorage. Karena seigniorage (pendapatan dari pencetakan uang) merupakan salah satu sumber penerimaan Pemerintah, maka kebijakan fiskal dan moneter jangka panjang ditentukan secara bersamaan oleh fiskal budget constraint. Weak form mengasumsikan bahwa otoritas fiskal akan bergerak lebih

dahulu dengan menetapkan primary budget surplus/deficit dan kemudian direspons oleh otoritas moneter dengan menciptakan *seigniorage* untuk menjaga *solvency* Pemerintah. Apabila kedua otoritas menolak untuk menciptakan seigniorage maka rasio utang terhadap PDB dapat meningkat secara tidak berkesinambungan. Hal ini selanjutnya akan berdampak pada peningkatan suku bunga riil utang pemerintah seiring dengan peningkatan permintaan premi oleh pasar. Namun demikian proses ini tidak dapat berlanjut. Salah satu dari otoritas kebijakan harus berubah.

2. Kebijakan fiskal dan anggaran berimbang

a. Pemerataan pajak (*Tax Smoothing*)

Tarif pajak tinggi menimbulkan biaya dalam masyarakat dengan menekan aktivitas ekonomi. Karena disinsentif ini akan sangat besar pada tarif pajak tinggi tertentu, jumlah biaya sosial pajak diminimalkan dengan mempertahankan tarif pajak yang relatif stabil bukan membuatnya tinggi dalam beberapa tahun dan rendah di tahun-tahun lainnya. Kebijakan ini disebut *tax smoothing*. Untuk menjaga tarif pajak moderat, defisit diperlukan pada tahun-tahun pendapatan rendah yang tidak biasa atau pengeluaran tinggi yang tidak biasa.

b. Stabilisasi

Defisit atau surplus anggaran bisa membantu menstabilisasi perekonomian. Ketika perekonomian mengalami resesi, pajak secara otomatis turun dan transfer otomatis naik, respon otomatis ini mendorong anggaran menjadi defisit. Aturan anggaran berimbang yang ketat akan meminta pemerintah menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran dalam masa resesi, tetapi akan menekan permintaan agregat.

c. Redistribusi intergenerasi

Defisit atau surplus bisa digunakan untuk menggeser beban pajak dari generasi sekarang ke generasi mendatang. Misal untuk membiayai perang, generasi sekarang bisa mendanai perang dengan defisit anggaran. Pemerintah kemudian bisa melunasi utang dengan mengenakan pajak pada generasi mendatang. Pertimbangan ini menyebabkan sebagian besar ekonom menolak aturan anggaran berimbang yang ketat. Aturan kebijakan fiskal perlu memperhitungkan kondisi-kondisi yang terulang kembali, di mana defisit anggaran merupakan respon kebijakan yang masuk akal.

F. Perspektif Hutang Pemerintah dalam Ekonomi Islam

Dalam Islam terdapat dua pandangan mengenai hutang luar negeri dalam perspektif pembiayaan pembangunan negara. Pandangan pertama memperbolehkan adanya suatu budget deficit yang ditutup dengan external financing, dimana bentuk dan mekanismenya tersebut sudah disesuaikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan/prinsip syariah. Dari adanya fakta historis bahwa bekerjasama dengan pihak lain dalam suatu usaha diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Seperti dengan penggunaan akad mudharabah, musyarakah, muraabahah, dan lain-lain, dapat dikembangkan sebagai bentuk external financing dalam anggaran negara. Dibandingkan dengan hutang, penyertaan modal ini dipandang lebih, konstruktif, proporsional dan adil dalam pembiayaan, karena terdapat pembagian perolehan dan resiko (profit-loss sharing). Kemudian untuk pandangan yang ke dua ialah negara tidak diperbolehkan menutup budget deficit dengan melakukan hutang luar negeri. Karena pada pertimbangan preventif bahwa mekanisme pinjaman hutang luar negeri menggunakan sistem bunga, sedangkan dalam islam, bunga

dalam bentuk apapun baik konsumsi atau produksi dan besar atau kecil secara tegas dilarang.

1. Konsep Hutang dalam Ekonomi Islam

Dalam bahasa Arab, hutang (al-dayn) merupakan sesuatu yang berada dalam tanggung jawab orang lain. Menurut Hanafiyah, dayn termasuk kepada al milk. hutang dapat dikategorikan pada al-Mal al-Hukmi yaitu sesuatu yang dimiliki oleh pemberi hutang, sementara harta itu berada pada orang yang berutang. Sehingga hutang negara adalah milik rakyat dan dipergunakan untuk keperluan rakyat. Selain itu, hutang secara bahasa hutang juga dapat bermakna memberikan pinjaman. Al-dayn mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian hutang, hal ini yang membedakan qardh yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian hutangnya, dayn lebih umum dari qardh. Menurut Alamsyah (2020), di dalam Al-Quran dan hadits, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan agar saling membantu sesama dalam pinjam meminjam serta mengembalikan pinjaman tepat pada waktu yang sudah ditentukan, tentunya dengan mengembalikan pokok yang sudah di pinjam tanpa adanya penambahan yang di syaratkan (riba). Pelarangan atas riba dalam surat Al-Baqarah ayat 275 memiliki arti bahwa uang yang dipinjamkan harus tanpa adanya harapan akan pengembalian yang melebihi jumlah pokoknya. Dalam hal ini setiap peminjam yang menuntut atau menetapkan keuntungan tidaklah bersifat sah. Dalam pelunasan hutang pun harus memerhatikan waktu jatuh tempo yang sudah di berikan. Menurut Imam Malik, hal ini seperti halnya ketika seseorang yang memberikan waktu lebih panjang ketika piutangnya telah jatuh tempo dan menambahkan jumlah hutang (debt reschedulling) kepada debitur yang menjadikannya akad ini tergolong dalam riba.

Konsep hutang sesuai dengan syariat Islam menurut Muhammad Akram Khan adalah salah satu konsep ekonomi Islam dalam bentuk yang lebih tepat ialah Al-qardhul Hassan. hutang piutang dalam bentuk ini dengan dukungan gadai (rahn) dapat digunakan untuk keperluan sosial maupun komersial. Dimana dalam hal ini peminjam mempunyai dua pilihan yaitu, memilih qardhul hassan (menerima pemberi pinjaman) atau penyandang dana (rabb al-mal) sebagai mitra usaha dalam perjanjian mudharabah (Sarwat, 2019: 284). Hukum hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Orang yang memberikan hutangpun kepada orang lain yang sangat membutuhkan ialah hal yang sangat disukai dan dianjurkan. Karena dalam perbuatan tersebut terdapat pahala yang besar sesuai dengan QS Al-Maidah:2.

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya”

2. Prinsip Hutang dalam Islam

Ajaran Islam memperbolehkan hutang karena hutang adalah bagian dari hablun minan naas atau sisi tolong menolong antar sesama manusia sebagaimana tercantum dalam QS Al-Maidah (5):2 dan QS Al -Baqarah (2):245. hutang ialah hal yang diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (Aziz, 2016: 133):

- a. Harus didasari bahwa hutang itu merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal mengalami kebuntuan. Terdapat unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Hal ini merupakan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan mencerminkan semangat membangun kemandirian

dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi akhirnya memilih jalan hutang.

- b. Jika terpaksa berhutang, jangan berhutang di luar kemampuan. Dalam syariah disebut dengan ghalabatid dayn atau terbelit hutang. Ghalabatid dayn ini akan menimbulkan efek yang besar, yaitu qahrir rijal (mudah dikendalikan pihak lain). Oleh karenanya Rasulullah SAW, selalu memanjatkan doa agar beliau senantiasa dilindungi dari penyakit ghalabatid dayn yang menyebabkan harga diri menjadi hilang (Huda, 2012: 260-261).
- c. Jika hutang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya. Harus mempunyai komitmen untuk mengembalikan hutang (Iska, 2012: 179). Memperlambat membayar hutang bagi yang mampu merupakan sebuah kezaliman, sehingga diperbolehkan untuk mempermalukannya. Dalam konteks mikro, akan sangat mudah menerapkan prinsip ini. Misalnya, pengusaha yang tidak mau membayar hutang boleh saja dipermalukan dengan cara menyita asetnya, serta dilarang berpergian ke luar negeri atau menghukum dengan hukuman yang berat.

3. Pembiayaan yang berasal dari hutang menurut Islam

Keuangan negara kebanyakan menganut sistem budget deficit. Untuk mengatasi budget deficit yang biasa dilakukan ialah dengan meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dan atau meminjam dana baik dari masyarakat atau pihak lain melalui obligasi atau hutang luar negeri. Tentu hal ini berbeda dengan sistem awal pemerintahan Islam yang lebih menggunakan sistem tradisional. Konsep ini tidak serumit sistem anggaran modern sehingga secara sederhana konsep ini adalah konsep berimbang dalam pengertian pengeluaran dan penerimaan negara adalah sama. Pada era pemerintahan

Rasulullah dan khulafaurrasyidin, APBN jarang sekali mengalami budget deficit. Hal ini dikarenakan para pemimpin memegang prinsip bahwa pengeluaran hanya boleh dilakukan apabila ada penerimaan. Hanya terjadi sekali budget deficit yaitu sebelum Perang Hunain, sebelum Fathu Makkah karena banyak orang masuk Islam sehingga pengeluaran zakat lebih besar dari penerimaannya. Hutang tersebut segera dilunasi setelah perang atau setahun kemudian (Huda, 2016). Secara bahasa al-qardh berarti al-qoth' (terputus). Harta yang ditanyakan kepada pihak lain/orang lain dinamakan qardh karena ia terputus dari pemiliknya (Haroen, 2000). Adapun yang dimaksud dengan hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian orang tersebut akan membayar yang sama dengan apa yang dia pinjam dari orang lain (Basri, 2003).

Hutang piutang merupakan salah satu mu'amalah dalam bentuk ta'awun (pertolongan) kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini. Disyaratkan untuk sahnya pemberian hutang ini bahwa pemberi hutang adalah orang yang boleh mengeluarkan sedekah. Maka, seorang wali (pengasuh) anak yatim tidak boleh memberikan hutang dari harta anak yatim yang ia asuh tersebut. Disyaratkan juga diketahuinya jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan, agar dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Dengan demikian, piutang tersebut menjadi hutang di tangan orang yang meminjam, dan ia wajib mengembalikannya ketika mampu dengan tanpa menundanya. Adanya pengajuan hutang negara Indonesia untuk pembangunan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tujuan untuk pertumbuhan ekonomi daerah sebagai wacanan pertumbuhan ekonomi daerah dari segi pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan. Tahun 1997 negara Indonesia sudah memiliki Hutang Luar Negeri dari tahun ke tahun

Hutang Negara Indonesia semakin bertambah yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat akibat adanya pembangunan sarana dan prasarana, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

G. Ikhtisar

1. Hutang merupakan bagian dari kebijakan fiskal yang digunakan sebagai salah satu bentuk pembiayaan ketika APBN mengalami defisit dan untuk membayar kembali utang yang jatuh tempo (*debt refinancing*).
2. Pemerintah Indonesia menempuh kebijakan fiskal ekspansif untuk menstimulasi perekonomian domestik di tengah ketidakpastian perekonomian global. Konsekuensi dari kebijakan tersebut adalah meningkatnya penggunaan instrumen utang untuk menutup defisit anggaran
3. Pandangan tradisional atas hutang pemerintah adalah terdapat trade-off antara hutang pemerintah dengan pengurangan pajak. Ketika pemerintah mengurangi pajak dengan melaksanakan kebijakan deficit anggaran, maka konsumen akan merespon dengan melakukan pengeluaran yang lebih banyak dan diikuti dengan peningkatan investasi
4. Pandangan Richardian atas hutang pemerintah ialah Pemerintah mendanai pemotongan pajak dengan utang pemerintah, dan di masa depan, pemerintah harus meningkatkan pajak untuk membayar utang dan bunga yang terakumulasi.
5. Menurut ekonomi Islam, utang piutang merupakan salah satu mu'amalah dalam bentuk ta'awun (pertolongan) kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam sangat kuat menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini.

H. Pertanyaan dan Diskusi

1. Jelaskan bagaimana proses penciptaan uang dan siapa sajakah yang terlihat dalam proses tersebut?
2. Jelaskan perbedaan pandangan tradisional dan pandangan Richardian terhadap hutang pemerintah!
3. Bagaimana pandangan Islam tentang hutang pemerintah?
4. Bagaimana kondisi hutang pemerintah Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini? Jelaskan dengan menggunakan data
5. Bagaimana strategi pemerintah dalam mengurangi hutang ?

BAB X

ANALISIS IS-LM

A. Rencana Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu memahami konsep pasar barang, pasar uang dan penerapannya dalam analisis IS-LM.

B. Konsep Dasar Pasar Barang dan Pasar Uang

Keseimbangan AD-AS diturunkan dari keseimbangan pasar barang (sektor riil) dan keseimbangan pasar uang (sektor moneter), Oleh karena itu, keseimbangan AD-AS seringkali disebut juga keseimbangan IS-LM. Beberapa hal yang menjadi nilai tambah dalam model IS-LM adalah adanya mekanisme pasar uang dan tingkat bunga bekerja dan tujuan yang dapat dicapai dalam mempelajarinya ialah:

- 1) menunjukkan bagaimana kebijaksanaan moneter bekerja,
- 2) mengetahui bahwa pengeluaran autonomous dan kebijakan fiskal merupakan submodel permintaan agregat dan keseimbangan pendapatan. Kebijakan fiskal ekspansif dapat meningkatkan pendapatan dan pengeluaran pemerintah,

- 3) perubahan tingkat bunga berdampak pada komposisi permintaan agregat pada tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi.

Dalam analisis ekonomi di pasar barang (sektor riil), sisi penawaran mendeskripsikan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa dalam suatu periode tertentu sedangkan sisi permintaan menggambarkan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi makro seperti sector rumah tangga konsumen, produsen, pemerintah, dan ekspor impor sehingga dapat dilihat kondisi perekonomian dari keseimbangan penawaran dan permintaan komoditi di pasar tersebut.

Terdapat hubungan negatif antara tingkat suku bunga dan investasi. Konsep dasar analisis *Invest Saving* (IS) berdasarkan pada besarnya investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Secara sederhana hubungan fungsional negative antara tingkat investasi (I) dan tingkat suku bunga (r) dapat dinotasikan dengan $I=f(r)$ di mana I ialah tingkat investasi per tahun yang dinyatakan dalam satuan mata uang sedangkan r ialah tingkat suku bunga yang dinyatakan dengan satuan persen.

Konsep dasar keseimbangan di pasar uang (pasar asset) menunjukkan interaksi antara permintaan pasar uang dan penawaran uang. Fungsi dan kurva *Liquidity of Money* (LM) merupakan hubungan positif antara tingkat bunga dan pendapatan nasional yang terjadi di pasar uang. Semakin tinggi tingkat pendapatan terhadap keseimbangan riil, maka semakin tinggi tingkat bunga keseimbangan. Kebutuhan uang oleh masyarakat tercermin dalam permintaan uang dan jumlah uang beredar oleh karena itu pasar uang termasuk ke dalam sector moneter. Dalam konsep keseimbangan pasar uang, dari sisi permintaan uang akan dikaji berapa besar permintaan

uang masyarakat untuk kebutuhan transaksi, spekulasi, berjaga-jaga berdasarkan tingkat pendapatan dan tingkat bunga. Sedangkan dari sisi penawaran akan dilihat berapa banyak jumlah uang yang dapat disediakan oleh otoritas moneter yang didasarkan pada kondisi perekonomian suatu negara.

C. Kurva IS dan Pasar Barang

Struktur perekonomian menjadi dua, yaitu perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Perekonomian tertutup merupakan bentuk perekonomian dengan tidak melakukan transaksi dengan pihak luar negeri, dan perekonomian terbuka merupakan perekonomian telah melakukan transaksi dengan pihak luar negeri. Variabel-variabel ekonomi agregat yang perlu diperhatikan pada masing-masing struktur perekonomian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Variabel-variabel dalam perekonomian tertutup : C, S, I, G, Y.

Persamaan keseimbangan di pasar barang : $Y = C + I + G$;
 $S = I$.

Di mana :

C = pengeluaran untuk konsumsi

S = saving atau tabungan

I = pengeluaran untuk investasi

G = pengeluaran pemerintah

Y = pendapatan nasional.

- b. Variabel-variabel dalam perekonomian tertutup dengan kebijakan fiskal: C,S,I,G,Y,Tx,Tr

Keseimbangan di pasar barang : $Y = C + I + G$; $YD = Y + Tr - Tx$; $Y = YD - Tr + Tx$; $YD = C + S \rightarrow I + G + Tr = S + Tx$
di mana:

T_x = pajak

T_r = transfer pemerintah

- c. Variabel-variabel dalam perekonomian terbuka :
 C, S, I, G, Y, X, M

Keseimbangan di pasar barang : $Y = C + I + G + X - M$

di mana:

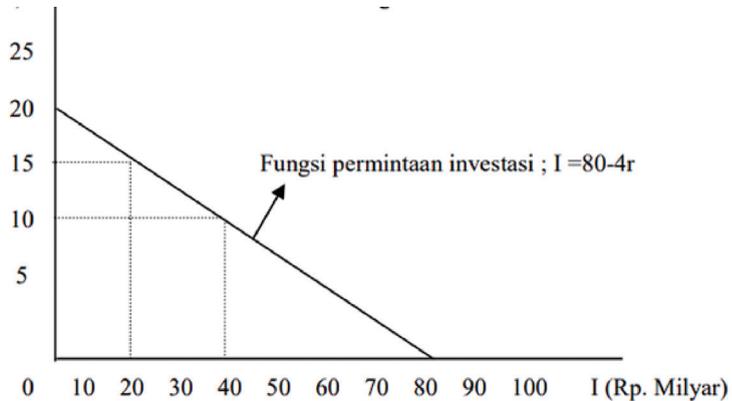
X = ekspor

M = impor

- d. Variabel-variabel dalam perekonomian terbuka dengan kebijakan fiskal: $C, S, I, G, Y, X, M, T_x, T_r$.
- e. Keseimbangan di pasar barang : $YD = C + I + G - T_x + T_r + X - M$.

1. Pengeluaran Investasi dalam model IS-LM

Analisis ekonomi yang hanya memperhatikan pasar barang saja, pada umumnya investasi (I) diperlakukan sebagai variabel eksogen. Namun, dalam model IS-LM, investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga atau dapat ditulis $I = f(r)$, dimana $\partial I / \partial r < 0$. Jadi, investasi (I) merupakan variabel endogen (= variabel-variabel yang ditentukan oleh variabel-variabel yang ada didalam model yang digunakan). Sebagai contoh fungsi investasi $I = 80 - 4r$, dimana I = jumlah investasi per-tahun dalam milyar rupiah dan r = tingkat bunga dalam persen per tahun. Dari persamaan tersebut dapat dihitung, jika tingkat bunga yang berlaku adalah 15% maka jumlah investasi adalah Rp. 20 milyar, jika tingkat bunga turun menjadi 10% maka investasi akan menjadi Rp. 40 milyar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika tingkat bunga turun, investasi cenderung meningkat dan sebaliknya jika tingkat bunga naik, investasi cenderung menurun. Secara grafis, fungsi investasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 10.1. kurva Fungsi Permintaan

2. Fungsi Saving dan Fungsi Konsumsi

Karena fungsi investasi sangat berkaitan erat dengan fungsi saving dan fungsi konsumsi maka kedua fungsi ini perlu dibahas dalam rangka menurunkan fungsi IS. Pada umumnya fungsi konsumsi diasumsikan mempunyai persamaan seperti berikut :

$$C = a + cY \quad (10.1)$$

di mana:

a = besarnya pengeluaran konsumsi pada pendapatan nasional sebesar nol;

c = $\partial C / \partial Y = MPC = \text{marginal propensity to consume}$.

Saving adalah bagian pendapatan yang tidak dikonsumsi maka fungsi saving dapat di tulis :

$$S = -a + sY \quad (10.2)$$

Di mana:

-a = besarnya tabungan pada pendapatan nasional sebesar nol; s = $\partial S / \partial Y = MPS = \text{marginal propensity to save}$

Nilai $s = 1-c$.

Sebagai contoh, jika terdapat persamaan fungsi konsumsi : $C = 40 + 0,6Y$, dalam milyar rupiah, maka perekonomian ini mempunyai persamaan saving $S = -40 + 0,4Y$.

3. Investasi - Saving (IS)

Kurva IS adalah kurva yang menghubungkan tingkat-tingkat pendapatan nasional dengan berbagai tingkat bunga di mana dipenuhi syarat keseimbangan di pasar barang. Dalam analisis IS-LM perekonomian tertutup, investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga (r), maka variabel tingkat bunga ini perlu ditambahkan dalam keempat variabel tersebut. Setelah variabel-variabel yang diperlukan dapat ditentukan, langkah selanjutnya adalah menurunkan fungsi IS sebagai berikut:

Menetapkan syarat keseimbangan di pasar barang:

$$S = I \quad (a) \quad (10.3)$$

Syarat ini dapat pula dipenuhi dengan :

$$Y = C + I \quad (b) \quad (10.4)$$

Jika fungsi konsumsi dan fungsi investasi masing-masing adalah : $C = a + cY$, di mana $0 < c < 1$, dan

$$I = b + ir, \text{ di mana } i < 0.$$

Maka diperoleh :

$$Y = C + I = (a + cY) + (b + ir) = a + cY + b + ir$$

$$Y - cY = a + b + ir$$

$$(1-c)Y = a + b + ir$$

$$Y = \frac{a + b + ir}{1 - c} \dots\dots\dots \text{(fungsi IS) (c)} \quad (10.5)$$

Contoh :

Suatu perekonomian mempunyai fungsi konsumsi dan fungsi Investasi sebagai berikut:

Fungsi Konsumsi : $C = 40 + 0,6Y$ (dalam milyar rupiah)

Fungsi Investasi : $I = 80 - 4r$

Berdasarkan fungsi-fungsi tersebut akan diperoleh fungsi IS :

a) Menggunakan rumus b)

$$Y = C + I \quad Y = 40 + 0,6Y + 80 - 4r$$

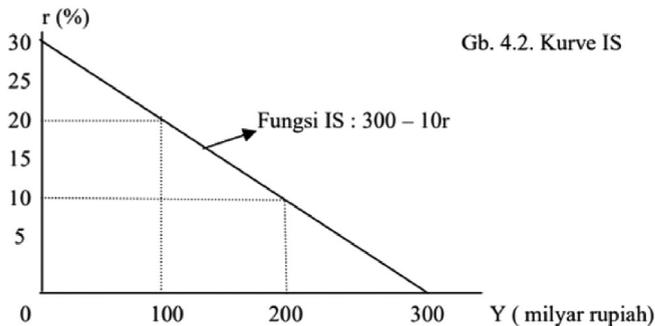
$$0,4Y = 120 - 4r$$

$$Y = 300 - 10r$$

b) Menggunakan rumus c)

$$Y = \frac{a + b + ir}{1 - c} = \frac{40 + 80 + (-4r)}{1 - 0,6} = \frac{120 - 4r}{0,4} \\ = 300 - 10r$$

Secara grafis, fungsi IS tersebut dapat digambarkan seperti pada kurva di bawah ini:



Gambar 10.2. Kurva Fungsi IS

Dari kurva tersebut dapat dinyatakan bahwa dengan menurunnya tingkat bunga tingkat pendapatan nasional riil yang memenuhi syarat keseimbangan di pasar barang meningkat. Pada tingkat bunga 20% tingkat pendapatan nasional

yang memenuhi syarat keseimbangan di pasar barang adalah 100 milyar rupiah. Jika tingkat bunga menurun menjadi 10% maka tingkat pendapatan nasional yang memenuhi syarat keseimbangan di pasar barang berubah menjadi 200 milyar rupiah.

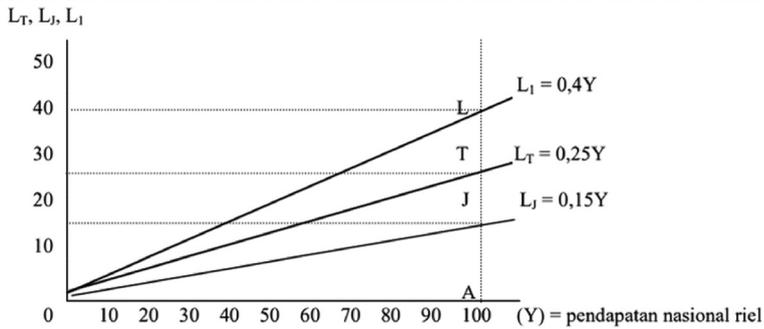
D. Kurva LM dan Pasar Uang

Menurut Keynes, kebutuhan masyarakat akan uang didasari oleh tiga motif, yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Menurut Keynes, mekanisme pasar tidak secara otomatis menjamin kondisi full employment dalam perekonomian sehingga perlunya campur tangan pemerintah dalam mekanisme penyesuaian sektor moneter dan mekanisme transmisi ekonomi.

Menurut Hanani (2004), dalam pembentukan fungsi dan kurva LM dalam pasar uang, maka diperlukan motif-motif masyarakat dalam memegang uang.

1. Motif transaksi dan Motif berjaga-jaga

Kebutuhan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Jika kebutuhan uang untuk transaksi diberi simbol LT dan kebutuhan uang untuk berjaga-jaga diberi simbol LJ maka secara matematis dapat ditulis $LT = f(Y)$ dan $LJ = g(Y)$. Walaupun pada kenyataannya fungsi permintaan uang agregat untuk transaksi dan berjaga-jaga tidak dalam bentuk linear, namun untuk menghindari perhitungan yang rumit dalam bahasan ini diambil contoh fungsi permintaan uang agregat tersebut dalam bentuk linear. Misalnya, permintaan uang agregat untuk transaksi mempunyai persamaan fungsi $LT = 0,25 Y$ dan untuk berjaga-jaga mempunyai persamaan $LJ = 0,15 Y$ maka dapat digambarkan dalam bentuk kurve sebagai berikut:



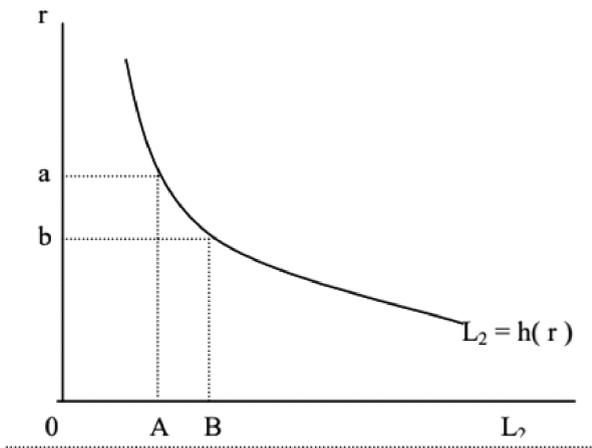
Gambar 10.3 Kurva Permintaan Uang untuk Transaksi dan Berjaga-jaga

Permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dapat ditulis menjadi $L_1 = L_T + L_J = 0,25Y + 0,15Y = 0,4Y$. Dengan demikian bentuk umum L_1 dapat ditulis $L_1 = k_1(Y)$, dimana $k_1 = \partial L_1 / \partial Y$. Pada gambar di atas terlihat bahwa kurva L_1 memiliki sudut k_1 yang merupakan penjumlahan sudut kurve permintaan uang untuk transaksi dan sudut kurvea permintaan uang untuk berjagajaga. Terlihat pula $AL = AJ + AT$, dimana $AL =$ permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, $AJ =$ permintaan uang untuk berjaga-jaga, dan $AT =$ permintaan uang untuk transaksi.

2. Motif spekulasi

Permintaan uang untuk spekulasi dapat diartikan sebagai permintaan uang untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu permintaan uang tersebut ditentukan oleh tingkat bunga. Meningkatnya tingkat bunga menyebabkan kecenderungan menurunnya permintaan uang untuk spekulasi dan sebaliknya menurunnya tingkat bunga mengakibatkan meningkatnya permintaan uang untuk spekulasi. Dengan demikian secara matematis, jika permintaan uang untuk spekulasi diberi simbol L_2 maka dapat ditulis $L_2 = h(r)$, di mana $\partial L_2 / \partial r < 0$. Fungsi permintaan uang untuk

spekulasi ini dapat digambar dalam bentuk kurve sebagai berikut:



Gambar 10.4. Kurva Permintaan Uang dengan Motif Spekulasi

Kurva di atas menunjukkan bahwa jika tingkat bunga $=0a$ maka permintaan uang untuk spekulasi $=0A$, jika tingkat bunga $0b$ maka permintaan uang untuk spekulasi menjadi $0B$.

3. Liquidity-Money (LM)

Kurva atau fungsi LM adalah kurva atau fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat-tingkat pendapatan nasional dengan berbagai kemungkinan tingkat bunga yang memenuhi syarat ekuilibriumnya pasar uang. Syarat ekuilibrium pada pasar uang adalah terpenuhinya kesamaan antara permintaan uang agregat dan penawaran uang agregat. Berdasarkan bahasan diatas, berarti syarat ekuilibrium tersebut dapat ditulis : $MS = L$, di mana MS = penawaran uang agregat dan L = permintaan uang agregat. Sebagaimana diketahui $L = L1 + L2$, di mana $L1 = LT + LJ$. Oleh karena $L1 = L1(Y)$ dan $L2 = L2(r)$ maka $L = L1(Y) + L2(r)$ atau $L = L(Y, r)$. Dengan demikian syarat ekuilibrium di pasar uang dapat ditulis $MS = L(Y,r)$ dengan ketentuan sebagai brikut:

- Jumlah uang yang beredar (penawaran uang) : $M_s = M$
- Permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga : $L_1 = K_1(Y)$
- Permintaan uang untuk spekulasi : $L_2 = K_2(r) + L_2^0$

maka $M = K_1 Y + K_2 r + L_2^0 \rightarrow$ model ekuilibrium di pasar uang. Jika persamaan ini diselesaikan untuk nilai Y maka akan diperoleh fungsi LM sebagai berikut:

$$K_1 Y = M - K_2 r - L_2^0 \quad \rightarrow \quad Y = \frac{M}{k_1} - \frac{L_2^0}{k_1} - \frac{k_2}{k_1} r$$

(persamaan fungsi LM)

Untuk menunjukkan penerapan dari fungsi LM tersebut, berikut ini diberikan contoh sederhana. Misalnya, sebuah perekonomian mempunyai data sebagai berikut:

- Jumlah uang yang beredar (penawaran uang) : $M = 200$ milyar rupiah
- Permintaan uang untuk transaksi (milyar Rp.) : $L_r = 0,25 Y$
- Permintaan uang untuk berjaga-jaga (milyar Rp.) : $L_j = 0,15 Y$
- Permintaan uang untuk spekulasi (milyar Rp.) : $L_2 = 160 - 4r$.

Atas dasar data di atas persamaan fungsi LM dapat ditemukan dengan dua cara :

- Menggunakan rumus $M = K_1 Y + K_2 r + L_2^0$:

$$200 = 0,4Y + 160 - 4r$$

$$0,4Y = 200 - 160 + 4r$$

$$Y = 100 + 10r$$

- Menggunakan rumus :

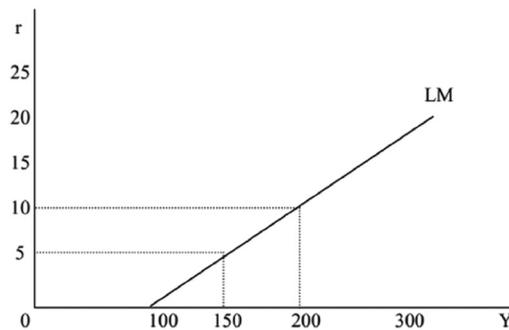
$$Y = \frac{M}{k_1} - \frac{L_2^0}{k_1} - \frac{k_2}{k_1} r$$

$$Y = \frac{200}{0,4} - \frac{160}{0,4} - \frac{-4}{0,4} r$$

$$Y = 500 - 400 + 10 r$$

$$Y = 100 + 10r$$

Persamaan fungsi tersebut dapat digambar dalam bentuk grafik seperti pada gambar kurva di bawah ini. Pada gambar tersebut terlihat jika tingkat bunga naik maka tingkat pendapatan nasional juga naik



Gambar 10.5 Kurva LM

E. Keseimbangan Umum IS-LM

Keseluruhan bagian dari model IS - LM dapat disimpulkan sebagai berikut:

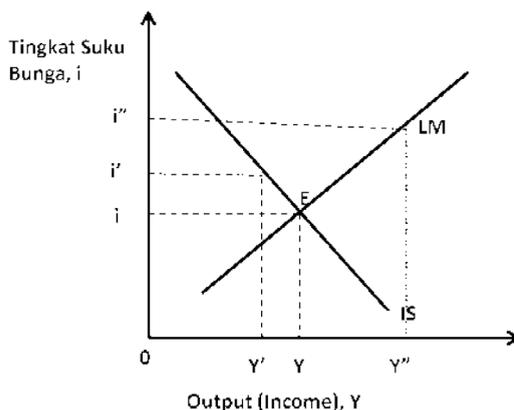
$$Y = C(Y-T)+I(r) +G \rightarrow IS$$

$$M/P = L(r,Y) \rightarrow LM$$

Keseimbangan IS - LM dapat diterapkan pada model perekonomian 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Pada model perekonomian 2 sektor hanya ada fungsi konsumsi (C) dan investasi (I). Pada model perekonomian 3 sektor selain fungsi konsumsi (C) dan investasi juga dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah (G). Sedangkan pada model 4 sektor ditambah ekspor (X) dan impor (M). Oleh karena itu, kese-

imbangan perekonomian adalah titik di mana kurva IS dan LM berpotongan. Titik ini memberikan tingkat bunga r dan tingkat pendapatan Y yang memenuhi kondisi untuk keseimbangan baik dalam pasar barang maupun pasar uang.

1. Grafik Keseimbangan IS-LM



Gambar 10.6 Grafik Keseimbangan IS-LM

Keseimbangan di pasar barang menunjukkan bahwa peningkatan tingkat suku bunga $0i'$ ke $0i''$ akan mendorong terjadinya penurunan output dari $0Y$ ke $0Y'$. Keseimbangan di pasar uang menunjukkan bahwa peningkatan output $0Y$ ke $0Y''$ akan mendorong peningkatan tingkat suku bunga $0i$ ke $0i''$. Ketika kurva IS berpotongan dengan kurva LM maka akan terjadi keseimbangan.

2. Penerapan IS-LM dalam Perekonomian Model 2 Sektor

Diketahui:

$$C = 100 + 0,75Y$$

$$I = 60 - 200i$$

$$M_s = 500$$

$$M_d = 0,2Y + 428 - 400i$$

Ditanya :

1. Keseimbangan pasar barang
2. Keseimbangan pasar uang
3. Keseimbangan umum IS - LM

Jawab:

Keseimbangan pasar barang

$$Y = C + I$$

$$Y = 100 + 0,75Y + 60 - 200i$$

$$Y - 0,75Y = 160 - 200i$$

$$0,25Y = 160 - 200i$$

$$Y = 640 - 800i$$

Keseimbangan pasar uang

$$M_s = M_d$$

$$500 = 0,2Y + 428 - 400i$$

$$0,2Y = 72 - 400i$$

$$Y = 360 - 2000i$$

Keseimbangan Umum

$$IS = LM$$

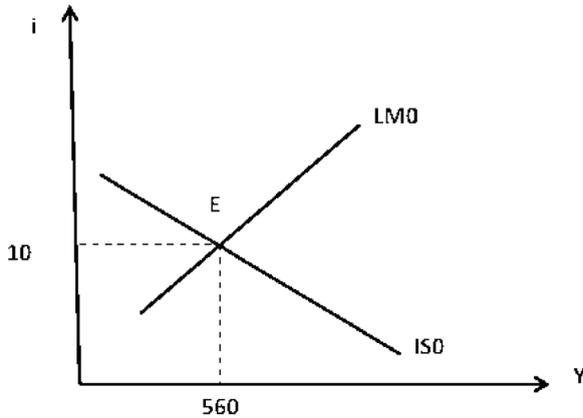
$$640 - 800i = 360 + 2000i$$

$$2800i = 280$$

$$i = 0,1 \text{ atau } 10\%$$

$$Y = 640 - 800(0,1)$$

$$Y = 560$$



Gambar 10.7 Kurva Keseimbangan IS-LM Model 2 Sektor

Jadi pada keseimbangan umum, tingkat bunga keseimbangan adalah 10% dan tingkat pendapatan nasional keseimbangan adalah 560

3. Penerapan IS-LM dalam Perekonomian Model 3 Sektor

Diketahui:

$$C = 100 + 0,75Y$$

$$I = 60 - 200i$$

$$G = 20$$

$$i = 10\%$$

$$M_s = 500$$

$$M_d = 0,2Y + 428 - 400i$$

Ditanya :

1. Keseimbangan pasar barang
2. Keseimbangan pasar uang
3. Keseimbangan umum IS - LM

Jawab:

$$Y = C + I + G$$

$$Y = 100 + 0,75Y + 60 - 200i + 20$$

$$Y - 0,75Y = 180 + 200i \quad 0,25Y = 180 + 200i$$

$$Y = 720 + 800i$$

Apabila kurva LM tetap maka keseimbangan umum menjadi:

$$IS = LM$$

$$720 + 800i = 360 + 2000i$$

$$2800i = 360$$

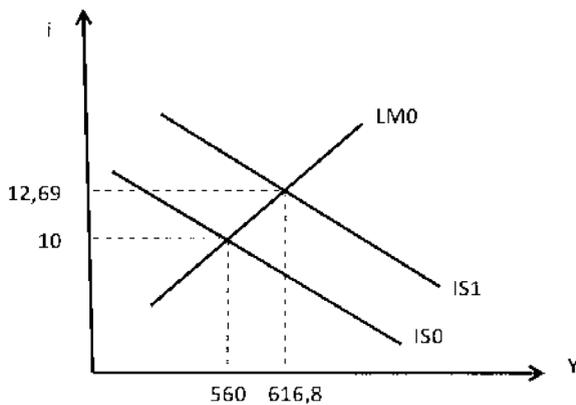
$$i = 0,129$$

$$Y = 720 + 800i$$

$$Y = 720 + 800(0,129)$$

$$Y = 720 + 103,2$$

$$Y = 823,2$$

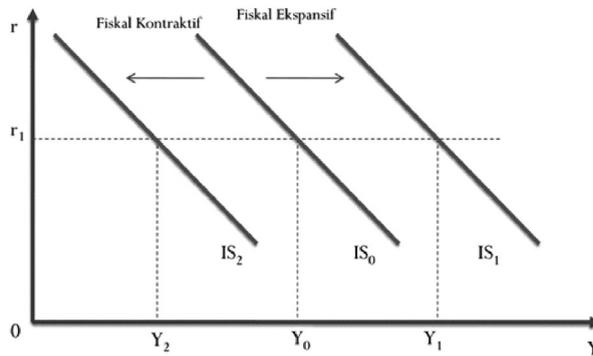


Gambar 10.8 Kurva Penerapan IS-LM dalam Perekonomian Model 3 Sektor

Naiknya pengeluaran pemerintah sebesar 20, menyebabkan tingkat bunga keseimbangan naik menjadi 12,9% dan pendapatan nasional keseimbangan naik menjadi 616,8

4. Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Keseimbangan Pasar Barang

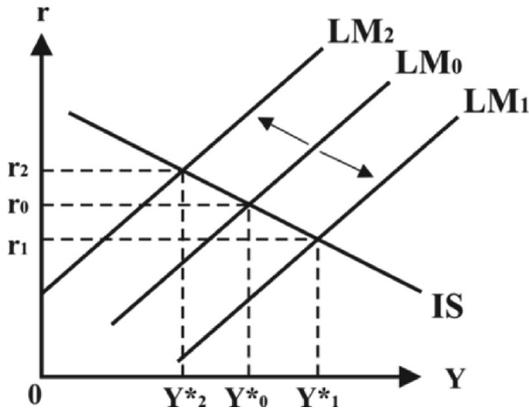
Dampak pengeluaran pemerintah yang ekspansif (fiskal ekspansif) menyebabkan kurva IS bergeser ke kanan. Pada tingkat bunga yang sama (r_1), pergeseran kurva tersebut menyebabkan output keseimbangan bergeser dari Y_0 ke Y_1 . Sebaliknya dampak anggaran defisit (fiskal kontraktif) menyebabkan kurva bergeser ke kiri.



Gambar 10.9 Kurva Dampak Kebijakan Fiskal terhadap Keseimbangan Pasar Barang

5. Dampak Kebijakan Moneter terhadap Keseimbangan Pasar Uang

Kontraksi moneter atau pengetatan moneter berhubungan dengan penurunan penawaran uang. Ketika terjadi peningkatan penawaran uang tersebut disebut juga sebagai ekspansi moneter. Kebijakan moneter tidak mempengaruhi kurva IS, tetapi hanya mempengaruhi kurva LM. Misalnya, ketika terjadi peningkatan penawaran uang, kurva LM akan bergeser ke bawah.



Gambar 10.10 KURVA Dampak Kebijakan Moneter terhadap Keseimbangan Pasar Uang

F. Ikhtisar

1. Keseimbangan AD-AS diturunkan dari keseimbangan pasar barang (sektor riil) dan keseimbangan pasar uang (sektor moneter), Oleh karena itu, keseimbangan AD-AS seringkali disebut juga keseimbangan IS-LM.
2. Terdapat hubungan negatif antara tingkat suku bunga dan investasi. Konsep dasar analisis Invest Saving (IS) berdasarkan pada besarnya investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.
3. Fungsi dan kurva *Liquidity of Money (LM)* merupakan hubungan positif antara tingkat bunga dan pendapatan nasional yang terjadi di pasar uang. Semakin tinggi tingkat pendapatan terhadap keseimbangan riil, maka semakin tinggi tingkat bunga keseimbangan
4. Kebutuhan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan
5. Mekanisme pasar tidak secara otomatis menjamin kondisi full employment dalam perekonomian sehingga perlunya campur tangan pemerintah dalam mekanisme

penyesuaian sektor moneter dan mekanisme transmisi ekonomi.

6. Kurva atau fungsi LM adalah kurva atau fungsi yang menunjukkan hubungan antara tingkat-tingkat pendapatan nasional dengan berbagai kemungkinan tingkat bunga yang memenuhi syarat ekuilibriumnya pasar uang
7. keseimbangan perekonomian adalah titik di mana kurva IS dan LM berpotongan. Titik ini memberikan tingkat bunga r dan tingkat pendapatan Y yang memenuhi kondisi untuk keseimbangan baik dalam pasar barang maupun pasar uang.

G. Pertanyaan dan Diskusi

1. Diketahui:

$$C = 100 + 0,5Y$$

$$I = 80 - 4r$$

$$M_s = 250$$

$$M_d = 0,25Y + 70 - 4r$$

Carilah:

- a. Keseimbangan IS-LM
 - b. Tentukan tingkat suku bunga (r)
2. Diketahui besarnya konsumsi masyarakat: $40 + 0,6Y$ dan investasi sebesar $80 - 4i$, sedangkan besarnya penawaran uang adalah 200 dengan permintaan uang untuk transaksi sebesar $0,2Y$, berjaga-jaga sebesar $0,3Y$ dan uang untuk spekulasi $160 - 4i$. Dari data tersebut, maka:

- a. Tentukan keseimbangan pasar uang dan barang!
 - b. Apabila penawaran uang berubah menjadi 500, bagaimana keseimbangan pasar barang dan uang yang baru?
 - c. Berapakah besarnya tingkat suku bunga keseimbangan?
3. Jelaskan konsep IS-LM menurut pemahaman anda
 4. Diketahui : Jumlah uang yang beredar adalah 650. Permintaan uang untuk transaksi dan berjaga - jaga adalah $M1 = 0,25Y$. Permintaan uang untuk spekulasi adalah $M2 = 400-50i$. Tentukan keseimbangan di pasar uang
 5. Diketahui besarnya konsumsi masyarakat $400 + 0.75Y$ dan investasi $1000 - 500i$ sedangkan besarnya penawaran uang : 2000 dan permintaan uang untuk transaksi berjaga-jaga $1000 + 0,5Y - 5000i$. Berapa besar pendapatan nasional keseimbangan di pasar barang dan pasar uang?

BAB XI

PERTUMBUHAN EKONOMI

A. Rencana Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu memahami konsep pertumbuhan ekonomi termasuk di dalamnya teori-teori yang menjadi dasar pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, dan keterkaitan pertumbuhan ekonomi dengan inflasi.

B. Konsep Dasar Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan dan target utama dalam penerapan kebijakan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh stok kapital, tenaga kerja dan teknologi yang bersifat eksogen. Pemerintah dapat mempengaruhi pertumbuhan populasi yang akan mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja namun tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara itu berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyatnya yang turut menjadi tolak ukur apakah suatu negara berada dalam kondisi perekonomian yang baik atau tidak. Salah satu cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan perhitungan pada Pendapatan Nasional.

C. Teori Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Ekonomi Klasik

Teori pertumbuhan klasik menganggap pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menurun dengan bertambahnya populasi dan sumber daya yang semakin terbatas. Para ekonom teori ini berpendapat bahwa kenaikan sementara PDB riil per orang pasti akan menyebabkan ledakan populasi. Hal itu bisa membuat sumber daya suatu negara akan semakin merosot, yang akhirnya menurunkan nilai PDB riil dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

1. Adam Smith

Salah satu teori pertumbuhan ekonomi tertua yang telah ada sejak abad ke-18 adalah teori klasik. Adam Smith, tokoh terkemuka yang kerap dikaitkan dengan teori ini memiliki anggapan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan dapat meraih titik tertinggi melalui sistem liberal. Sistem tersebut terdiri dari dua unsur utama, yakni pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output. Negara X mempunyai sedikit penduduk, dan negara Y mempunyai lebih banyak penduduk. Kebutuhan hidup masyarakat di negara X lebih sedikit, sehingga tidak menciptakan permintaan barang/jasa yang banyak dan beragam di pasar. Hal ini menyebabkan pekerjaan penduduk di negara X hanya seputar kebutuhan dasar. Lain dengan negara Y yang memiliki penduduk dengan jumlah jauh lebih banyak, kebutuhan penduduk yang lebih banyak menciptakan permintaan barang/jasa yang lebih banyak dan beragam juga. Hal ini tentunya mendorong adanya diversifikasi dan spesialisasi peran, sehingga semakin banyak barang/jasa yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan penduduknya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Y. Inilah yang membuat Adam Smith berpikir bahwa per-

tambahan penduduk yang tinggi, secara tidak langsung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Meski demikian, konsep awal teori ini mendapatkan tentangan dari tokoh lainnya, David Ricardo. Ia beranggapan bahwa pertumbuhan penduduk sebenarnya tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, hal itu hanya akan membuat tenaga kerja produktif bertambah banyak sehingga dapat berdampak pada penurunan upah pekerja.

2. David Richardo

David Ricardo berpendapat jika pertumbuhan penduduk terlalu besar, maka tenaga kerja akan melimpah, dan akan terjadi penurunan upah, sehingga perekonomian menjadi stagnan. Contoh teori Richardo dimisalkan negara X, upah tenaga kerja relatif lebih rendah dibandingkan dengan di Australia Utara. Hal ini dikarenakan Tiongkok memiliki jauh lebih banyak penduduk dibandingkan Australia Utara. Sehingga lebih mudah untuk mencari tenaga kerja di Tiongkok yang mengakibatkan upah menjadi lebih murah. Begitu juga sebaliknya, karena di Australia Utara susah mencari tenaga kerja dikarenakan jumlah penduduk yang sedikit, tenaga kerja di Australia Utara maka, upahnya tergolong tinggi. Itulah mengapa teori David Richardo ini lebih menekankan pada pertumbuhan penduduknya.

3. Thomas Robert Malthus

Menurut pendapat Malthus, pertumbuhan penduduk yang besar akan menyebabkan krisis pangan, sehingga akan terjadi kelangkaan makanan. Pertumbuhan pangan seperti deret hitung, yakni 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya dan penduduk itu tumbuh seperti deret ukur, yakni 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Pertumbuhan yang tidak imbang ini antara pangan dan penduduk pada akhirnya akan

menimbulkan krisis pangan. Karena tidak semua orang dapat mengakses pangan, sehingga harga pangan pun mengalami lonjakan peningkatan.

2. Teori Ekonomi Neo Klasik

Teori Pertumbuhan Neoklasik adalah model pertumbuhan ekonomi yang menguraikan bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi bisa stabil hanya jika tiga kekuatan ekonomi ikut bermain: tenaga kerja; modal; dan teknologi.

1. Harrod-Domar

Menurut R. F. Harrod dan Evsey Domar, pentingnya pembentukan modal atau investasi sebagai syarat mencapai pertumbuhan ekonomi yang kokoh (*steady growth*). Bila pembentukan modal telah dilakukan, perekonomian diprediksi dapat memproduksi barang-barang dalam jumlah yang lebih besar. Teori Harrod Domar menyatakan bahwa sumber pertumbuhan adalah besarnya porsi pendapatan domestik bruto (PDB) yang ditabung, sebagai *capital stock* untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara.

2. Schumpeter

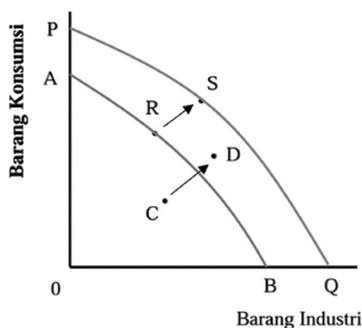
Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurship*). Teori ini menekankan pada inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha, yang mana kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan masyarakat yang mampu melihat peluang untuk membuka usaha baru maupun memperluas usaha yang telah ada. Dengan pembukaan usaha baru dan perluasan usaha, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya.

3. Robert Solow

Tingkat tabungan dapat menentukan modal dalam proses produksi dalam jangka panjang. Semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi pula modal dan output yang dihasilkan. Solow juga berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah rangkaian kegiatan dengan empat faktor utama yaitu manusia, akumulasi modal, teknologi modern dan hasil (output).

4. Kuznet

Kuznet menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar hanya akan menyebabkan kekurangan pangan terlebih apabila tidak ditunjang oleh pengolahan sumber daya alam yang baik. Kurva ini menggambarkan batas produksi yang paling efisien yang dapat diproduksi oleh suatu perekonomian



Gambar 11.1 Kurva Pertumbuhan Kuznet

Di satu titik kurva pertumbuhan ekonomi akan menurun apabila sumber daya manusia terlalu banyak. Hal ini menyebabkan perekonomian bergerak dari titik A ke titik B.

3. Teori Ekonomi Historis

Teori historis menitikberatkan perhatian pada proses perkembangan perekonomian masyarakat mulai dari tahap

prasejarah hingga industri, masyarakat dunia dan masyarakat berkonsumsi tinggi

1. Frederich List

Frederich List yang membagi tahapan pertumbuhan ekonomi berdasarkan cara ataupun kebiasaan sebuah masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya melalui produksi. Mulai dari berburu dan mengembara, yang mana manusia bergantung pada alam; beternak dan bertani; dan pertanian dan kerajinan; serta Kemudian, kerajinan, industri, hingga perniagaan.

2. Werner Sombart

Werner Sombart yang menganggap bahwa tahapan pertumbuhan ekonomi terjadi karena masyarakat memiliki susunan organisasi dan ideologi masing-masing. Tahapan tersebut dibagi jadi tiga: perekonomian tertutup; kerajinan dan pertumbuhan; kapitalisme.

3. Walt Whitman Rostow

Menurut Rostow, dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan berikut:

1. Tradisional, ekonomi di dominasi sektor pertanian
2. Transisi (*pre take-off*), terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industry
3. Lepas Landas (*take-off*), ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi
4. Menuju Kematangan (*drive to maturity*), serikat buruh dan dagang semakin maju
5. Konsumsi Tinggi (*high mass consumption*), tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar dari desa

4. Karl Bucher

Pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan oleh hubungan konsumen dengan produsen. Tahapan pada

teori ini adalah:

1. Rumah Tangga Tertutup, masyarakat hanya memenuhi kebutuhan kelompoknya sendiri
2. Rumah Tangga Kota, sudah muncul hubungan dagang antar desa dan desa dengan kota
3. Rumah Tangga Bangsa/Kemasyarakatan, perdagangan antar kota akan membentuk satu kesatuan masyarakat yang melakukan pertukaran dagang dalam negara
4. Rumah Tangga Dunia, yaitu masa dimana perdagangan telah melewati masa-masa negara

D. Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Di Indonesia, inflasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan pembahasan yang utama dalam menentukan arah kebijakan perekonomian nasional. Setiap tahun pemerintah dan Bank Indonesia berusaha agar kestabilan harga atau inflasi yang rendah dapat dicapai. Akan tetapi, semenjak Indonesia mulai mengalami krisis ekonomi sampai sekarang ini, kestabilan harga belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari perkembangan inflasi tahunan (year on year) yang masih cenderung tinggi dan tidak stabil.

Teori pertumbuhan ekonomi merupakan konsep untuk menjelaskan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dalam proses jangka panjang. Teori pertumbuhan juga menjelaskan bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lain sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa teori yang Menggambarkan Hubungan antara Inflasi dengan Pertumbuhan Ekonomi antara lain sebagai berikut:

1. Teori Keynes (*Keynesian Theories*)

Teori Keynes menjelaskan hubungan antara inflasi dan

pertumbuhan ekonomi. Keynes menekankan bahwa inflasi terjadi karena adanya suatu masyarakat yang ingin hidup melebihi batas kemampuan ekonominya. Secara hipotesis hubungan jangka panjang (*long-run relationship*) antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi di mana inflasi naik akan tetapi pertumbuhan ekonomi turun. Keadaan ini membenarkan pembuktian secara empiris dari beberapa penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi bahwa inflasi yang tinggi menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun (Lubis, 2013).

2. Teori Uang dan Moneter (*Money and Moneterism Theories*)
Teori Uang dan Moneter ini fokus ke dalam komponen sisi penawaran jangka panjang (*long-run supply side properties*) di mana *Quantity Theory of Money* dan *Neutrality of Money* merupakan dua teori yang mendukung komponen sisi penawaran jangka-panjang ini. Dalam *Quantity Theory of Money*, Friedman menghubungkan inflasi dengan pertumbuhan ekonomi dengan menyamakan jumlah total uang yang dibelanjakan dengan jumlah total uang yang ada (*money stock*) di dalam ekonomi. Friedman mengusulkan bahwa inflasi yang terjadi diakibatkan oleh uang beredar (*money supply*) lebih besar efeknya daripada akibat pertumbuhan ekonomi (tingkat produksi). Friedman menyimpulkan bahwa dalam jangka panjang inflasi diakibatkan oleh jumlah pertumbuhan uang dan tidak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan uang beredar lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi maka inflasi terjadi (Lubis, 2013:44).
3. Teori Neo-Klasikal (*Neo-Classical Theories*)
Salah satu model Neo-Klasik dulunya digambarkan oleh Solow dan Swan. Faktor utama mempengaruhi pertumbuhan jangka-panjang dalam teori ini adalah perubahan

teknologi yang menggantikan investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jangka-panjang tersebut merupakan faktor eksogen (*exogenous factors*) termasuk faktor inflasi. Sementara Mundell salah satu yang pertama menerangkan mekanisme yang berhubungan dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi terpisah dari permintaan yang berlebihan (*excess demand*) terhadap komoditi. Mundell menegaskan bahwa inflasi atau ekspektasi inflasi mengurangi harta seseorang atau inflasi atau ekspektasi inflasi mengurangi bunga uang tersebut (pada saat dibelanjakan). Dengan demikian orang beralih menyimpan uang ke dalam bentuk aset yang mengandung bunga (*interest bearing assets*). Banyaknya simpanan menambah banyaknya akumulasi kapital dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Teori Pertumbuhan Endogen (*Endogenous Growth Theories*)
Pertumbuhan ekonomi hanya bergantung kepada satu variabel yaitu keuntungan dari kapital tersebut (*rate of return on capital*). Karena inflasi ini menurunkan jumlah keuntungan (*rate of return*), maka mengurangi akumulasi kapital (*capital accumulation*) dan akibatnya menurunkan pertumbuhan ekonomi. Teori ini mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terus terjadi akibat dari jatuhnya keuntungan kapital tidak melebihi tingkat kritisnya dan individu akan terus berinvestasi dan menambah kapital akumulasi yang seterusnya menaikkan pertumbuhan ekonomi. Teori Pertumbuhan Endogen ini dikembangkan dengan menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh kapital manusia (*human capital*) dan kapital fisik (*physical capital*) (Lubis, 2013:44).

E. Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Terdapat keterkaitan era tantara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi (*economic development*) tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*); pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi terjadinya peningkatan produk domestik bruto (PDB) sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat bila persentase kenaikan PDB pada suatu periode lebih besar dari periode sebelumnya. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah dalam jangka panjang, di mana PDB naik lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk. Berikut merupakan perbedaan mendasar dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi:

Tabel 11.1
Perbedaan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Pembeda	Pertumbuhan Ekonomi	Pembangunan Ekonomi
Sifat keberhasilan	Bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan	bersifat kualitatif, bukan hanya penambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga, pengetahuan, sosial dan teknik

Pembeda	Pertumbuhan Ekonomi	Pembangunan Ekonomi
Penekanan pada Kenaikan PDB	Menekankan kenaikan PDB tanpa membandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk.	Kenaikan pada pembangunan ekonomi yaitu kondisi saat laju kenaikan PDB melebihi kenaikan pertumbuhan penduduk
Akibat dan perbaikan kondisi	Hanya melihat kenaikan tanpa melihat akibat atau perbaikan kondisi yang ada. Jadi, penekanannya hanya pada pertambahan sarana seperti jembatan, mesin-mesin, dan sarana listrik.	Pembangunan ekonomi tidak hanya menekankan pada pertumbuhan secara fisik, melainkan juga perbaikan kelembagaan, kondisi ekonomi, sikap, dan struktur yang ada supaya lebih berhasil guna dan berdaya guna.
Indikator keberhasilan	Keberhasilan pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh luasnya tanah dan kekayaan alam, kuantitas dan kualitas tenaga kerja, kepemilikan barang modal, penguasaan teknologi, sistem social di masyarakat	Keberhasilan pembangunan ekonomi ditentukan atas peningkatan pendapatan perkapita, pengangguran menurun, kesenjangan pendapatan menurun.

Suatu perekonomian dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang apabila pendapatan perkapita dalam jangka panjang cenderung meningkat. Hal ini tidak berarti bahwa pendapatan perkapita harus mengalami kenaikan terus menerus. Misalnya, suatu negara terjadi musibah bencana alam ataupun kekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Namun, kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun.

F. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Hubungan antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi saling berkaitan. Apabila tingkat inflasi tinggi maka dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, sebaliknya inflasi yang relatif rendah dan stabil dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka tingkat pengangguran akan mengalami penurunan karena pertumbuhan ekonomi akan menuju pada tingkat kesempatan kerja penuh (full employment). Tetapi pada realitanya, negara dengan tingkat pertumbuhan tinggi juga akan mengalami inflasi tinggi yang akan memberikan dampak terhadap perekonomian. Adanya inflasi tinggi akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tinggi walaupun hal tersebut tidak berlangsung lama, akan tetapi dampak yang terjadi setelahnya ialah kemungkinan akan laju perlambatan pertumbuhan ekonomi, bahkan adanya kemunduran ekonomi yang disebabkan tingginya inflasi.

Secara umum, inflasi adalah suatu keadaan perekonomian dimana harga-harga secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus dalam waktu yang panjang. Umumnya, inflasi menjadi penyebab menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Dikatakan tingkat harga secara umum sebagai syarat inflasi dikarenakan ada banyak sekali jenis barang di pasaran. Naiknya harga satu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi, disebut inflasi jika sebagian besar barang-barang mengalami kenaikan. Juga dikatakan kenaikan harga secara terus menerus sebagai syarat dikatakannya sebuah inflasi, hal ini karena harga bisa saja naik hanya untuk sementara, kenaikan harga yang bersifat sementara ini tidak bisa disebut inflasi. Jadi, ketika kenaikan tersebut berlangsung dalam waktu yang lama dan terjadi hampir pada seluruh barang dan jasa secara umum, maka gejala inilah yang disebut dengan inflasi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu

proses perubahan perekonomian negara dalam jangka waktu tertentu untuk menuju kondisi ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan melalui kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan kehidupan masyarakatnya yang lebih baik. Lalu apakah suatu negara yang mengalami gejala perkembangan ekonomi berpengaruh terhadap perkembangan suatu bisnis? Tentu saja iya, karena perubahan dari perekonomian masyarakat akan mempengaruhi permintaan persediaan barang dan jasa suatu bisnis.

G. Ikhtisar

1. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan dan target utama dalam penerapan kebijakan ekonomi.
2. Salah satu cara mengukur pertumbuhan ekonomi ialah dengan melihat pendapatan nasionalnya
3. Teori pertumbuhan klasik menganggap pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menurun dengan bertambahnya populasi dan sumber daya yang semakin terbatas.
4. Teori Pertumbuhan Neoklasik adalah model pertumbuhan ekonomi yang menguraikan bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi bisa stabil hanya jika tiga kekuatan ekonomi ikut bermain: tenaga kerja; modal; dan teknologi.
5. Keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan inflasi dianalisis dengan beberapa teori antara lain teori Keynes, Teori Uang dan Moneter, Teori Neo-Klasikal, dan teori pertumbuhan endogen.
6. Pembangunan ekonomi (economic development) tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi (economic growth);

pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi.

7. Pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat bila persentase kenaikan PDB pada suatu periode lebih besar dari periode sebelumnya. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah proses yang bertujuan untuk menaikkan PDB suatu negara atau daerah dalam jangka Panjang
8. Apabila tingkat inflasi tinggi maka dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, sebaliknya inflasi yang relatif rendah dan stabil dapat mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, maka tingkat pengangguran akan mengalami penurunan karena pertumbuhan ekonomi akan menuju pada tingkat kesempatan kerja penuh (full employment). Tetapi pada realitanya, negara dengan tingkat pertumbuhan tinggi juga akan mengalami inflasi tinggi yang akan memberikan dampak terhadap perekonomian.

H. Pertanyaan dan Diskusi

1. Bagaimana kondisi yang dapat dikatakan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi?
2. Sebutkan salah satu faktor masalah yang sering terjadi saat pembangunan ekonomi di negara berkembang!
3. Bagaimana keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi?

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, A. (2016). *Esensi Hutang Dalam Konsep Ekonomi Islam. Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(1), 133.
- Bank Indonesia. (2021). *Laporan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2020*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Boediono. (2001). *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE
- Chapra, M. Umer. (1997). *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Terjemah oleh Lukman Hakim, Yogyakarta: Dhana Bakti Prima Yasa
- Hamid, E. S. (2000). *Perekonomian Indonesia Masalah dan Kebijakan Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press.
- Huda, N. dkk. (2012). *Dalam Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.
- Iska, S. (2012). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*. Yogyakarta: Fajar Media Press
- Mankiw, G. (2007). *Macroeconomics 6th edition*. (F. Liza, & I. Nurmawan, Trans.) Jakarta: Erlangga.
- Nopirin. (2000). *Ekonomi Moneter Buku II*. Yogyakarta: BPFE.
- Rozalinda. (2004). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer. (1992). *Makro ekonomi*. Jakarta: Erlangga

- Samuelson, Paul A. & Nordhaus, William D. (2004). *Ilmu Makroekonomi*. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Media Global Edukas
- Sukirno, Sadono. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta: 2011
- Sukmana, Raditya. (2011). Economic Sectors Sensitivity to Islamic and Conventional Monetary Instrument: Case Study in Indonesia. Paper. *8th International Conference on Islamic Economics and Finance, 19-21 Desember 2011*
- Supatmoko. (2013). *Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktik (keenam)*. Yogyakarta: BPF
- Suprayitno, Ek. (2005). *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Zarqa, Anas. (1980). *Islamic Economics an Approach to Human Welfare*. dalam Khursid Ahmad (ed.), *Studies in Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation

GLOSARIUM

A

Aggregate Demand: AD, Nilai seluruh permintaan pada seluruh jenis produk barang dan jasa pada tingkat harga tertentu yang dibuat dalam suatu periode tertentu.

Aggregate Demand curve: Hubungan negative antara tingkat bunga dengan tingkat output (pendapatan nasional) yang diminta sebagai reaksi dipenuhinya keseimbangan di pasar barang dan pasar uang

Aggregate Supply: AS, Hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dan tingkat harga

Aggregate supply curve: Hubungan positif antara tingkat bunga dan tingkat output (pendapatan nasional) yang ditawarkan sebagaimana dipenuhinya keseimbangan di pasar kerja

Automatic Stabilizer: Kebijakan fiskal yang dirancang untuk mengimbangi fluktuasi aktivitas ekonomi suatu negara tanpa intervensi pemerintah

Average Propensity to Consume: APC, kecenderungan mengkonsumsi rata-rata/rata-rata pendapatan yang konsumen habiskan untuk membeli barang dan jasa daripada ditabung.

Kita dapat menghitungnya dengan membagi total konsumsi terhadap pendapatan disposabel.

Average Propensity to Save: APS atau kecenderungan menabung rata-rata adalah simpanan total yang diinginkan dibagi dengan total disposable income

B

Balanced deficit: Kebijakan dalam penyusunan APBN di mana anggaran untuk pengeluaran pemerintah lebih besar daripada penerimaan pemerintah.

Balanced Surplus: Kebijakan dalam penyusunan APBN di mana anggaran untuk pengeluaran pemerintah lebih kecil daripada penerimaan pemerintah

Balanced of payment: Catatan yang dilakukan secara sistemik atas keseluruhan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang berupa perdagangan barang dan jasa, transfer keuangan, dan moneter antara penduduk Indonesia dengan penduduk luar negeri selama satu periode tertentu

Business Cycle: Siklus bisnis adalah suatu pola pergerakan yang menggambarkan kondisi ekonomi mengenai aspek-aspek tentang kondisi ekspansi maupun kondisi puncak suatu pergerakan aktivitas ekonomi bisnis suatu negara yang akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja suatu perusahaan

C

Closed economy: ekonomi tanpa transaksi dengan negara lain. Untuk menumbuhkan ekonomi, mengandalkan konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, dan pengeluaran pemerintah.

Consumer price index: CPI, Disebut juga Indeks Harga Konsumen adalah ukuran yang melihat rata-rata tertimbang harga barang dan

Consumption: Kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung.

Contractionary fiscal policy: Pengurangan belanja pemerintah dan atau peningkatan pajak yang dirancang untuk menurunkan permintaan agregat dalam perekonomian

Cost push inflation: Inflasi yang terjadi karena adanya dorongan biaya atau juga dapat disebut dengan kenaikan biaya produksi

Crowding out: Suatu kondisi ketika pemerintah sangat agresif meminjam dari publik (menerbitkan surat utang) dengan suku bunga tinggi, sehingga sektor bisnis menjadi enggan berinvestasi

D

Deflation: suatu periode di mana harga-harga secara umum mengalami penurunan dan nilai uang bertambah. Ekonomi yang mengalami deflasi akan menunjukkan gejala harga-harga, gaji, dan upah menurun

Demand for money: Permintaan uang adalah kepemilikan aset keuangan yang diinginkan dalam bentuk uang: yaitu uang tunai atau deposito bank daripada investasi.

Demand pull inflation: Inflasi karena naiknya permintaan, disebabkan naiknya permintaan total (agregat demand) yang berlebihan sehingga terjadi perubahan harga

Depreciation: Ukuran seberapa banyak nilai aset telah digunakan pada titik waktu tertentu

Depression: Keadaan ekonomi dengan kondisi resesi yang parah

Devaluation: Penurunan nilai uang yang dilakukan dengan sengaja terhadap uang luar negeri atau terhadap emas, misalnya untuk memperbaiki perekonomian

Discount rate: Tingkat bunga yang dibebankan oleh bank sentral Ketika meminjamkan dana ke bank

Disposable income: Pendapatan yang siap dibelanjakan atau siap dikonsumsi konsumen setelah dikurangi pajak langsung dan pajak tak langsung. $Y_d = Y - T_x + T_r$

E

Economic growth: Pertumbuhan output atau pertumbuhan pendapatan nasional dalam kurun waktu tertentu yang berhubungan dengan pertumbuhan dalam input seperti tenaga kerja, modal dan teknologi

Employment: Tingkat kesempatan kerja yang tersedia dalam suatu perekonomian

Equilibrium: Keseimbangan antara permintaan dan penawaran pasar

Exchange rate: Kurs atau nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain

Expansionary policy: Kebijakan yang ditunjukkan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi suatu masyarakat sehingga mampu meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan riil masyarakat

F

Fiscal policy: kebijakan ekonomi yang berkaitan dengan penerimaan pemerintah. Bentuk penerimaan ini adalah pajak bersih yang diperoleh dari sektor rumah tangga. Pajak

ini digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang disebabkan oleh kegiatan pemerintahan

Full employment: kondisi dimana jumlah kesempatan kerja sama dengan jumlah tenaga kerja yang ada

G

Gross Domestic Product: GDP, Produk domestic bruto. jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam periode waktu tertentu

GDP Deflator: Rasio antara PDB riil dengan PDB nominal, dikalikan 100. Deflator PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi, dan jasa

GDP riil: Mengukur nilai barang dan jasa akhir dengan menggunakan harga yang tetap atau konstan pada tahun dasar

GDP Nominal: Nilai barang dan jasa akhir dengan harga yang berlaku di pasar pada tahun tersebut

Government expenditure: Pengeluaran pemerintah. penggunaan uang dan sumberdaya suatu negara untuk membiayai suatu kegiatan negara atau pemerintah dalam rangka mewujudkan fungsinya dalam melakukan kesejahteraan. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat

Gross National Expenditure: Jumlah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan pelaku ekonomi makro suatu negara untuk membeli barang dan jasa pada periode tertentu

Gross National Income: Jumlah seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh faktor produksi yang digunakan suatu negara dalam periode waktu tertentu

Gross National Product: Total nilai pasar semua produk dan jasa yang dihasilkan dalam satu tahun dengan tenaga kerja dan properti yang disediakan oleh semua penduduk atau warga negara dimanapun lokasi produksinya

Growth Theory: Teori yang berupa penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain sehingga terjadilah proses pertumbuhan

H

Hyperinflation: Inflasi yang tidak terkendali, dimana terjadi lonjakan harga yang terjadi secara cepat dan tiba-tiba, tanpa adanya kenaikan pendapatan secara umum, sehingga jumlah uang yang beredar terlalu banyak, namun nilai mata uang turun secara drastis.

I

Inflation: Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

Inflationary gap: Jumlah di mana produk domestik bruto aktual melebihi potensi PDB lapangan kerja penuh. Ini adalah satu jenis kesenjangan output, yang lainnya menjadi kesenjangan resesi.

Inside lag: Periode waktu antara proses terjadinya gangguan dengan waktu Tindakan dilakukan. Biasanya keputusan kebijakan fiskal sering mengalami sifat inside lag ini

Interest rate: Imbal jasa atas pinjaman uang. Persentase dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa dalam suatu periode tertentu

Investment: Pengeluaran untuk menambah stok modal fisik

IS curve: Kurva yang menghubungkan berbagai tingkat pendapatan nasional pada berbagai kemungkinan tingkat bunga, di mana dipenuhinya syarat keseimbangan pasar barang

IS-LM model: Interaksi antara kurva IS-LM yang menentukan tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan pada harga tertentu, di mana adanya keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang

J

Jumlah Uang Beredar: Sejumlah uang beredar yang digunakan dalam perekonomian (M1, M2, M3)

L

Life Cycle Hypothesis: Teori konsumsi yang menekankan bahwa konsumen melakukan aktivitas konsumsinya dan menabung dari pendapatan total dan akan digunakan pada saat pension sesuai alur siklus kehidupannya

LM Curve: Kurva yang menghubungkan antara berbagai tingkat pendapatan nasional pada berbagai kemungkinan tingkat bunga, di mana dipenuhinya syarat keseimbangan pasar barang

M

M1, M2, M3: berbagai ukuran uang dalam perekonomian. M1(uang dalam arti sempit yaitu semua kewajiban sistem moneter kepada masyarakat. Termasuk di dalamnya ialah uang kartal (M0) ditambah checkable deposit), M2 (M1+ tabungan, deposito berjangka), M3 (M2+asset likuid lain termasuk di dalamnya deposito jangka Panjang)

Marginal Efficiency Capital: MEC, nilai tambah investasi. Tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang sebagai

sebuah proyek investasi dengan besarnya modal yang diperlukan untuk diinvestasikan dalam proyek tersebut

Marginal Product of Labor: MPL, produk marjinal tenaga kerja. Tambahan kenaikan output dari penambahan satu unit tenaga kerja dengan input faktor lain diasumsikan tetap

Marginal Propensity to Consume: MPC, kecenderungan mengkonsumsi marjinal. Kenaikan konsumsi sebagai akibat dari kenaikan 1 rupiah disposable income

Marginal Propensity to Save: MPS, kecenderungan menambah tabungan. Kenaikan tabungan sebagai akibat penambahan 1 rupiah pendapatan disposabel

Monetary Policy: Kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter kestabilan jumlah uang beredar

Money Demand Function: Fungsi permintaan uang. Fungsi yang menunjukkan determinan keseimbangan permintaan akan uang riil, $(M/P)_d = L(I, Y)$

Multiplier. Pengganda. Kenaikan PDB dari setiap kenaikan 1 rupiah belanja pemerintah

Moral hazard: Kerusakan moral. Kemungkinan perilaku tidak jujur dalam situasi di mana perilaku dipantau secara tidak sempurna, misal dalam teori upah efisien, ada kemungkinan pekerja bergaji rendah akan mengurangi tanggungjawab mereka dan mengambil resiko untuk dipecah

O

Open economy: Perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional (ekspor dan impor) barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain.

Open market operation: Operasi pasar terbuka, pembelian atau penjualan surat berharga atau obligasi pemerintah oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar

Open unemployment: Suatu kondisi ketika seseorang memiliki keinginan untuk bekerja, berpendidikan, tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan

Outside lag: Kelambanan waktu ke luar. Jeda waktu antara Tindakan kebijakan dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Biasanya kebijakan moneter yang mengalaminya

P

Pigou effect: Efek berupa dorongan output dan kesempatan kerja yang disebabkan oleh peningkatan konsumsi akibat meningkatnya kesejahteraan berupa kekayaan, khususnya terjadi selama deflasi.

Permanent income: Pendapatan yang diharapkan orang terus berlanjut di masa depan dalam jangka panjang

Phillips curve: Hubungan jangka panjang antara inflasi dan pertumbuhan atau antara inflasi dan pengangguran. Semakin tinggi pertumbuhan, makin tinggi inflasi. Alternatifnya, makin rendah pengangguran, makin tinggi inflasi

Precautionary motive: Motif berjaga-jaga. Motif seseorang untuk memegang uang demi memenuhi kebutuhan untuk berjaga-jaga di waktu sakit atau kondisi darurat lain

Q

Quantity theory: Teori permintaan uang yang menekankan pada hubungan pendapatan nominal dengan uang nominal.

S

Seignorage. Pajak inflasi. Kenaikan penerimaan pemerintah melalui kebijakan pencetakan uang yang memegang hak penciptaan uang.

Speculative motive: Motif individu memegang uang untuk tujuan melakukan spekulasi di pasar uang untuk memperoleh keuntungan

Supply shock: Guncangan penawaran gangguan ekonomi yang berdampak menggeser kurva penawaran agregat

T

Tax inflation: Ketika inflasi disebabkan karena banyaknya jumlah uang beredar, maka inflasi ini disebabkan karena kebijakan pemerintah mencetak uang terlalu banyak untuk membiayai kegiatan perekonomiannya sehingga masyarakat harus membayar kenaikan harga akibat pemerintah mencetak uang tersebut

Transaction motive: Motif masyarakat memegang uang untuk memenuhi kebutuhan transaksi tunai rutinnnya sehari-hari

Transfer payment: Pembayaran pemerintah atas sejumlah uang yang diberikan pemerintah kepada individu, bukan dalam bentuk transaksi barang dan jasa, misal subsidi, tunjangan

U

Unemployment rate: Persentase orang-orang dalam Angkatan kerja yang menganggur

V

Value added: kenaikan nilai output pada tahap produksi tertentu. Nilai output perusahaan dikurangi biaya input

Velocity of money: Perputaran uang. Kecepatan uang berpindah tangan dalam waktu tertentu

W

Wage rigidity: Kekakuan upah. Kesulitan upah untuk naik atau turun yang menyesuaikan agar seimbang antara penawaran dan permintaan tenaga kerja



TEORI EKONOMI MAKRO



GERBANGMEDIA
www.gerbangmediaaksara.com



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID
SURAKARTA

ISBN: 978-623-6666-72-2



9 786236 666722